Edisi 51, 16 Shafar - 29 Rabiul Awwal 1432 H/ 21 Januari - 3 Februari 2011

Media umat

tabloid

memperjuangkan kehidupan islam

REPUBLIK KORUPTOR

148 KEPALA DAERAH JADI TERSANGKA

Harga Rp. 6000,- Luar jawa Rp. 7500,-

www.mediaumat.com



Salam Redaksi

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu

Salam Perjuangan!

Alhamdulillah, kami bisa hadir kembali di ruang baca Anda membawa informasi yang penuh isi dalam menyikapi berbagai situasi. Semoga kehadiran kami ini mampu mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua.

Pembaca yang dirahmati Allah, kami berterima kasih kepada Anda yang telah mengirimkan artikel opini ke meja redaksi melalui email. Jumlahnya kian hari kian bertambah. Kami tidak mungkin memuat semuanya karena keterbatasan ruang di media kita ini. Namun kami tetap berharap Anda terus mengirimkan artikelnya, siapa tahu tulisan Anda mendapat giliran dimuat di media ini.

Demikian pula kiriman SMS, jumlahnya pun banyak. Bisa dikatakan, tiada hari tanpa SMS masuk. Ada yang pendek, ada yang sangat panjang. Ada yang isinya sangat serius, ada yang diselingi sindiran-sindiran lucu. Bahkan ada yang isinya mencari jodoh. Kami sangat bergembira dengan partisipasi Anda yang sangat besar itu. Semoga ini menjalin silah ukhuwah di antara kita.

Pembaca yang dirahmati Allah, rasanya musibah demi musibah terus bergelayut di atas langit negeri ini. Angin puting beliung, banjir, ombak besar, dan sebagainya kini melanda berbagai daerah. Selain itu, muncul pula kerusakan tatanan sosial masyarakat, ketidakadilan hukum, korupsi, kemiskinan, dan sebagainya. Seolah semua musibah dan kebejatan sekarang muncul di permukaan.

Sayangnya, banyak orang tak mau introspeksi atas bencana yang melanda negeri ini. Semuanya dianggap sebagai hal biasa dan tak terkait dengan dosa dan kemaksiatan manusia. Mereka menegasikan kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa dan Perkasa.

Padahal, semua kerusakan dan musibah itu adalah ulah tangan manusia yang melanggar ketentuan-Nya. Allah menimpakan berbagai kesempitan kepada manusia agar manusia sadar dan kembali ke jalan-Nya. Tapi banyak orang mengabaikannya.

Sungguh Islam diturunkan untuk memberikan nikmat kepada seluruh alam semesta. Itulah *rahmatan lil alamin*. Tentu hal itu baru terwujud bila Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.

Tidakkah kita pernah menengok ke belakang, bukti tersebut? Islam mampu mengubah peradaban jahiliyah baik di Timur dan Barat menjadi peradaban modern. Tanpa kebangkitan Islam, dunia tak akan seperti sekarang.

Pembaca yang dirahmati Allah, kalau kita ingin kembali berjaya dan membahagiakan seluruh manusia, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Islam kaffah dalam naungan khilafah. Hanya dengan itu, berbagai kerusakan dan musibah akan teratasi.

Akhirnya, mari kita terus menggelorakan semangat, membulatkan tekad dalam rangka memperjuangkan tegaknya kembali syariah dan khilafah agar hidup kita menjadi berkah. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah! Allahu Akbar!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu



Dirasah Syar'iyyah XIII: Membandingkan APBN Konvensional VS APBN Syariah, Sabtu (15/1) di Gedung DPP HTI Crown Palace, Jakarta. Hadir sebagai pembicara KH Hafidz Abdurrahman dan Prof Dr Ing Fahmi Amhar.

Media Pembaca

Khilafah di Dadaku

Bismillaah... Khilafah di dadaku, Islam kebanggaanku, kuyakin suatu saat pasti tegak... Kobarkan semangatmu, tunjukkan kredibilitasmu, sambutlah janji Allah & Rasulnya. **Juki. Baubau, Sultra. +6285756559xxx**

Tergerus Keburukan Sistem

Assalamualaikum. MU, memang calon pemimpin di bumi Nusantara ini baik orang dan akhlaknya. Tapi kalau mereka masuk dalam sistem yang salah mereka akan hancur tergerus keburukan sistem itu. Untuk menghindari kefasadan di negeri ini, kita layak mengganti demokrasi dengan sistem yang syar'i yakni khilafah. **Mustagfirin Al Baim. Bojonegoro, Jawa Timur. +6285655051xxx**

Jangan Sia-siakan

Andaikan agama Islam yang mulia ini bisa tegak dengan seorang diri, tak perlu Musa mengajak Harun & tak perlu juga Rasulullah Muhammad SAW mengajak Abu Bakar untuk menemaninya Hijrah. Meskipun pengemban dakwah Islam itu seorang alim, faqih & memiliki azzam yang kuat tetapi ia manusia lemah & selalu membutuhkan saudaranya, meskipun saudaranya itu memiliki banyak keterbatasan. Karena itu, jagalah saudaramu & jangan kau sia-siakan. Karena sangat bisa jadi ia orang yang selalu mendoakanmu dan engkau butuhkan pada saat kesulitan dalam setiap langkah-langkahmu. *Fawatsiqillahumma Raabithataha.* **U Nidzam. Tangerang. +628129996xxx**

Teladan Ibnu Muzzabah

Abdullah bin Muzzabah, tertangkap pasukan Romawi, lalu ditawarkan masuk Kristen oleh raja, ditawarkan jabatan dan harta. Karena Abdullah menolak, orang Romawi menyiksanya. Beragam siksaan telah dirasakannya. Terakhir orang Romawi merebus air sampai mendidih, lalu umat Islam dimasukan satu per satu, Abdullah menangis. Lalu raja bertanya, "Mengapa engkau menangis Abdullah? Apakah engkau takut?" Abdullah menjawab, "Tidak, aku sedih punya nyawa satu, seandainya aku punya nyawa sebanyak rambut di kepalaku, aku lebih menyukai mati berkali-kali." Akhirnya Raja Romawi tidak lagi menyiksanya lalu membebaskan Abdullah bin Muzzabah, juga umat Islam lainya. Begitulah orang yang beriman, tidak tergiur dengan tipu daya orang kafir. Di negeri ini untuk mendapatkan sebuah jabatan atau dolar, mudah sekali menggadaikan aqidahnya, bahkan tidak sedikit yang jadi musyrik.Tidak ingat mati. Kematian itu pasti datang. **Abu Usamah. Bandar Lampung. +6283170455xxx**

Empat Penyakit

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang bangun di pagi hari & hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan empat penyakit. (1) Kebingungan & kesedihan yang tiada putus-putusnya. (2) Kesibukan yang tidak pernah ada habisnya. (3) Kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi. (4) Khayalan & cita-cita yang tidak pernah sampai." (HR Imam Thabrani). Semoga kita terhindar dari semuanya itu. Amin Yaa Rabbal Aalamiin. **Ibnu Kurdi. Sukabumi. +6285219677xxx**

Khilafah Sesuai Fitrah

Hasil survei dari LSM-LSM di negeri ini tentang penerapan khilafah membuktikan bahwa ide ini adalah ide yang sesuai fitrah manusia. Rakyat telah banyak yang jumud dengan model pemerintahan saat ini, yang sarat korupsi, maksiat, pelecehan terhadap perempuan dan kriminal lainnya yang tiada henti. Ide khilafah memang sesuai dengan fitrah manusia yang



SMS Redaksi: 081288020261. Sertakan Nama dan Asal

tabloid Media Umat

Penerbit: Pusat Kajian Islam dan Peradaban. **Dewan Penasihat :** KH Ma'ruf Amien, KH Nazri Adlani, KH Amrullah Ahmad, KH Syukron Makmun, KH Muhammad Arifin Ilham , KH Athian Ali M Dai, Achmad Michdan SH, KH Thohlon Abdurrauf , H Azwir, KH dr Muhammad Utsman, H Hari Moekti, Ustadz Abu Bakar Baa'syir, AGH Sanusi Baco, Lc, KH Syamsuddin Latif, KH DR Miftah Faridl, Dra Hj Nurdiati Akma M.Si, Dra Hj Nurni Akma, Prof Dr Ir Zoer'aini Djamal Irwan MS, KH Husin Naparin, Lc, MA. **Penasihat Hukum:** Achmad Michdan SH. **Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Farid Wadjdi. **Pemimpin Perusahaan:** Anwar Iman. **Sidang Redaksi:** Hafidz Abdurrahman, MR Kurnia, Harist Abu Ulya, Muhammad Ismail Yusanto, Rochmat S. Labib. **Redaktur Pelaksana:** Mujiyanto. **Redaksi:** W almaroky, Zulkifli, Joko Prasetyo, Iwan Setiawan, Zulia Ilmawati, Nanik Wijayati, Febrianti Abbasuni, Kholda. **Kontributor Daerah:** Rifan (Jatim), Fakhruddin (Babel), Apri Siswanto (Riau), Rikhwan Hadi (Sumbar), Kurdiyono & Ahmad Sudrajat (DIY), Eko (Sultra), Nazar Ali & Handani (Jabar), Bahrul Ulum (Sulsel), Abduh (Kalsel), Budianto Haris (Sumsel), Dani Umbara Lubis (Sumut), Dadan Hudaya (Banten) **Desain dan Pracetak:** Kholid Mawardi. **Keuangan:** Budi Darmawan . **Marketing distribusi:** Abu Hasan (koordinator), Firman, Wahyudi. **Iklan:** Aris Rudito, M Rosyid Aziz. **Alamat Redaksi:** Jl. Utan Kayu Raya no. 109 C Utan Kayu Jakarta Timur 13120. **Email:** pembaca.tabloidmu@gmail.com. **Iklan Pemasaran:** Jl. Utan Kayu Raya no. 109 C Utan Kayu Jakarta Timur 13120. **Email Iklan:** iklan.tabloidmu@gmail.com . **Email Marketing:** marketing.tabloidmu@gmail.com **Hunting Pemasaran:** 085691264454, 021-26170230. **Hunting Iklan:** 021-26170220, 081 398 396 221.**Rekening:** Bank Muamalat No Rek 9064150699 a.n Budi Darmawan.

menginginkan ketentraman lahir batin, menginginkn jaminan keamanan, dan ksejahteraan. Jadi tunggu apalagi, mari sebarkan ide khilafah ini lebih gencar dari sebelumnya. Mari kita ajak tetangga, teman-teman kampus, teman pengajian, sesama wali murid, guru, dosen, bahkan tukang parkir, tukang bakso, pedagang keliling, pedagang pasar. Siapapun yang kita temui, sebarkan ide ini, agar scepatnya bisa tegak. Allahu Akbar!!! **Ummu wildan. Kupang, NTT. +6281339343xxx**

Teguhkan Perjuangan

Cinta. Andai kita tahu apa arti cinta. Andai kita bisa memberikan cinta. Andai kita mengerjakan sesuatu dengan cinta. Andai kita tahu apa arti cinta yang hakiki, ya hanya Allah- lah yang hanya bisa memberikan cinta yang sesungguhnya kepada hamba-Nya, bumi berputar atas kuasa-Nya, udara diciptakan tanpa ada batasannya, andai kita menghitung tak layak kita mengeluh. Dia telah memberikan, tapi apa yang telah kita berikan? Saudaraku teguhkanlah perjuanganmu, luruskanlah niatmu untuk terus membela agama yang sempurna ini. **Udai. Cibarusah. +6281389317xxx**

Kafir Harbi Fi*m k*'lan

AS berkomitmen penuh membantu Sudan Selatan jika merdeka. (*Eramuslim.com,10/1*). Saudaraku, ini bukti nyata AS ada di balik disintegrasi Sudan. Dengan ideologi kapitalis-imperialisnya AS berusaha mencabik-cabik negeri Islam agar bisa dikangkangi & dieksploitasi SDA-nya hingga habis. AS adalah teroris sebenarnya & musuh dunia Islam. Haram kerja sama dalam bentuk apapun dengan AS. Hubungan dengan AS adalah hubungan perang. AS = negara kafir *harbi fi'lan*, yang jelas-jelas memerangi Islam & kaum Muslimin. Hanya orang tolol yang mau tunduk pada semua arahan AS. Hanya Khilafah Islam yang akan mengalahkan semua hegemoni AS & sekutunya. Ayo tegakan syariah & khilafah. Allaahu Akbar! **Zainuddin Mansyur. Bandung. 085320137xxx**

▶ Komentar untukMU

MU Versi Remaja

Assalamu alaikum Wr Wb. Saya punya ide buat redaksi MU, bagaimana kalau antum membuat juga MU remaja sehingga para remaja di era global ini tidak membaca majalah jahiliyah lagi. Ok? **M Abdul Hafid. UNEJ, Jember. +6285749754xxx**

Uraikan Perkembangan Islam

Assalamualaikum Wr Wb. Saya pelanggan MU. Setelah membaca Edisi 50 tentang Kilas Balik Dunia Islam mengenai derita umat Islam pada tahun 2010, yang memaparkan keterpurukan dan tidak berdayanya Dunia Islam, sebaiknya juga diuraikan pula perkembangan Islam yang ada di setiap kawasan sebagaimana gambaran adanya harapan/optimisme di tahun 2011. Wassalam Wr Wb . **Sugeng Randusari. Magelang, Jateng. +6285868576xxx**

Media Wasilah Kebangkitan

Bangkitnya umat ini tidak lain adalah dengan terjadinya kebangkitan berpikir. Dari berpikir dangkal menjadi berpikir cemerlang. Semoga Media Umat akan terus menjadi media wasilah yang benar-benar dalam membangkitkan taraf berpikir umat di tengah kehidupan sekuler kapitalistik sekarang ini. Membuat umat semakin sadar akan wajibnya berhukum pada hukum Allah, dan sadar pula bahwa takkan bisa berhukum kepada hukum Allah secara kaffah tanpa adanya sebuah institusi yang menjadi pelaksanannya. Itulah Khilafah Islam, institusi pelaksana syariah secara kaffah, penebar rahmat untuk semesta alam dan yang akan menjaga ukhuwah, menyatukan umat ini dalam bingkai aqidah, dan mencampakkan ikatan batil seperti nasionalisme yang menjadi penyebab utama runtuhnya institusi khilafah pada 3 maret 1924 silam. **Adi Victoria. Samarinda. +6281347421xxx**

Ralat

Dalam MU Edisi 50 halaman 19 ditulis... Sumiati..., seharusnya ...Kikim Komalasari....

Belajar Dari Tumbangnya Rezim Tunisia

Kejatuhan rezim diktator yang menerapkan kapitalisme tinggal menunggu waktu, perubahan ke arah tegaknya syariah dan khilafah akan menjadi solusi di masa depan.

Akhirnya rezim Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali tumbang. Penguasa diktator yang telah memerintah selama 23 tahun, melarikan diri ke Saudi Arabia. Ben Ali dipaksa mundur karena gelombang unjuk rasa anti pemerintah. Kegagalan Ben Ali menyejahterakan rakyat ditambah pemerintahan yang represif selama ini membuat rezim ini tumbang.

Tak ayal, tumbangnya Ben Ali, menularkan rasa takut pada para diktator lain yang bertebaran di Timur Tengah dan Afrika. Salah seorang anggota Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, mengingatkan tumbangnya rezim Tunisia harus menjadi pelajaran bagi para diktator Afrika lainnya. Hal yang sama bisa terjadi pada mereka.

Barat pun kelihatan galau melihat krisis Tunisia. Ben Ali yang selama ini menjadi penguasa komprador yang mendukung kepentingan penjajahan Barat akhirnya ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Sesuatu yang sangat menakutkan bagi Barat. Karena selama ini keberadaan rezim-rezim pengkhianat yang menjadi boneka merekalah yang telah membuat eksistensi penjajahan mereka terjaga.

Munculnya gelombang revolusi baru tak terduga oleh Barat. Seorang komentator di surat kabar *the Washington Post* menulis, ancaman terbesar Amerika di Timur Tengah bukanlah peperangan, melainkan adalah revolusi. Kemarahan publik atas korupsi, pengangguran dan kediktatoran terjadi di Mesir, Aljazair, dan banyak negara di wilayah itu.

Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari tumbangnya rezim diktator ini. *Pertama*, tidak ada kekuasaan diktator yang kekal. Kegagalan mengurus rakyat ditambah tindakan totaliter akan menuai kebencian rakyat. Sikap represif hanya bisa memperlambat tumbangnya rezim diktator, tapi tidak bisa menghentikannya.

Kedua, krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Tunisia, tidak lain karena penerapan sistem kapitalisme yang gagal. Sistem kapitalisme hanya mengguntungkan segelintir elite yang hidup bermewah-mewah dan memberikan keuntungan kepada perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam negeri-negeri Islam. Sementara rakyat hidup menderita.

Ketiga, bersandar pada kekuatan asing penjajah sangatlah lemah. Mereka hanya berpikir pragmatis menjamin kepentingan politik dan ekonomi penjajahan mereka. Bagi para penjajah, tidak ada kata setia untuk mempertahankan bonekanya. Kalau mereka menganggap tidak ada lagi manfaat mempertahankan bonekanya, mencampakkan bahkan membunuh sahabat politik mereka sendiri bukanlah masalah besar. Hal yang sama dialami Saddam Hussein yang menjadi kaki tangan Inggris di Irak, atau Syah Reza Pahlevi di Iran, Marcos di Filipina atau Soeharto di Indonesia.

Tumbangnya rezim diktator di negeri-negeri Islam tinggallah menunggu waktu. Kegagalan sistem kapitalisme yang mereka adopsi akan mempercepat perubahan. Apalagi tuan-tuan besar penjajah mereka juga mengalami kondisi akut yang sama. Krisis ekonomi, politik dan sosial, bukan hanya terjadi pada negara boneka jajahan, tapi juga di pusat-pusat penjajahan seperti Amerika Serikat dan Eropa. Rakyat akan berpaling dari mereka semua.

Hal ini sesungguhnya merupakan kesempatan baik sekaligus tantangan bagi gerakan Islam. Harus ada tawaran yang jelas untuk mengganti rezim dan sistem kapitalisme yang gagal ini. Solusi Islam berupa penegakan syariah Islam dan khilafah harus terus disosialisasikan di tengah-tengah umat sehingga muncul kesadaran umum umat (*al wa'yu al 'ami*) yang akan memengaruhi opini umum (*ar ra'yu al 'ami*).

Opini umum yang didasarkan kepada kesadaran inilah yang akan menggerakkan umat untuk menuntut perubahan. Bukan sekadar perubahan rezim tapi juga sistem yang justru menjadi pangkal persoalan. Bukan sekadar emosi yang sifatnya sementara, tapi perubahan yang didasarkan kepada kesadaran *mabdai'* (ideologis). Kesadaran bahwa ideologi kapitalismelah yang menjadi penyebab utama berbagai krisis di tengah masyarakat.

Kesadaran imani bahwa hanya Islam dan khilafahlah yang akan menjadi solusi. Bukan sekadar karena syariah Islam dan khilafah Islam akan membawa kemashlahatan, namun yang terpenting adalah muncul dari kesadaran akan kewajiban menerapkan syariah Islam dan khilafah sebagai konsekuensi keimanan. Inilah yang akan membawa perubahan yang jelas, terarah, dan sifatnya tetap.

Perubahan seperti ini haruslah menghindari cara-cara kekerasan yang menimbulkan pertumpahan darah. Karena itu mencari dukungan dari *ahlunnushrah* (para penolong) yang memiliki kekuatan politik dan senjata seperti militer dan kepolisian menjadi sangat penting. Dukungan dari *ahlunnushrah* akan menghindarkan dari gejolak yang berdarah-darah, yang banyak mengorbankan rakyat.

Perubahan seperti inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika daulah Islam tegak di Madinah. Meskipun perubahan yang dibawa Rasulullah SAW sifatnya mendasar *(asasiyah*) dan menyeluruh (*inqilabiyah*), nyaris tak ada pertumbahan darah. Ini tidak lain karena ditopang oleh kesadaran masyarakat Madinah yang merindukan sistem yang baru yakni Islam dan pemimpin baru Rasulullah SAW. Di samping itu, *ahlunnushrah* yaitu para pemimpin kabilah utama di Madinah –Aus dan Khazraj- juga telah memberikan dukungan dan bai'at mereka kepada sang pemimpin politik baru. Kalau ini terjadi, siapa yang bisa membendung perubahan ini?[]

farid wadjdi



NEGARA KORUPTOR

Korupsi menggejala di seantero negeri gara-gara demokrasi yang berbiaya tinggi.

Tidak adilnya negara ini. Ungkapan itu sangat tepat menggambarkan wajah perpolitikan nasional. Bagaimana adil, seorang tahanan bisa dilantik sebagai walikota. Setelah itu ia sendiri melantik pejabat di bawahnya di balik tembok tinggi penjara. Coba apa ada tahanan kelas teri yang memperoleh perlakuan seperti ini?

Perlakuan istimewa itu didapatkan Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar. Bersama pasangannya Jimmy Feidie Eman ia memenangi pemilihan umum kepala daerah Kota Tomohon, Sulawesi Utara pada Agustus tahun lalu. Ketua Partai Golkar Tomohon ini berhasil menyingkirkan lawan-lawannya. Partai Golkar bersorak karena inilah satu-satunya daerah yang dimenangi partai beringin tersebut dari enam daerah yang melaksanakan pemilu kada.

Sebelum maju sebagai calon walikota untuk yang kedua kalinya, Jefferson sebenarnya telah bermasalah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka kasus korupsi uang milyaran rupiah dana APBD Kota tersebut. Namun entah kenapa, KPUD setempat tak berani mendiskualifikasi pencalonannya.

Begitu ia menang, muncullah masalah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berpandangan bahwa Jefferson harus segera dilantik. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengatakan pelantikan itu perlu untuk menjalankan roda pemerintahan.

Entah bagaimana prosesnya, keluarlah izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) atas pelantikan tersebut. KPK pun setuju, hanya meminta pelantikan itu berlangsung di Jakarta.

Demi memuluskan hal itu, Kementerian Dalam Negeri pun membuka pintu lebar-lebar bagi pelantikan tersebut berlangsung di salah ruangan di sana. Jumat (7/1), Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar dan Jimmy Feidie Eman dilantik oleh Gubernur Sarundajang di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tomohon yang diboyong dari Tomohon.

Dengan pakaian dinas upacara besar, Jefferson pun disumpah. Ratusan orang —kebanyakan dari Tomohon—menjadi saksi sejarah seorang tersangka diangkat sebagai walikota.

Usai dilantik, ia langsung mengumpulkan semua camat dan lurah di tempat tersebut. Tak tahu apa yang diinstruksikannya. Sehari berikutnya, ia membuat gebarakan dengan mengangkat pejabat eselon II di jajaran Pemkot Tomohon. Pelantikan pejabat ini berlangsung di LP Cipinang. Penjara Cipinang seolah telah berubah menjadi pendopo walikota. Benar, roda pemerintahan pun berjalan.

Namun itu tak berlangsung lama. Suara-suara di luar penjara mengecam kebijakan pemerintah tersebut, termasuk tindakan Jefferson mengangkat bawahannya. Tiga hari setelah dilantik, Jefferson dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri. Gubernur Sarundajang menunjuk wakil walikota sebagai pelaksana tugas walikota.

Kebijakan pemerintah ini menambah deret panjang kebobrokan sistem perundang-undangan yang ada. UU tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Celah-celah yang masih bolong dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk dipermainkan.

Kasus Jefferson kian juga memperpanjang deretan kasus korupsi di negeri ini. Menurut data, selama tahun 2010 dari 244 pemilu kada ada 148 kepala daerah yang terpilih tersangkut tindak pidana korupsi. Ini jumlah yang cukup besar karena angkanya mencapai 60 persen.

Ini apa artinya? Sistem pemilu kada melahirkan para koruptor. Mereka melakukan itu karena demokrasi berbiaya tinggi. Untuk menjadi kepala daerah butuh modal yang kuat. Hanya mereka yang memiliki uang banyak yang akan memenangi.

Di sisi lain, kebanyakan para calon penguasa itu hartanya pas-pasan. Maka mereka berkolaborasi dengan para pengusaha sebagai penyokong dananya. Sebagai imbalan, mereka menjanjikan pengembalian 'modal' itu baik secara langsung maupun tidak langsung saat telah duduk di kursi kepala daerah.

Nah, sangat tidak mungkin pengembalian itu berasal dari gaji. Soalnya, fakta menunjukkan gaji kepala daerah tergolong kecil. Bila ditotal, jumlahnya tidak mencukupi menutupi modal yang dikeluarkan selama kampanye pemilu kada. Maka jalan yang memungkinkan adalah korupsi. Kebijakan anggaran dan perizinan dipermainkan sedemikian rupa sehingga terlihat legal untuk mengeruk keuangan daerah. Walhasil, anggaran yang seharusnya dipergunakan oleh rakyat lari ke tangan para penguasa dan para pengusaha. Rakyat gigit jari dan dikibuli.

Apa yang terjadi itu sudah menjadi rahasia umum. Keteladanan yang buruk itu pun diikuti oleh jajaran birokrasi lainnya. Mereka ada yang terpaksa, ada yang sukarela. Jadilah korupsi ini sebagai budaya. Semua level melakoninya. Bahkan penegak hukum ikut terlibat.

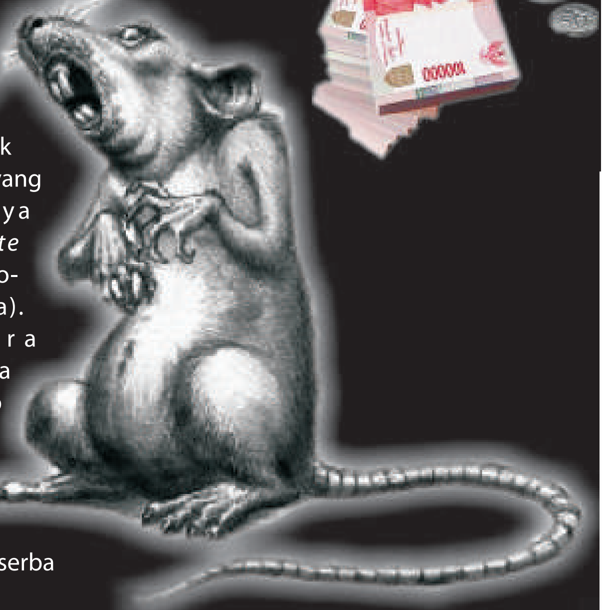
Tak heran, begitu susahnya pemberantasan korupsi di negeri ini. Korupsi telah menjadi penyakit sistemik sehingga ada yang menyebutnya sebagai *state corruption* (korupsi negara). Sementara masyarakatnya pun hidup dalam pola hidup hedonistik-materialistik dan maunya serba instan. Lengkaplah sudah.

Bagaimana korupsi seperti itu bisa dihentikan? Negara korup mau membersihkan aparat yang korup. Kasus termutakhir Gayus Tambunan bisa menjadi contoh. Ini ibarat sapu kotor mau digunakan membersihkan kotoran. Pasti tetap kotor.

Namun demikian bukan berarti peluang untuk memberantas korupsi itu tidak ada sama sekali. Syariat Islam punya cara untuk itu. Hanya saja, cara itu harus diterapkan secara komprehensif dan menyangkut kebijakan negara secara paripurna.

Tanpa penerapan syariah Islam secara kaffah, korupsi akan tetap lestari. Sebab korupsi adalah cacat bawaan demokrasi. Makanya ini sistem ini harus segera diganti dengan sistem yang datang dari Yang Maha Tinggi.[] **mujiyanto**





Koruptor Dilantik Jadi Eksekutor

Terdakwa korupsi membacakan butir-butir sumpah jabatan pejabat negara kepada bawahannya, termasuk tidak akan korupsi.



Aula Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri di Jl Veteran, Jakarta menjadi saksi bisu sejarah perpolitikan di Indonesia. Inilah pertama kali di Indonesia ada seorang tersangka tindak pidana korupsi dan statusnya tahanan dilantik sebagai walikota.

Aula yang biasa digunakan dalam acara resmi kemendagri disulap sedemikian rupa sebagai tempat pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon, Sulawesi Utara, Jumat (7/1). Sehari itu, aula Kemendagri menjadi kantor DPRD Kota Tomohon yang menggelar rapat paripurna istimewa dengan agenda tunggal pelantikan walikota dan wakil walikota.

Semua anggota DPRD berjumlah 20 orang hadir. Seluruh camat dan lurah pun hadir dengan pakaian dinas mereka. Belum lagi banyak undangan baik yang terbang langsung dari Manado maupun yang berasal dari Jakarta. Aula berkapasitas 400 orang itu penuh. Tampak Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Belum diperoleh informasi bagaimana anggaran perjalanan sedemikian banyak orang ini ke Jakarta.

Di depan wakil rakyat Tomohon yang diketuai Raymond Sengke, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang melantik Jefferson Soleiman Montesqiue Rumajar sebagai walikota dan Jimmy Feidie Eman sebagai wakil walikota Tomohon.

Usai pelantikan itu, ia langsung menggelar rapat dengan jajaran Pemkot Tomohon beserta seluruh lurah dan camat di aula tersebut. Sekitar pukul 14.00, Jefferson kembali digelandang ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang. Soalnya, ia hanya diizinkan keluar LP hingga pukul 17.00. Dengan dikawal petugas Brimob dan KPK, Ketua Partai Golkar Tomohon ini dibawa dengan kendaraan Innova B 1532 VO.

Sehari usai dilantik menjadi Walikota Tomohon, Jefferson gantian melantik 28 pejabat eselon II Pemkot Tomohon. Menariknya, pelantikan terhadap kabinetnya itu dilakukan di LP Cipinang, Jakarta, Sabtu (08/1). Ini juga kejadian pertama kali di Indonesia ada pelantikan pejabat di dalam penjara oleh pejabat yang sedang ditahan.

Lazimnya pelantikan, Jefferson sebagai terdakwa korupsi membacakan butir-butir sumpah jabatan pejabat negara kepada pejabat baru tersebut, termasuk tidak akan korupsi.

"Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dan dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya," kata Jefferson diikuti 28 pejabat yang dilantiknya.

Padahal ia sendiri kini duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait kasus dugaan korupsi APBD 2006-2008 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp 33,4 milyar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan statusnya sebagai tersangka 14 Juli 2010. Anehnya, KPU setempat meloloskan terdakwa dalam pemilu kada. Jefferson terpilih sebagai Walikota Tomohon berdasarkan hasil pilkada 3 Agustus 2010.

Sejak Senin (3/1), Jefferson menjalani sidang di Pengadilan Tipikor. Padahal berdasarkan pengalaman selama ini, semua terdakwa yang diciduk KPK tidak ada yang lolos dari penjara.

Kontra

Kontan saja banyak pihak merasa aneh dengan kebijakan Kemendagri memberi izin pelantikan itu. Abdullah Dahlan, Peneliti Div Korupsi Politik ICW, mengatakan seharusnya Mendagri tidak mengizinkan pelantikan itu. Meski ini tidak diatur oleh undang-undang, Mendagri sebenarnya bisa mempergunakan kewenangan yang dimilikinya.

Menurut Dahlan, semestinya ketika seseorang sudah masuk ke dalam proses hukum dan menjadi terdakwa, kepala daerah itu harus sudah nonaktif. "Jadi kalau sudah jadi kepala daerah saja harus dinonaktifkan, apalagi belum dilantik, *lha kok* malah dilantik?"katanya.

Namun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berkilah undang-undang menghormati praduga tidak bersalah dan jika dilakukan, itu akan mengganggu penegakan HAM. "Ini (jika dieliminasi) nanti jadi perdebatan pula (bagi pihak) yang melindungi HAM," kata Gamawan di sela-sela Rapat Kerja Pemerintah I 2011 di Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta, Senin (10/1).

Menurutnya, seseorang masih dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum tetap. "Kita ingin hormati praduga tidak bersalah," tegas Gamawan.

KPK sendiri tak mau disalahkan memberikan izin bagi terdakwa untuk dilantik. Menurut juru bicara KPK Johan Budi, izin pelantikan itu kewenangan resmi Kemendagri.

"Proses penegakan hukum tidak boleh mengganggu proses penyelenggaraan negara," ujar Plt Direktur KPK, Feri Wibisono seperti dikutip *mediaindonesia.com*, Sabtu (8/1).

Ia menjelaskan proses penegakan hukum akan tetap dilakukan kepada pejabat strategis. Persoalannya adalah jika Rumanjar tidak segera dilantik, anggaran bagi pemerintahan di Tomohon tidak akan dikeluarkan. "Kepala daerahnya kalau tidak dilantik bagaimana proses pencairan APBD-nya," imbuhnya.

Memang, tiga hari setelah dilantik Jefferson dinonaktifkan oleh Menteri Dalam Negeri. Gubernur Sulawesi Utara mengangkat wakil walikota sebagai pelaksana tugas walikota.

Beberapa kalangan mempertanyakan, kalau ujungnya ada pelaksana tugas, mengapa tidak dari awal diangkat sehingga tidak perlu ada pelantikan? Toh pelaksana tugas pun bisa menjalankan fungsi kepala daerah dengan sepenuhnya.

Tak heran Wakil Ketua ICW Emerson Yuntho, mempertanyakan bagaimana bisa hakim Pengadilan Tipikor memberi izin pelantikan itu. "Ini menjadi preseden buruk. Masa masyarakat Tomohon dipimpin oleh seorang terdakwa," tandasnya.

Di matanya, pelantikan itu tidak sesuai dengan komitmen pemberantasan korupsi yang digembor-gemborkan di negeri ini. Bagaimana mau membersihkan kotoran jika sapunya sendiri kotor? Memang lucu negeri ini... [] **mujiyanto**

Lubang Undang-Undang

Sangat tidak mungkin KPK menetapkan status seseorang sebagai tersangka bila tidak memiliki bukti dan keyakinan kuat. Pengalaman menunjukkan tak ada terdakwa yang bebas setelah menjalani proses pengadilan tindak pidana korupsi. Semuanya dipidana.

Namun institusi negara justru berada di belakang terdakwa. Tidak hanya Mendagri dan KPK, Mahkamah Konstitusi (MK) pun mendukung pelantikan itu. Alasannya, kemenangan Jefferson sah dan harus dilantik.

Mahfud mengatakan, sejak dulu ia selalu menyarankan agar kepala daerah yang jadi terdakwa, namun kemenangannya telah sah agar dilantik lebih dulu. Pada hari yang sama ia dilantik, kepala daerah itu bisa dinonaktifkan.

Tapi apakah proses itu sesuai etika politik yang ada? Pengamat Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pelantikan itu menunjukkan etika politik yang masih buruk "Saya sepakat tidak ada UU yang dilanggar, namun masalahnya bukan pada tafsir undang-undang tapi pada etika politik," katanya dikutip sebuah laman.

Ini semua terjadi karena undang-undang yang ada memang memiliki lubang untuk itu. Seorang calon kepala daerah tak perlu harus bebas status tersangka. Bahkan pezina maupun artis porno pun boleh. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para politisi untuk bermain dan melegitimasi perilaku politiknya. [] **humaidi**

Media Umat | Edisi 51, 16 Shafar - 29 Rabiul Awwal 1432 H/ 21 Januari - 3 Februari 2011



Rezim Para Koruptor

Tidak mungkin para kepala daerah terpilih mampu mengembalikan biaya kampanyenya yang jumlahnya milyaran rupiah itu kalau tidak korupsi dan kolusi.

Apa jadinya pembangunan dan roda pemerintahan di daerah bila para rezimnya menjadi terdakwa korupsi? Mungkin kalau hanya satu dua kepala daerah tak masalah. Tapi kalau lebih dari 50 persen, kepala daerah terpilih kini memegang gelar 'terdakwa korupsi'?

Sebuah data terbaru mengungkapkan, sepanjang tahun 2010 ada 244 pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada). Dari jumlah tersebut, 148 kepala daerah di antaranya terlibat kasus korupsi. Angkanya berarti mencapai 60 persen. Tentu ini bukan angka sembarangan dan tak mungkin hanya faktor pribadi/individu.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengakui, kasus korupsi yang selama ini membelit kepala daerah tak lepas dari besarnya dana kampanye yang digelontorkan saat pemilu kada. Bayangkan, pemerintah sampai harus mengeluarkan uang sebesar Rp 55 trilyun untuk mendanai 244 pemilu kada tersebut. Itu belum termasuk uang yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan kandidat kepala daerah.

Bahkan, salah satu bupati di daerah Jawa Tengah rela mengeluarkan puluhan milyar demi meraih kemenangan dalam pemilu kada. Bupati terpilih Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, bahkan mengakui dalam kampanye pemilu kada lalu ia menghabiskan biaya sekitar Rp 5 milyar – Rp 10 milyar. Dana itu paling besar digunakan untuk tim sukses, pembuatan banner, dan iklan.

Sanggupkah itu ditutupi dari gaji yang mereka peroleh setelah menjabat? Gaji gubernur per bulannya hanya sekitar Rp 9 juta, sedangkan bupati atau walikota sekitar Rp 6 juta. Itu tentu tidak seimbang dengan jumlah pengeluaran mereka sebelum pemilu yang jumlahnya bisa mencapai ratusan milyar untuk pasangan calon gubernur-wakil gubernur. Inilah yang menurut Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) A Tanribali Lamo menjadi penyebab timbulnya tindakan-tindakan tidak terpuji, seperti korupsi.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Suswanta menyatakan, tidak mungkin para kepala daerah terpilih mampu mengembalikan biaya kampanyenya yang jumlahnya milyaran rupiah itu kalau tidak korupsi dan kolusi. “Jadi saya yakin bukan hanya 148 tetapi semuanya melakukan korupsi. Jadi inilah, awal dari cara rekrutmennya saja sudah salah, sudah mendorong orang untuk manipulatif, koruptif, sehingga sangat wajar membuat banyak kepala daerah menjadi tersangka,“ katanya kepada *Media Umat*.

Belum lagi, undang-undang tentang kepala daerah yakni nomor 32 tahun 2004, menurut banyak pihak, menjadi penghambat upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan kepala daerah. Pasal 36 UU itu menyebutkan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah yang diduga melakukan korupsi harus mendapat izin tertulis dari presiden.

Dalam beberapa kasus, kepala daerah tak bisa diselidiki pelanggarannya karena presiden tidak mengeluarkan izin. Kepala daerah ini rata-rata satu partai dengan sang presiden. Dengan benteng izin presiden ini pula ada kepala daerah yang loncat pagar ke kubu partai berkuasa untuk mencari selamat. Anehnya, Presiden SBY yang selalu berjanji akan memberantas korupsi terkesan kurang sigap dalam mengeluarkan izin tersebut.

Bahkan fakta-fakta terbaru kian menyibak adanya korupsi sistemik di tubuh pemerintahan mulai dari level daerah hingga ke pusat. Di tengah gembar-gembor transparansi, justru temuan-temuan tentang korupsi, manipulasi, pungli kian menjadi-jadi.

Kasus-kasus kakap mandeg di tengah jalan. Sebut saja skandal Bank Century, rekening gendut para perwira tinggi Polri, IPO Krakatau Steel, dan kasus Gayus Tambunan serta masih banyak lagi. Semuanya melibatkan penguasa dan aparat birokrasinya.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menilai, dalam kondisi seperti itu, segala usaha pemberantasan korupsi akan menemui jalan buntu karena justru negaralah yang menjadi pelaku korupsinya. Inilah yang disebutnya sebagai *State Corruption* (korupsi negara).

Dalam kondisi seperti ini, para penguasa dan jajaran birokrasinya melakukan korupsi dengan cara mengutak-utik kebijakan dan peraturan. Tindakan yang sebenarnya terkategori korupsi dilegalisasikan sedemikian rupa oleh negara sendiri agar menjadi sesuatu yang legal dan tidak melanggar ketentuan. Perilaku itu, menurut Ismail, muncul sebagai dampak atas penerapan sistem yang cacat yakni kapitalisme-sekuler dengan demokrasinya.

Demokrasi telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Hanya mereka yang beruang atau didukung oleh para pemilik uang (modal) yang akan memenangi pertarungan, baik itu dalam level penguasa, birokrasi, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, uanglah yang berbicara. Kapitalisme-sekuler melahirkan pola hidup hedonistik-materilistik, yang menjadikan uang segala-galanya. Dan rakyat hanya diambil suaranya saat dibutuhkan untuk melanggengkan kejahatan dan kerakusan yang ditamengi dengan peraturan.

Maka, bagaimana korupsi bisa diberantas bila negara dengan penguasa dan aparatnya adalah bagian dari korupsi itu sendiri?[] **mujiyanto**

Mahalnya Demokrasi

Banyak orang berharap demokrasi mampu melahirkan kesejahteraan. Namun apa yang terjadi? Demokrasi justru mahal harganya, jauh dibandingkan dengan yang diperoleh rakyat dari sistem yang dipaksakan tersebut.

Demokrasi telah melahirkan korupsi di mana-mana. Pasalnya, sistem ini 'mengharuskan' mereka yang ingin berkuasa untuk menyediakan biaya politik bagi kekuasaan yang akan diraihnya. Pemilihan secara langsung mewajibkan para kandidat penguasa dan wakil rakyat populer agar dipilih oleh rakyat.

Hanya untuk sebuah kursi, miliaran rupiah dikeluarkan. Menurut informasi, calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota minimal harus menyiapkan dana sebesar Rp 5 milyar. Bahkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur menghabiskan dana kampanye mencapai Rp 1,3 trilyun dalam pemilu kada 2008 lalu. *Wow*, ini tentu jumlah yang sangat besar.

Pemerintah sendiri harus merogoh kas negara. Tahun 2010, negara mengeluarkan dana Rp 55 trilyun bagi 244 daerah yang menyelenggarakan pemilu kada. Bandingkan itu dengan kebijakan pembatasan subsidi BBM tahun 2011 ini gara-gara pemerintah merasa rugi karena menambah subsidi sebesar Rp 7-8 trilyun.

Namun biaya politik yang begitu besar itu tak memperbaiki nasib rakyat. Bahkan impian terciptanya tata pemerintahan yang kian baik pun sekadar khayalan. Justru dengan sistem pemilihan langsung ini koordinasi pemerintahan makin kacau. Karena merasa dipilih langsung oleh rakyat, banyak kepala daerah yang mengabaikan penguasa di atasnya. Suatu ketika Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengundang seluruh bupati dan walikota, yang hadir hanya tiga orang. Hal yang hampir sama terjadi di daerah lain.

Bahkan ada daerah yang sampai berebut wilayah dan aset. Anehnya, pemerintah di atasnya tak berkutik. Bukan tidak mungkin, kondisi ini akan memudahkan negeri ini dipecah belah oleh kekuatan asing dengan mengatasnamakan demokrasi. Ini jauh lebih mahal lagi! [] **mujiyanto**

Solusi Islam Berantas Korupsi

Pemberantasan tak cukup sekadar hukuman tapi penyelesaian yang komprehensif.



Sudah banyak pejabat, birokrat, dan wakil rakyat masuk bui tapi korupsi tak pernah berhenti. Ranking Indonesia pun patut 'dibanggakan' karena selalu berada di puncak untuk kawasan Asia. Kalau toh bergeser, tak jauh dari posisi juara korupsi.

Berdirinya lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak banyak memecahkan persoalan korupsi yang menggurita. Korupsi telah menyelusup sampai ke mana-mana. Banyak pihak terlibat.

Koran Singapura, *The Strait Time*, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai '*the envelope country*', karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada "amplop".

Solusi Islam

Dari sisi niat, memang negara ada kemauan untuk memberantas korupsi. Bahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah membuat ketetapan (Tap) khusus tentang pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sayangnya, implementasinya tidak sungguh-sungguh dan komprehensif.

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) M Ismail Yusanto menjelaskan, Islam mempunyai cara untuk memberantas korupsi ini secara komprehensif. Paling tidak ada enam cara.

Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat negara akan bekerja dengan baik jika gaji dan tunjangan mereka mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Rasul dalam hadits riwayat Abu Dawud berkata, "Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (*ghalin*)".

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar separuh untuk kaum Muslimin dan sisanya untuk orang Yahudi, datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah, "Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum Muslimin tidak memakannya". Mendengar ini, orang Yahudi berkata, "Karena itulah (ketegasan Abdullah) langit dan bumi tegak" (Imam Malik dalam al-Muwatta'). Tentang suap Rasulullah berkata, "Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap" (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, "Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah *suht* (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur" (HR. Imam Ahmad). Nabi sebagaimana tersebut dari hadits riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym. Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena korupsi. Perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Semasa menjadi khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain, diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi dua kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara.

Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan taqwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan takut kepada Allah. Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Kelima, hukuman setimpal. Hukuman berfungsi sebagai pencegah (*zawajir*), sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman *ta'zir* berupa *tasyhir* atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Demi menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, Khalifah Umar di awal pemerintahannya menyatakan, "Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang".

Menurut Ismail, dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, korupsi dapat diatasi secara tuntas.

Paradok

Solusi Islam itu justru ditinggalkan dalam pemberantasan korupsi. Gaji pegawai negara rata-rata tidak layak. Larangan menerima suap dan hadiah hanya di atas kertas. Demikian pula perhitungan kekayaan hanya administratif, tidak ada proses pembuktian terbalik.

Sementara para pemimpin yang ada tidak memberikan keteladanan. Malah banyak yang jadi koruptor. Ini juga karena hukuman bagi koruptor ringan dan tak menjerakan. Sedangkan masyarakat masa bodoh dan sebagian malah terlibat dalam budaya suap.

Paradok inilah yang menjadikan korupsi seolah seperti lingkaran setan. Padahal, sebenarnya pangkal korupsi itu sendiri adalah tidak diterapkannya syariah Islam secara kaffah.[] **humaidi**

Khalifah Umar bin Abdul Aziz Sang Teladan

Ketika baru diangkat menjadi Khalifah, Umar bin Abdul Aziz langsung mengajukan pilihan kepada istrinya yakni mengembalikan harta yang dimilikinya kepada negara atau tetap menjadi istrinya. Sang istri memilih mengembalikan emas dan permata yang dulu didapatkan dari keluarga besarnya kepada negara.

Setelah itu Khalifah Umar mengambil kebijakan merampas kembali harta-harta yang disalahgunakan oleh keluarga khalifah dan mengembalikannya ke Baitulmal. Selain itu, ia memecat pegawai-pegawai yang tidak cakap, menyalahgunakan kekuasaan dan pegawai yang tidak layak yang dilantik atas pengaruh keluarga khalifah sebelumnya.

Saat itu Khalifah Umar sangat memperhatikan kehidupan rakyat miskin. Ia menaikkan pendapatan rakyat miskin ini sehingga hampir menyamai pendapatan para pegawai khilafah. Khalifah sendiri hidup sederhana. Makanannya sama dengan makanan masyarakat biasa, hanya roti dan sedikit garam.

Kebijakan dan gaya hidup Khalifah Umar ini mampu menjadikan kekhalifahan yang dipimpinnya berubah total dalam waktu sekitar dua tahun. Rakyat sejahtera. Sampai-sampai tak ada lagi yang berhak menerima zakat.[] **emje**



Inu Kencana Syafii,
Mantan Dosen IPDN

Negara Jahat

Budaya korupsi tak pernah berhenti meski sudah ada reformasi. Janji pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi tinggal sekadar janji. Korupsi berlangsung dari level bawah hingga ke atas. Mengapa ini terus terjadi? Berikut wawancara wartawan Tabloid Media Umat, Joko Prasetyo, dengan mantan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Inu Kencana Syafii yang dikenal sangat vokal.

Mengapa parpol mengusung calon kepala daerah yang bermasalah, diberi gizi oleh koruptor?

Itu sudah pasti! Karena parpol sekarang adalah peminta uang. Bahkan partai yang mengidolakan agama apalagi yang menyatakan diri parpol sekuler itu semua minta uang. Orang yang terbiasa menyogok adalah orang yang hidupnya dalam sogok menyogok.

Yang paling enak disogok adalah partai. Karena partai adalah kendaraan menuju pilkada. Jadi sudah terbentuk siklus lingkaran setan. Untuk itu Allah tidak hanya memberikan musibah berupa bencana alam tetapi juga dengan jatuhnya nilai rupiah.

Makanya masyarakat harus berbuat sesuatu. Tetapi kalau kita tidak berbuat ya, hancur musnah.

Tidak sepenuhnya kesalahan parpol, kan rakyatnya juga memilih kepala daerah bermasalah. Karena menerima serangan fajar?

Ya, rakyat materialistik. Mereka maunya yang indah-indah bicara tentang surga, tetapi bicara tentang jihad itu hilang. Beberapa kali saya khutbah Jumat yang keras, langsung dicoret nama saya. Jadi jangankan rakyat, petugas DKM-nya saja itu mencoret khutbah yang vokal.

Ini bukti keberhasilan cara berpikir hedonistik dan materialistik sehingga masyarakat cuma berpikir wah, "yang penting saya dapat uang," Ada janji-janji sedikit dari pemimpin, dia tidak peduli orang itu mau korupsi atau tidak.

Jadi dengan dibagi-bagi oleh orang yang dapat uang dari korupsi itu, masyarakat sudah memilih dia. Jadi masyarakat juga bersalah, kadang-kadang kita ada yang berpikir pemerintah yang tidak bertanggung jawab, sekarang juga ada masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Itulah sebabnya tuhannya adalah uang, kemudian Allah SWT memberikan musibah, itu dianggap oleh orang-orang sekuler adalah mistik. Sebetulnya tidak, karena cara berpikirnya itu materi , dia tidak peduli peserta pemilu pilkada itu dapat uang dari korupsi juga tidak peduli, rakyat juga salah. Jadi itu cara berpikir yang keliru di tengah masyarakat .

Jadi kaum agama yang dipimpin oleh ulama, kaum pelajar yang dipimpin oleh para dosen, itu terkontaminasi semua. Untuk mengubah itu biasanya negara harus ambruk dulu nanti Tuhan akan mempersiapkan... tetapi jangan *nunggu* Tuhan mempersiapkan, kita harus usahakan.

Bila pemerintah melantik terdakwa korupsi menjadi kepala daerah, apakah itu tidak melukai melukai rasa bermoral atau beragama?

Oh, sangat melukai. Soalnya yang melantik itu siapa? Moralnya bagaimana? Menterinya siapa, dan presiden yang terpilih siapa? Jadi kalau yang melantik itu para nabi utusan Tuhan pasti koruptor tidak akan dilantik.

Tapi yang melantiknya ini kan oleh orang yang di atas saya, saya dipecat itu oleh spesialis tukang lantik, namanya Mendagri. Dia juga terbentuk dari cara seperti itu. Tentu dia melantik juga supaya terbentuk kelompok-kelompok mereka.

Walaupun menterinya ganti?

Penggantinya siapa? Presidennya siapa? Selama ini adalah kebohongan publik kepada masyarakat. Janji-janji dan sumpah-sumpah begitu, dipikir tidak ada Tuhan yang Maha Menyaksikan apa?

Jadi sumpah itu suatu kebohongan supaya kelihatan hebat, sehari-harinya kita bisa lihat. Seperti keadaan sekarang ini tidak bisa *nangkep* di atasnya Gayus, Gayus jalan-jalan, hanya karena takut partai atau orang yang mau dikejar itu, adalah orang yang mau membongkar kasus yang ada dipersoalkan di DPR, skandal Century misalnya. Artinya perkelahian para pemimpin itu adalah penjahat lawan penjahat, ya kita yang hancur.

Saat ini keadaan sedang rawan, dengan terbongkarnya Gayus jalan-jalan. Lalu kita lihat sudah lebih dari 60 persen kepala daerah tersangkut korupsi. Jelas ini semua membuat nilai tukar rupiah menjadi hancur alias inflasi. Inflasi itu musibah. Dikorbankanlah petani cabe, lalu dimasukkan harga beras, padahal petani sudah kejebak ijon. Jadi kejahatan penguasa ini menelan korban rakyatnya sendiri.

Itu semua karena korupsi?

Itu semua akibat mata uang tidak bernilai. Mata uang tidak bernilai karena korupsi. Negara lain tidak hormat kepada nilai rupiah. Yang kita anggap aset ke luar negeri malah babu, malah sudah sampai kepada tingkat perbudakan. Tidak akan penguasa negeri ini membela, paling-paling hanya pura-pura membela.

Kenapa?

Karena Indonesia tidak berharga di luar negeri. Istilah jamrud di timur jauh itu sudah tidak ada, yang ada adalah negara koruptor, negara babu, dan juga disebut negara pura-pura baik. Jadi memang negara ini memiliki dua kepribadian, alias *bi-adab*, biadab jadinya! Itulah tiga penyakit yang membuat nilai rupiah turun.

Kalau kasus pelantikan Walikota Tomohon terpilih, orang yang sedang dipenjara dilantik dan melantik meskipun akhirnya dicabut kembali pelantikannya itu, menunjukkan apa?

Ini menunjukkan kesalahan ada pada mendagri. Coba bayangkan ya. Saya dipanggil ke Jakarta untuk dilantik, tidak diperlihatkan jadi apa, ditutup. Begitu saya dilantik menjadi eselon tiga, artinya adalah saya harus pensiun hari itu juga.

Lalu ketika ditanya oleh wartawan mereka jawab, "Iho kamikan melantik Pak Inu," tapi mengapa melantiknya menjadi eselon tiga? Ya *enggak* tahu, yang jelas hari itu juga saya jadi pensiun. Jadi membuat kebohongan publiknya itu dengan manis. Padahal kan targetnya itu saya dipecat, dengan cara saya dilantik menjadi eselon tiga.

Supaya saya tidak sadar, ditutup. Pelantikan model apa kok ditutup? Tetapi polisi yang mengawal saya mengatakan, "dari pada Anda mati, tetapi kami butuh Anda hidup, Anda tanda tangan saja dulu, Anda terjebak, dan habis itu Anda dipecat."

Itulah kelakuan Kemendagri dan eselon-eselon satu hadir waktu pelantikan saya dan hari itu juga saya dipecat. Artinya, mendagri bersama seluruh dirjennya, irjennya, dan kepala humasnya itu sudah menjadi sebuah organisasi kejahatan. Karena telah melakukan kebohongan publik.

Jadi sekarang ini susah mempercayai orang kecuali mempercayai orang-orang yang berani mati membela kebenaran. Sedangkan mencari orang yang membela kebenaran sekarang ini semakin susah.

Saya berharap setelah ini akan ada revolusi, tentu saja tidak dengan berdarah-darah dong. Karena saat ini semakin banyak rakyat yang lapar, petani disuruh bersaing dengan beras impor, warteg mau dipajaki, tetapi yang kelas kakap dibiarkan berkeliaran. Jadi peduli kepada rakyat hanyalah omong kosong saat kampanye saja.

Anda selalu mengatakan Kemendagri itu bobrok, apa indikasinya?

Pertama, pemecatan saya. *Kedua,* merestui pelantikan kepala daerah yang bermasalah. *Ketiga,* kasus IPDN. Itu yang mengedarkan narkoba siapa? Darimana datangnya narkoba? Anak siapa yang narkoba? Anak staf ahli menteri kan? Itu semua yang saya bongkar dalam IPDN *Undercover* itu. Bahkan buku keduanya, Depdagri *Undercover* tidak terbit akhirnya.

Dalam Depdagri Undercover itu apa yang Anda ungkap?

Strategi depdagri dalam memusnahkan orang dan memuluskan jalan dalam menerobos ketidakmungkinan-ketidakmungkinan, mau halal mau haram masa bodoh. Tujuannya uang, agar proyek jalan terus. Uanglah jadi tuhannya.

Kalau melihat kondisinya parpol, konstituen, dan pemerintahnya begitu, wajar dong bila negara ini diberi gelar Republik Koruptor?

Kan memang sudah ada penelitiannya. Untuk Asia sudah juara satu![]

Hafidz Abdurrahman,
Ketua Lajnah Tsaqafiyyah DPP HTI

Islam Sanggup Berangus Koruptor

Berbagai cara untuk pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan bukannya meminimalkan tindak korupsi tetapi malah perbuatan kriminal tersebut semakin merajalela. Itu artinya, cara yang lain, selain Islam terbukti gagal. Lantas, bagaimana cara Islam memberantas korupsi? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan Tabloid Media Umat Joko Prasetyo dengan Ketua Lajnah Tsaqafiyyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Hafidz Abdurrahman. Berikut petikannya.

Islam mengategorikan korupsi itu sebagai perbuatan apa?

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa korupsi adalah tindakan kriminal. Hanya saja, apakah korupsi ini termasuk kategori mencuri, dalam pengertian syariah, atau tidak? Dalam hal ini, kami berpendapat, bahwa korupsi tidak termasuk mencuri menurut definisi syariah, sehingga tangan pelakunya harus dipotong. Karena Nabi menyatakan, "Bagi orang yang berkhianat (menyalahgunakan wewenang) dan koruptor tidak ada keharusan tangannya dipotong."

Bagaimana Islam mencegah aparatur negara melakukan tindakan korupsi?

Pertama, negara Khilafah memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya, dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, skunder hingga tersier mereka.

Kedua, dalam pengangkatan aparaturnya, khilafah menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Dengan begitu, mereka memiliki *self control* yang kuat.

Ketiga, untuk mengetahui, apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, khilafah juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka khilafah bisa merampasnya.

Keempat, khilafah juga menetapkan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati. Inilah cara yang dilakukan oleh Islam untuk mencegah korupsi.

Contoh kongkretnya?

Khalifah Umar bin Khatthab pernah membuat kebijakan, agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih positif, setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk merampasnya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Berdasarkan laporannya, Umar kemudian membagi kekayaan Abu Hurairah (Gubenur Bahrain), Amru bin Ash (Gubenur Mesir), Nu'man bin Adi (Gubenur Mesan), Nafi' bin Amr al-Khuzai (Gubenur Makkah), dan lain-lain. Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik kepentingan.

Sanksi apa yang diberikan kepada aparatur yang melakukan korupsi?

Karena korupsi ini tidak termasuk mencuri dalam pengertian syariah, maka kejahatan ini tidak termasuk dalam ketegori *hudud*. Tetapi, masuk dalam wilayah *ta'zir*, yaitu kejahatan yang sanksinya diserahkan kepada ijtihad hakim. Sanksinya seperti yang tadi disebut, bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.

Bolehkan tersangka korupsi dilantik menjadi kepala daerah?

Tidak boleh.

Mengapa?

Karena begitu orang dinyatakan sebagai tersangka lantaran kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya dia telah kehilangan salah satu kriteria yang menjadikannya layak sebagai pejabat, yaitu adil, tidak fasik.

Fasik adalah orang yang melakukan kejahatan dengan terang-terangan, dan tidak mempunyai rasa malu. Dengan maraknya korupsi di negeri ini, maka praktik korupsi pun dilakukukan dari atas hingga ke bawah tanpa malu.

Di mana-mana ada korupsi. Bahkan, lebih tragis lagi, karena praktik korupsi kemudian dilegalkan oleh negara. Karena itu, para koruptor ini sebenarnya merupakan orang-orang fasik, yang tidak layak menjadi pejabat publik.

Mengapa Anda selalu mengatakan, berantas korupsi dengan syariah dan Khilafah? Bukankah cara lain ada yang efektif untuk memberantas korupsi?

Kalau tidak dengan syariah dengan cara apa? Bukankah cara-cara pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan telah berjalan, tetapi nyatanya korupsi justru semakin marak dan merajalela di mana-mana. Itu artinya, cara yang lain, selain Islam terbukti gagal.

Mengapa gagal, karena pondasinya rapuh. Berbeda dengan Islam yang dibangun berdasarkan akidah Islam dan ketakwaan kepada Allah. Faktor akidah dan ketakwaan kepada Allah ini terbukti telah membentuk *self control*, yang menjadikan para pejabat tidak bisa disuap.

Jika mereka mendapatkan apa yang bukan menjadi hak mereka, segera mereka serahkan kepada negara. Meski tak seorang pun mengawasi mereka. Karena ada Allah yang Maha Melihat dan Mendengarkan tingkah laku mereka.

Kalau begitu, bagaimana ke depannya agar syariah menjadi hukum positif?

Untuk bisa menerapkan syariah, dibutuhkan kelompok yang terus-menerus memperjuangkannya. Kelompok ini harus mempunyai gambaran yang utuh dan jernih tentang syariah yang hendak diterapkan. Jika tidak, maka dia akan gagal.

Setelah gambaran yang utuh tersebut ada, maka gambaran tersebut disosialisasikan kepada masyarakat. Baik melalui dakwah, kampanye maupun propaganda. Ketika dukungan untuknya telah meluas, dan menjadi tuntutan umat, maka yang dibutuhkan tinggal satu, yaitu adanya kekuatan fisik (militer) yang memberikan dukungan terhadap penerapan syariah Islam ini.

Inilah satu-satunya cara dan metode yang benar, yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu, HTI tidak akan menempuh cara-cara lain, selain cara dan metode Rasul tadi termasuk.

Adapun *musyarakah* atau bergabung dengan sistem kufur itu tidak sesuai dengan cara dan metode Nabi, juga tidak pernah terbukti berhasil menjadikan Islam berdaulat, dan dengannya Khilafah tegak. Tidak ada.

Jadi, bagaimana agar Khilafah tegak kembali? Bisa dijelaskan?

Caranya, harus mengikuti cara dan metode Rasul secara konsisten. Tidak boleh melanggar sedikitpun, *hatta* selangkah semut sekalipun. Metode itu dimulai dengan proses edukasi, atau dalam bahasa HTI disebut *tasqif.*

Edukasi ini bertujuan untuk menyamakan visi, misi, tujuan dan langkah perjuangan. Di dalamnya, *master plan* yang hendak diwujudkan disampaikan. Demikian juga dengan *road map*-nya. Setelah proses ini berjalan dengan matang, maka langkah berikutnya adalah sosialisasi. Inilah yang disebut dengan *tafa'ul ma'a al-ummah*.

Tujuannya, agar orang lain mengemban apa yang diemban oleh HT, dan mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama. Setelah itu, baru menerapkan Islam dalam naungan Khilafah, setelah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang mempunyai kekuatan.

Itulah ketiga langkah praktis yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan wajib kita lakukan ketika kita hendak menegakkan kembali Khilafah.[]

Mereka Bicara
Korupsi di Negeri Ini



Abdullah Dahlan,
Peneliti Div Korupsi Politik ICW

Mendagri Lalai

Pelantikan terdakwa korupsi dana APBD 2006-2008 menjadi Walikota Tomohon setidaknya menunjukkan beberapa hal. *Pertama,* Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah sendiri memang masih memberikan peluang bagi koruptor untuk ikut terlibat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Kedua, partai politik pengusung pun rendah komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi. Jangankan terdakwa, baru jadi tersangka saja sebetulnya bagi ICW itu masalah yang besar. Namun rupanya tersangka ataupun terdakwa tidak dianggap sesuatu yang buruk bagi parpol. Itu terjadi karena parpol lebih melihat kepada kalkulasi pragmatis saja, bukan kompetensi dari figur yang diusung.

Ketiga, ini berimplikasi bagi beban moral birokrasi. Contoh kasus saja Kota Tomohon dengan kepala daerah yang berstatus tahanan KPK sebagai terdakwa korupsi, jelas bakal menjadi beban birokrasi. Karena citra diawalnya saja sudah buruk, jadi berat untuk membangun citra pemerintahan daerah yang bersih.

Keempat, mendagri melakukan pembiaran terhadap hal semacam ini. Semestinya ketika seseorang sudah masuk ke dalam proses hukum dan menjadi terdakwa (dalam UU Otonomi Daerah No 32/2004 kan disebutkan kalau sudah menjadi terdakwa, kepala daerah itu harus sudah nonaktif. Jadi kalau sudah jadi kepala daerah saja harus dinonaktifkan, apalagi belum dilantik, *lha kok* malah dilantik?

Menurut kita mendagri melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsinya meskipun ia beralasan status Walikota Tomohon terpilih masih belum *incracht* (berketetapan hukum tetap). Kalau memang Mendagri menganggap tidak ada aturan yang melarang terdakwa dilantik jadi kepada daerah, ia bisa menggunakan diskresi (kebijakannya sebagai pejabat yang berwenang) untuk tidak melantiknya.

Tidak bisa juga dijadikan alasan agar status Wakil Walikota Terpilih menjadi jelas, sehingga bila ternyata *incracht,* sang wakil memimpin Tomohon hingga masa jabatannya selesai. Mengapa tidak bisa? Karena kita ini menganut pilkada satu paket, bila salah satu pasangannya menjadi terdakwa, ya kedua-duanya tidak boleh dilantik. Perpanjang saja Plt (pelaksana tugas) walikotanya, hingga proses hukum ini *incracht*.

Nah, di sinilah perlunya pengetatan persyaratan calon kepala daerah.[]



Djohermansyah Djohan,
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri

Gunakan Dana APBD Secara Ilegal

Otonomi daerah *sih* tidak memproduksi koruptor. Yang jadi masalah adalah sistem rekrutmen kepala daerahnya itu. Sistem rekrutmennya saat ini kan melalui pilkada langsung oleh rakyat. Untuk itu *kan* dibutuhkan dana yang besar untuk kampanye dan ongkos-ongkosnya. Dana itu dari mana asalnya?

Kalau dalam model demokrasi yang sudah matang, dana itu dari dana publik berupa sumbangan dari masyarakat sendiri. Masyarakat akan menyumbang secara sukarela baik ratusan ribu, puluhan, bahkan recehan kepada kandidat yang mereka cintai, *soft money* disebutnya. Ada juga sumbangan dari orang-orang kaya, pengusaha yang mempunyai perusahaan, sehingga sumbangannya lebih besar lagi, puluhan juta, seratus juta, dan seterusnya, *hard money* disebutnya.

Tetapi yang terjadi di negara kita pengumpulan dana dari publik itu tidak jalan. Lalu dari mana mereka dapat uang? Uangnya didapat dari kantongnya sendiri ditambah dana dari sponsor-sponsor, cukong-cukong. Begitu seseorang memenangkan pilkada, maka para cukong dan sponsor ini menagih dananya untuk dikembalikan. Bagaimana cara mengembalikan? Maka kepala daerah terpilih ini akan menggunakan dana APBD secara ilegal untuk membayarnya. Menggunakan dana APBD secara ilegal itulah yang disebut sebagai tindak pidana korupsi. Maka terjebaklah para kepala daerah kita ke dalam kasus-kasus korupsi. Melibatkan 148 bupati dan walikota. Ada 17 gubernur.

Itulah akar masalahnya. Jadi bukan karena otonomi daerahnya. Oleh karena itu solusinya adalah mengubah pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung dengan cara kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD.[]



Yos Mardin,
Pengamat Pemerintahan

Banyak Ruang Abu-Abu

Ya memang, dalam undang-undang, tersangkut tidaknya dengan tindak pidana korupsi itu tidak jadi persyaratan boleh tidaknya menjadi calon kepala daerah. Dan juga ketika KPU melakukan seleksi, yang ada itu hanya bila si terdakwa terkait tuntutan lima tahun penjara ke atas, itu baru bisa digugurkan pencalonannya.

Itu menunjukkan apa? Secara normatif memang UU yang berlaku saat ini tidak menjangkau hal-hal yang bersifat moral. Jadi soal narkoba, berzina, atau tidak baik dengan tetangganya itu tidak dijadikan kriteria boleh tidaknya seseorang menjadi kepala daerah. Dalihnya, seharusnya partailah yang melakukan seleksi moralitas tersebut. Tapi karena partainya juga penuh dengan politik uang sehingga soal moral itu terabaikan.

Sehingga, wajar saja banyak lolos orang-orang yang melakukan korupsi itu. Apalagi terindikasi bahwa setiap pilkada itu memang penuh dengan politik uang. Akibatnya, orang yang paling banyak dapat mengakses uang, baik dengan cara halal ataupun haram, maka akan berpeluang paling besar menang, karena akan lebih banyak lagi membagikan uang kepada penduduk yang tidak cerdas dan dalam kondisi miskin. Ingat uang Rp 20.000-50.000 itu sangat berarti bagi masyarakat semacam itu, sehingga kemungkinan lolosnya para koruptor terpilih kembali menjadi kepala daerah semakin besar.

Terkait dengan pelantikan Si Jefferson jadi Walikota Tomohon itu sebetulnya tidak harus terjadi, karena seharusnya pemerintah melakukan peninjauan ulang UU terkait yang tidak dapat menyentuh hal-hal yang tidak bermoral itu. Tetapi kan pemerintah tidak melakukan itu, Jonson tetap dilantik, nanti dicabut kembali pelantikan itu. Ini *kan* aneh. Bolak-balik, bolak-balik.

Ini berbahaya, karena nantinya, apa status orang di bawahnya yang dilantik Si Jonson? Nanti mereka akan berkelahi dengan pejabat sebelumnya karena sebelum dicabut kembali pelantikannya, Jonson telah melantik aparatur di bawahnya.

Di dalam proses politik pembuatan UU dan pencalonan kepala daerah memang dibuat banyak ruang yang abu-abu. Misalnya saja di dalam pembuatan UU Pemilu, ada pasal yang menjadi tarik menarik kriteria partai seperti apa yang dapat lolos. Contoh lainnya, tidak boleh menjabat kepala daerah dua kali. Maka orang yang sudah dua kali jadi kepala daerah akan mencalonkan diri lagi tetapi menjadi wakil dan seterusnya.[] **joko prasetyo**



Suswanta Abu Alya,
Kepala Jurusan Ilmu Politik UMY

Semuanya Korupsi, Sistem Rusak!

Memang 148 dari 244 dari kepala daerah yang terpilih pada 2010 menjadi tersangka korupsi. Tapi bukan berarti sisanya itu tidak korupsi. Sangat besar kemungkinannya mereka mampu menghilangkan barang bukti atau memang sengaja diselamatkan. Karena secara faktual sistem perekrutan kepala daerah yang berlaku sekarang ini rawan tindak korupsi.

Dalam 244 pilkada itu APBN yang dianggarkan sangat besar, Rp 55 trilyun. Belum lagi dana yang dikeluarkan oleh masing-masing calon. Untuk calon gubernur, kalau ingin menang harus mengeluarkan uang antara Rp 100-200 milyar. Ini tergantung daerahnya, kalau DKI itu bisa sampai Rp 500 milyar. Sedangkan calon bupati dan walikota Rp 3-10 milyar.

Padahal kalau kita lihat gaji gubernur itu hanya Rp 9 juta per bulan. Berarti selama menjabat 5 tahun hanya Rp 540 juta. Pertanyaannya kemudian dari mana dia bisa mengembalikan modal awal yang Rp 100-500 milyar itu kalau tidak dengan cara korupsi? Kalau tidak dengan cara kolusi dengan pengusaha? Begitu juga dengan bupati, gajinya hanya Rp 6 juta per bulan atau 360 juta selama menjabat lima tahun. Lantas bagaimana cara dia mengembalikan uang yang sebanyak Rp 3-10 milyar itu kalau bukan dengan cara korupsi dan kolusi? Jadi saya yakin bukan hanya 148 tetapi semuanya melakukan korupsi. Jadi inilah, awal dari cara rekrutmennya saja sudah salah, sudah mendorong orang untuk manipulatif, koruptif, sehingga sangat wajar membuat banyak kepala daerah menjadi tersangka.

Pelantikan Walikota Tomohon Terpilih itu menunjukkan yang bermasalah itu ternyata bukan saja lembaga yudikatif tetapi eksekutifnya juga amburadul. Inilah fakta bahwa asumsi-asumsi demokrasi bahwa dengan pemilukada akan terpilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang prorakyat itu sama sekali tidak terbukti. Yang terjadi adalah pemimpin yang koruplah yang terpilih. Sebetulnya ini *kan* menciderai nurani semua orang.

Untuk menjadi pegawai apapun, entah itu PNS, pegawai swasta atau bahkan menjadi mahasiswa, syaratnya kan harus punya surat kelakuan baik. Nah ini, bagaimana mungkin seorang kepala daerah bukan saja sudah terbukti tetapi sudah dipenjara ... Hmm... inilah bukti kesalahan, bukan saja orang tetapi juga sistemnya.[] **joy**



Perniagaan yang Menggiurkan

Oleh: **Rokhmat S. Labib, M.E.I.**

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Adn. Itulah keberuntungan yang besar. (TQS al-Shaff [61]: 10-12).

Hidup di dunia ini laksana perniagaan. Hasilnya akan dituai di akhirat. Ada yang untung, ada pula yang buntung. Ada yang berbahagia karenanya, sebaliknya ada pula menderita selama-lamanya. Ayat ini memberikan tawaran kepada kita mengenai sebuah perniagaan dengan keuntungan berlipat-lipat. Tak ada yang mampu menandinginya.



Keuntungannya: Menyelamatkan dari Siksa

Allah SWT berfirman: *Yâ ayyuhâ al-ladzîna âmanû hal adullukum 'alâ tijârah* (hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan). *Khithâb* (seruan) ayat ini ditujukan kepada kaum Mukmin. Mereka ditawari sebuah *tijârah*. Menurut Fakhruddin al-Razi, kata *al-tijârah* berarti *mu'âwadhah al-syay' bi al-syay'* (pertukaran sesuatu dengan sesuatu lainnya); sebagaimana *al-tijârah* dapat menyelamatkan pelakunya dari ujian kemiskinan.

Sekalipun dalam *tijârah* meniscayakan keuntungan atau kerugian, akan tetapi bayangan keuntungan –apalagi keuntungan yang berlimpah— dapat menggugah manusia untuk mengejarnya. Sebagaimana dijelaskan al-Biqa'i dan Ali al-Shabuni, bentuk *istifhâm* (kalimat tanya) di sini bermakna sebagai *al-tasywîq* (menumbuhkan ketertarikan).

Tawaran perniagaan itu menjadi lebih menggiurkan karena berasal dari Allah SWT. Tentulah perniagaan yang ditawarkan bukan perniagaan biasa dengan keuntungannya biasa. Ini adalah perniagaan yang melibatkan antara hamba yang dhaif dengan Dzat yang memiliki seluruh alam semesta raya. Maka bisa dipastikan, keuntungan yang bakal didapat sungguh luar biasa.

Kesimpulan itu kian dikokohkan dengan frase berikutnya: *tunjîkum min 'adzâb alîm* (yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?). Fitrah manusia, tidak mau ditimpa dengan sesuatu yang menyakitkan. Oleh karena itu, keuntungan perniagaan berupa terselamatkannya manusia dari azab yang merupakan tawaran yang amat menggiurkan. Meskipun demikian, tawaran tersebut hanya menarik bagi orang-orang yang meyakini dahsyatnya siksa akhirat. Sebagaimana dijelaskan al-Alusi dalam tafsirnya, azab yang pedih yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah azab di hari kiamat. Dalam Alquran amat banyak ayat memberitakan dahsyatnya siksa neraka; jauh melebihi siksa apa pun di dunia ini (lihat QS al-Fajr [89]: 25). Dengan demikian, tawaran 'perniagaan' ayat ini akan menggugah semangat yang besar bagi kaum Mukmin.

Beriman dan Berjihad

Kemudian dijelaskan mengenai *tijârah* tersebut. *Pertama*: *Tu'minûna bil-Lâh wa Rasûlihi* ([yaitu] kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya). Secara syar'i, *îmân* adalah *al-tashdîq al-jâzim al-muthâbiq li al-wâqi'* (pembenaran yang pasti, sesuai dengan fakta, bersumber dari dalil). Kendati perkara yang diimani hanya disebutkan dua perkara: Allah SWT dan rasul-Nya, bukan berarti boleh mengingkari perkara keimanan lainnya. Sebab, beriman terhadap sebagian dan ingkar terhadap sebagian lainnya mengantarkan pelakunya terkategori sebagai kafir dan mendapatkan azab yang menghinakan (lihat QS al-Nisa' [4]: 150-151). Oleh karena itu, keimanan yang menyelamatkan pelakunya dari siksa adalah keimanan yang benar dan total.

Perlu ditandaskan, keimanan ini menjadi modal dasar untuk mendapatkan pahala. Jika modal dasar ini tidak dimiliki maka semua amalnya tidak diterima, terhapus, dan sia-sia. Inilah yang dialami kaum kafir (lihat QS al-Baqarah [2]: 217, Ali Imran [3]: 21-22, al-Maidah [5]: 5, al-An'am [6]: 88).

Kedua: *Watujâhidûna fî sabîlil-Lâh bi amwâlikum wa anfusikum* (dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu). Secara syar'i, kata *al-jihâd* berarti *al-qitâl fî sabîlil-Lâh* (berperang di jalan Allah). Keimanan yang merupakan keyakinan dalam hati memerlukan bukti dalam bentuk perbuatan. Banyak ayat yang menggandengkan antara keimanan dengan amal shalih sebagai persyaratan bagi setiap orang selamat di dunia dan akhirat. Dalam beberapa ayat disebutkan beberapa jenis amal shalih, seperti mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian harta (lihat QS al-Baqarah [2]: 3). Penyebutan secara khusus pada amal shalih tertentu menunjukkan keistimewaan amal shalih itu.

Dalam ayat ini amal yang disebutkan mengiringi keimanan adalah jihad dengan harta dan jiwa. Ini juga menunjukkan keistimewaan amal tersebut. Cukup banyak ayat yang memberitakan keutamaan jihad dan pelakunya (lihat QS al-Baqarah [2]: 154, Ali Imran [3]: 142, al-Taubah [9]: 20). Rasulullah SAW bersabda: *Kedua kaki seorang hamba yang berdebu fi sabilillah tidak akan disentuh oleh api neraka.* (HR al-Bukhari dari Abdurrahman bin Jabr ra).

Kemudian ditegaskan: *Dzâlikum khayr lakum in kuntum ta'lamûn* (itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui). Diterangkan al-Alusi dan al-Syaukani, kata *Dzâlikum* merujuk kepada dua perkara yang telah disebutkan, yakni: iman dan jihad. Jika kalian termasuk orang yang mengetahuinya, tentu itu lebih baik bagi kalian.

Keuntungan Lain

Setelah dijelaskan mengenai perniagaan yang ditawarkan, Allah SWT berfirman: *yaghfir lakum dzunûbakum* (niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu). Menurut al-Alusi dan al-Syaukani, kalimat ini merupakan *jawâb li al-amr* pada ayat sebelumnya. Sebab, dua bentuk *mudhâri'* dalam ayat tersebut memberikan makna perintah: *âminû wa jâhidû* (beriman dan berjihadlah). Artinya, apabila dua perkara itu ditunaikan, yakni: iman dan jihad, maka mereka berhak mendapatkan ampunan dari-Nya. Konsekuensinya, mereka tidak mendapatkan siksa-Nya atas dosa tersebut.

Selain itu, juga: *wayudkhilkum jannât tajrî min tahtihâ al-anhâr* (dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai). Allah SWT menjanjikan kepada pelakunya surga. Sebuah kenikmatan tiada tara. Di dalamnya mereka memperoleh apa saja yang mereka minta (lihat QS Yasin [36]: 57). Berkaitan dengan dekatnya jihad dengan surga, Rasulullah SAW bersabda: *Ketahuilah oleh kalian bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang* (HR al-Bukhari).

Dijanjikan pula: *wamasâkin thayyibah fî jannât 'adn* (dan [memasukkan kamu] ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn). Ini merupakan salah satu jenis kenikmatan di akhirat kelak. Menjadi penghuni sebuah tempat tinggal yang baik di kawasan yang baik, yakni surga 'Adn.

Kemudian ditegaskan: *Dzâlika al-fawz al-'azhîm* (itulah keberuntungan yang besar). Bahwa semua pemberian Allah SWT itu merupakan kemenangan yang besar. Meskipun demikian, semuanya akan diterima di akhirat. Allah SWT pun masih menambah lagi dengan keberuntungan di dunia. Seseuatu yang disenangi manusia sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya: *Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat* (TQS al-Shaff [61]: 13).

Benar-benar tawaran perniagaan yang amat menggiurkan. Siapa yang masih belum tertarik? ***Wal-Lâh a'lam bi al-shawâb.***[]

Ikhtisar:

1. Iman dan jihad merupakan 'perniagaan' dengan keutungan menggiurkan.
2. Keuntungan tersebut berupa: (1) diselamatkan dari neraka; (2) diampuni dosa-dosanya; (3) dimasukkan ke dalam surga; (4) menghuni tempat tinggal di surga; (5) pertolongan Allah; dan (6) kemenangan yang dekat.



Berbohong Demi Citra

Statistik kemiskinan diutak-atik agar penguasa tampak berprestasi. Ini bukan dusta pertama soal kemiskinan.

Awal 2011, pemerintah dengan bangga membeberkan data statistik yang menunjukkan prestasinya selama berkuasa. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sepanjang 2010 pemerintah telah mengentaskan penduduk miskin sebanyak 1,5 juta jiwa. Itu artinya, kemiskinan ditekan dari 14,1 persen menjadi 13,3 persen atau sekitar 31,02 juta jiwa.

Namun, menurut sejumlah tokoh dan pemuka agama, klaim penguasa itu tak sesuai fakta.

"Faktanya, jika digunakan pendekatan penduduk yang layak menerima beras untuk rakyat miskin (Raskin), maka pada tahun 2010 jumlah penerima Raskin mencapai 70 juta orang. Dan jika dilihat dari data penduduk yang berhak menerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas), jumlah warga miskin di Indonesia malah mencapai 76,4 juta jiwa," papar Yudi Latif saat membacakan "Daftar 18 Kebohongan Rezim SBY" di Aula PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Senin (10/1/2011).

Dalam acara tersebut, Yudi didampingi sejumlah tokoh LSM lain seperti Maemunah, Halid Muhammad, Ray Rangkuti, dan Tama S Langkun.

Barisan aktivis senior pun turut menyuarakan kritik tersebut yang dikemas dalam "Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan" di tempat dan waktu yang sama. Mereka terdiri Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Pendeta D Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suzeno, dan Romo Benny Susetyo.

Menurut para aktivis, statistik angka kemiskinan merupakan kebohongan yang paling telanjang. "Bahkan kalau kita menggunakan standar garis kemiskinan Bank Dunia, maka rakyat miskin kita lebih dari 100 juta jiwa," ujar Syafii Maarif dalam dialog di MetroTV melawan staf ahli Presiden.

Bukan sekali ini angka kemiskinan diutak-atik untuk memoles citra penguasa. Pada pidato kenegaraan Pengantar RAPBN 2007 di depan Sidang Paripurna DPR, Rabu (16/8/2007), Presiden SBY mengklaim telah mengurangi kemiskinan dari 23,4 persen menjadi 16 persen. Demikian pula angka pengangguran menurun dari 11,2 persen dari angkatan kerja menjadi 10,4 persen.

Tapi setelah digeledah, ternyata penurunan angka pengangguran sebesar 0,8 persen itu terjadi dalam kurun November 2005 sampai Pebruari 2006. Sedang penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7,4 persen, terjadi pada kurun 1999-2005. Padahal, saat menyampaikan pidatonya, SBY baru memerintah kurang dari 2 tahun.

Dengan batas kemiskinan sangat rendah, tingkat kemiskinan yang disajikan BPS (Badan Pusat Statistik) memang tak terlalu mencolok.

BPS menggunakan UMR (Upah Minimum Rata-rata) sebagai tolok ukur kemiskinan. Parameter ini dimulai tahun 1976, dengan UMR Rp 4.522/KK/bulan buat orang kota dan Rp 2.899/KK /bulan untuk orang desa.

Tapi bila menggunakan tolok ukur Bank Dunia yaitu pendapatan maksimal $ 2/kapita/hari, maka tingkat kemiskinan Indonesia bakal jeblok *tak ketulungan*.

BPS juga tidak konsisten dengan perhitungan data kemiskinan yang disajikannya. Misalnya, jelang pengumuman kenaikan harga BBM kali kedua, BPS pada 13 September 2005 merilis data 37,2 juta penduduk miskin (16,9 persen). BPS juga menyatakan, jika kenaikan harga BBM mendongkrak inflasi menjadi 15 persen, maka orang miskin menjadi 62 juta jiwa. Dan kalau harga BBM naik 95 persen, orang miskin bertambah menjadi 80 juta.

Namun, pada 9 November 2005 BPS merilis, akibat kenaikan harga BBM sebesar 126 persen per 1 Oktober 2005, jumlah orang miskin menjadi "hanya" 24,1 juta. Bukan 80 juta apalagi lebih.[] **ta**

Gayus Dibongkar Negara Bubar



Skandal Gayus bertele-tele penyelesaiannya. Kalau diusut tuntas bakal mengguncang Negara.

"Polisi kesulitan menuntaskan kasus Gayus karena berdampak sistemik. Artinya, melibatkan sejumlah pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi," ungkap Ketua Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman di Senayan Jakarta, Selasa (11/1), mengutip (mantan) Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD).

Dampak sistemik, mengacu pada definisi Perppu JPSK, adalah gejolak yang berujung hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Maka, banyak pihak mendesak agar mantan Kapolri BHD dihadirkan ke Parlemen untuk dikonfrontasikan keterangannya agar skandal Gayus terkuak.

Nah, saat sadar ungkapannya membahayakan kekuasaan, Benny Kabur berupa mengaburkan ucapannya. Dia berkilah saat itu hanya menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, sejatinya gampang *kok* membongkar kasus Gayus. "Untuk bongkar dana Rp 28 milyar ini sangat gampang, tak susah. Orang-orangnya sudah ada ditangkap. Gayus, Andi Kosasih, Haposan sudah ditangkap. Hanya tinggal kemauan dan kejujuran," tandas Susno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, 8 April 2010.

Susno mengatakan, jika memang ada kemauan dan kejujuran, maka tinggal menelusuri dari pengakuan Gayus Tambunan. "Yang jelas duit sudah dicairkan. Gayus yang tanda tangan. Ke mana uangnya? Tinggal telusuri, tanya Gayus. Mudah kalau mau," kata Susno.

Setelah Kapolri BHD yang gagal menuntaskan kasus Gayus, lengser, rakyat berharap pada penggantinya, Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Saat memaparkan visi misinya di hadapan Komisi III DPR RI, 14 Oktober 2010, Timur Pradopo antara lain berjanji akan memastikan penuntasan penanganan perkara yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta diinformasikan penanganannya secara transparan kepada masyarakat.

Namun, kasus Gayus berjalan bagai siput *kecethit*. Pengacara Gayus mengungkapkan, kliennya sempat berbulan-bulan *nganggur* tak diperiksa.

Itu salah satu dari 10 kejanggalan penanganan kasus Gayus yang dibeberkan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 21 November 2010. Kejanggalan tersebut bermisi melindungi para petinggi kepolisian dan kejaksaan, juga kapitalis kakap, yang bersekongkol dalam jejaring jahat bersimpul Gayus.

Gayus, menurut Deputi Koordinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo, adalah, "kunci kasus besar. Tempat pertukaran kepentingan terjadi." Hal ini dibenarkan oleh sesumbar Gayus dalam persidangan dirinya.

"Jadikan saya staf khusus Polri atau staf khusus Kejaksaan, maka dalam 2 tahun Indonesia akan bersih," ujar Gayus saat membaca duplik pribadinya kepada Majelis Hakim di PN Jakarta Selatan, Senin (10/1/2011).

Konflik kepentingan itulah yang membuat Gayus bagai warga negara superistimewa. Bagaimana tidak, walau statusnya tahanan Mako Brimob Polri, Gayus bisa melancong ke Bali, Singapura, Thailand, sampai Macau. Ratusan milyar duit gelapnya pun tak terusik.

Setelah skandal suap Mako Brimob yang memuluskan pelancongan Gayus ke Bali, terbongkar, Kapolri Timur Pradopo berjanji akan menyelesaikan kasus Gayus Tambunan ini dalam 10 hari.

Namun hingga kini, janji tinggal janji. Dan ini dicatat oleh para aktivis dan tokoh lintas-agama sebagai salah satu dari 18 kebohongan rejim SBY.

Skandal Gayus, menurut Jubir HTI Ismail Yusanto, memang mencerminkan watak sistem rusak bernama demokrasi-kapitalisme. Agar sistem tidak hancur, maka jurus yang dipakai penguasa adalah penegakan hukum tebang pilih. Dalam kasus Gayus, hanya level "teri' yang ditangkap, sedangkan "paus"-nya dibiarkan. Bahkan Susno dan Gayus yang dinilai sebagai *whistle blower*, malah jadi pesakitan dan keterangannya tidak banyak digunakan.

Dalam situasi terpojok, penguasa juga biasanya mengalihkan perhatian publik. Gayus pun menyadarinya. "Saya pasrah dijadikan objek pemberitaan yang 90 persen tidak benar. Ini sebenarnya *setting*-an pihak-pihak tertentu," ungkap Gayus dalam dupliknya.

Isu teroris pun langganan dijadikan pengalih perhatian. "Dakwah, lembaga, dan aktivis Islam, dijadikan kambing hitam," ucap Ismail. Kebohongan soal terorisme ini juga masuk dalam daftar 18 dusta rezim tadi.[] **ta**

Sertifikasi Halal Digugat

Sertifikasi halal dianggap menghalangi penjual daging babi dan anjing.



Tak henti-hentinya peraturan yang berbau Islam digugat. Setelah UU Pornografi, kini giliran UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan digugat gara-gara di dalamnya ada kewajiban menyertakan sertifikasi veteriner dan halal.

Uji materi terhadap UU itu telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selasa (11/1) lalu, uji materi ini masuk dalam tahap sidang pendahuluan. Para pemohon uji materi ini adalah Deni Junaedi sebagai pedagang telur, I Griawan sebagai pedagang daging babi, Netty Retta Herawaty Hutabarat sebagai pedagang daging anjing dan Bagus Putu Matra sebagai pedagang daging babi.

Kuasa hukum pemohon, Agus Prabowo, dalam sidang mengatakan para pemohon II, III, dan IV tidak bisa mengedarkan dagangannya karena wajib menyertakan sertifikat halal. Sementara untuk pemohon I, lanjutnya, jika harus menyertakan sertifikat veteriner pada setiap butir telurnya karena biaya yang harus dikeluarkannya sangat besar.

Mereka menggugat Pasal 58 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan berbunyi: "Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal". Pasal ini dinilai bertentangan dengan Pasal 27 dan 28 UUD 1945.

Para pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 58 ayat (4) UU 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sidang uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan ini dipimpin Majelis Hakim Muhammad Alim didampingi anggota Maria Farida Indriati dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Fadlil menanggapi permohonan pemohon yang menyatakan pertentangan dengan UUD belum cukup dijelaskan melalui argumentasi, rasional, yuridis dan teori-teori hukum. "Bagaimana bertentangan, tadi (permohonan) hanya bersifat praktis, sebaiknya ada berdasarkan argumentasi, rasional, yuridis dan teori-teori hukum belum dibangun, kalau strukturnya udah oke," katanya.

Sedangkan Hakim Maria Farida mengatakan permohonan juga perlu mengungkapkan adanya keragaman atas bangsa Indonesia dan kemajemukan serta mempertimbangkan berbagai hukum yang ada, termasuk hukum Islam.

Mendengar saran hakim tersebut, Agus menjawab bahwa permohonan ini tidak menekan pada UU, tetapi pengedaran di wilayah Indonesia.

Sementara itu, Muhammad Alim menyarankan pemohon melakukan elaborasi istilah 'halal' dalam perspektif hukum Islam. Menurut Alim, kehalalan daging hewan menurut Islam bukan hanya terletak pada dzatnya. "Meskipun daging kerbau, tapi karena tidak disembelih menurut Islam, hukumnya haram, misalnya (mati) karena tertabrak, tercekik," jelas Alim.

Alim pun memaparkan mengenai pembatasan-pembatasan yang dimungkinkan untuk menghormati hak asasi orang lain. Daging yang bersertifikat halal adalah konsumsi orang Islam. "Bagi selain orang Islam, membeli daging yang bersertifikat halal boleh, yang tidak bersertifikat halal juga boleh?" jelas Alim.

Munculnya gugatan terhadap keberadaan sertifikasi halal ini menjadi aneh di tengah kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh terhadap barang yang halal. Ada yang menduga motif uji materi ini tak sekadar hanya persoalan ekonomi semata. Lebih dari itu ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melawan berbagai ketentuan yang berbau syariat Islam.

Keberadaan sertifikasi halal itu sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah bagi orang non Muslim. Mereka pun bisa memperoleh produk-produk yang jauh lebih terjamin dari sisi proses dan fisik produk itu sendiri. Toh adanya sertifikasi halal tidak akan menghalangi orang non Muslim untuk membeli produk tersebut.[] **emje**

Badan PBB Minta Revisi Perda Syariat



Keharusan berpakaian Muslim dan Muslimah dianggap melanggar HAM. Aneh!

Kalangan liberal dengan dukungan luar negeri tak pernah diam untuk merusak dan memusuhi Islam. Setelah akhir tahun lalu Human Rights Watch menekan pemerintah Indonesia agar mencabut Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh, kini giliran Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemberdayaan perempuan melakukan hal serupa.

Menurut Human Rights Watch (HRW) Peraturan Daerah Syariat Islam di Aceh melanggar hak asasi manusia. Qanun di Aceh mendiskriminasi perempuan dan membuka peluang terjadinya kekerasan massal dengan dalih menegakkan syariat Islam.

Laporan yang disusun Christen Broecker, peneliti Divisi Asia Human Rights Watch, menyoroti Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dan Qanun Nomor 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Nah, bedanya dengan HRW yang khusus menyorot Perda di Aceh, Badan PBB ini menyoroti Perda-Perda lainnya di Indonesia. Koordinator Program Nasional United Nation Women, atau Badan PBB untuk Pemberdayaan Perempuan, di Jakarta, Dwi Faiz meminta Indonesia untuk segera melakukan revisi atas sejumlah peraturan daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan.

VOA melansir data Komnas Perempuan yang mengungkapkan jumlah Perda diskriminatif terhadap perempuan pada awal tahun 2009 berjumlah 154. Dan hingga akhir September 2010, ada penambahan 35 perda yang juga diskriminatif terhadap kaum hawa.

Disebutkan, perda diskriminasi terhadap perempuan ditemukan dalam bentuk pembatasan kemerdekaan berekspresi melalui pengaturan cara berpakaian dan pengurangan hak atas perlindungan dan kepastian hukum.

Perda Aceh (Qanun) mengenai khalwat atau mesum, Perda di Jawa Barat tentang pemberantasan pelacuran, dan Perda di Bulukumba, Sulawesi Selatan yang mengharuskan berpakaian Muslim dan Muslimah serta Perda tentang pelarangan keluar malam bagi perempuan di Tangerang.

Dwi Faiz meminta Indonesia untuk segera merevisi sejumlah Perda itu. Munculnya Perda yang dianggapnya diskriminatif terhadap perempuan itu salah satunya disebabkan oleh desentralisasi. Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan dialog antar umat beragama maupun organisasi masyarakat sipil sebelum membuat suatu kebijakan.

"Membuka simpul-simpul dialog antar umat bergama di daerah-daerah atau simpul-simpul dialog antar *civil society organization* untuk bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan di daerah. Karena saya yakin perda-perda seperti itu adalah buah dari ketiadaan konsultasi yang baik antar berbagai elemen masyarakat di daerah tersebut termasuk di antaranya dan yang paling sering terjadi adalah kelompok perempuan," katanya.

Untuk mencegah terus munculnya Perda diskriminatif terhadap perempuan, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari menyatakan pemerintah pusat harus memberikan panduan kepada pemerintah daerah sehubungan dengan pembuatan kebijakan yang tidak diskriminatif.

"Dan yang lebih penting lagi sebetulnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan perlu bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan panduan bagaimana menyusun peraturan daerah yang tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap perempuan yang bisa dipakai pemerintah daerah maupun DPRD sebagai acuan," kata Dian.

Rupanya pemerintah pun begitu mendengar kalau yang bicara kalangan liberal. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar mengungkapkan pihaknya pada tahun 2011 ini akan segera menyempurnakan naskah parameter gender untuk para pembuat kebijakan.

"Jadi kalau naskah parameter gender ini sudah ada untuk digunakan oleh para legal drafter, seluruh kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, karena ini otonomi daerah, pasti akan mengacu kepada naskah parameter gender bagi legal drafter ini sehingga kita mengurangi terjadinya perda-perda yang bias gender," kata Menteri.

Tindakan Badan PBB ini, menurut beberapa kalangan, menunjukkan adanya intervensi terhadap Indonesia. Masyarakat sendiri tidak ada yang protes, tapi mengapa mereka sok tahu? Mereka memang anti Islam![] **emje**

Kepalsuan Gereja Yasmin Dimenangkan

Meski PK Pemkot Bogor ditolak MA, bukan berarti jalan memperjuangkan kebenaran berakhir. Masih ada jalan.



Pihak Gereja Yasmin mungkin sekarang merasa di atas angin, karena Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan perizinan pendirian gedung Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin.

Menurut Bona Sigalingging, anggota Tim Hubungan Media dan Pengembangan Jaringan GKI Yasmin, putusan MA itu keluar pada 9 Desember 2010 dan diberikan kepada para pihak pada 31 Desember.

Oleh karena itu, lanjut Bona, penolakan itu berarti mengembalikan pada putusan awal di pengadilan sebelumnya. Artinya, surat izin mendirikan bangunan (IMB) gereja dinyatakan sah. Pembekuan IMB gereja oleh pemerintah kota Bogor tidak sah dan harus dicabut.

Lawan Kebohongan

Persyaratan perizinan IMB Gereja Yasmin memang lengkap, sudah memenuhi syarat sehingga diterbitkanlah IMB. "Tapi permasalahannya dari awal itu dasarnya adalah sebuah kepalsuan!" tegas Mahendradatta, Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM), Senin (17/1) kepada *Media Umat*. Karena syarat-syarat untuk membuat IMB itu cacat secara hukum.

Sejak awal masyarakat tidak setuju dengan pembangunan gereja itu. Muchtar, mantan Ketua RT 08/08 Kelurahan Curug Mekar, lokasi gereja itu, menjelaskan bahwa warganya sejak awal memang menolak. Lagi pula, dari 10 KK Katolik dan delapan KK Kristen, tidak satu pun yang menjadi jemaah GKI.

Tetapi anehnya surat penolakan warga itu tidak menjadi pertimbangan Pemda. Tiba-tiba ada tanda tangan warga yang menyetujui pembangunan gereja itu. IMB pun keluar, padahal persyaratan lainnya sesuai SKB/PBM No 9 Tahun 2006 tak dipenuhi seperti warga pengguna paling sedikit 90 orang; persetujuan warga setempat sebanyak 60 orang disahkan lurah, rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama setempat; dan rekomendasi FKUB. Semuanya tidak ada!

Kalaupun ada tanda tangan, usut punya usut ada oknum yang membayar warga dari luar RT setempat agar mau tanda tangan. Dan itu pun bukan untuk membangun gereja, tetapi untuk membangun rumah sakit Hermina yang letaknya bersebelahan. Jadi banyak kejanggalan IMB yang dikeluarkan Pemkot Bogor. Warga pun mendesak pemda untuk mencabut kembali IMB, sehingga Pemkot Bogor mengajukan PK Nomor 127 PK/TUN/2009 yang kini ditolak MA itu.

Oleh karena itu perjuangan menegakkan kebenaran ini tidak boleh berhenti. "Kita harus melalui kepolisian," ujar Mahendradatta. Cuma sayangnya sekarang ini, institusi kepolisian agak mandeg. Jadi perlu didorong karena warga sebelumnya sudah melaporkan adanya manipulasi syarat perizinan tersebut.

"Polisi itu kalau kepada urusan yang ada uangnya itu kerjanya cepat sekali. Tetapi kalau untuk kepentingan Islam mengapa lambat?" sesal Mahendradatta. Inilah yang semakin memperparah coreng-morengnya kepolisian. Jadi perlu ada dorongan yang kuat kepada kepolisian untuk menuntaskan penyidikan kasus pendirian Gereja Yasmin.

Dari hasil penyidikan itu kalau secara hukum terbukti syarat perizinannya manipulatif, otomatis IMB-nya bisa dicabut tanpa harus melalui pengadilan. "Tetapi kalau polisi tidak maju-maju ya harus dipraperadilankan karena dianggap telah menghentikan penyidikan secara tidak sah," jelas Mahendradatta.

TPM akan terus membantu mendampingi warga. TPM tidak akan mundur hanya karena PK ditolak. Karena permasalahannya di sini ada kepalsuan. "Kita tidak dibenarkan untuk mengalah kepada kepalsuan!" tekadnya.[]

joko prasetyo

Kenaikan Harga Beras Masih Mengancam

Pemerintah ternyata belum memiliki instrumen untuk menghitung stok beras di masyarakat.

Menjelang akhir tahun 2010 dan memasuki tahun 2011, masyarakat benar-benar mendapat kado pahit. Berbagai harga komoditas berlomba-lomba untuk naik. Setelah beras yang merangkak naik sejak pertengahan tahun lalu, harga gula juga tak kunjung turun meski beberapa pabrik gula telah masuk musim giling. Kini giliran harga cabe yang mengamuk.

Dari beberapa komoditas pangan yang harganya melonjak, paling menyesakan dada adalah kenaikan harga beras. Sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia, harga beras justru melambung di tengah produksi beras dalam negeri naik.

Operasi pasar beras yang dilancarkan Perum Bulog ternyata belum mampu menahan lonjakan harga. Data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata beras kualitas medium hingga 14 Januari sudah mencapai Rp 7.288/kg.

Sedangkan berdasarkan angka ramalan (ARAM) III Badan Pusat Statistik (BPS) produksi padi pada tahun 2010 sebanyak 65,98 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau naik 2,46 persen dari tahun 2009 sebesar 64,4 juta ton GKG. Kalkulasi pemerintah dengan produksi tersebut akan ada surplus sekitar 4 juta ton beras.

Meski pemerintah mengklaim produksi surplus, di lapangan harga gabah dan beras justru bertahan pada level tinggi di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Sesuai Instruksi Presiden No.7/2009 tentang Kebijakan Perberasan, HPP gabah kering panen (GKP) di petani sebesar Rp 2.640/kg, GKP di penggilingan Rp 2.685/kg. Sedangkan GKG di penggilingan Rp3.300/kg dan di gudang Bulog Rp 3.345kg. Sementara harga beras di gudang Bulog Rp 5.050/kg.

Mengacu hukum ekonomi, lonjakan harga menjadi suatu yang bertolak belakang. Di tengah produksi yang melimpah, justru harga melambung. Harusnya harga gabah dan beras akan terkoreksi turun ketika produksi meningkat. “Secara hukum ekonomi memang tidak ketemu,” aku Menteri Pertanian, Suswono.

Akibat tingginya harga membuat Perum Bulog yang mendapat tugas menyerap gabah dan beras petani hanya mampu membeli 1,9 juta ton setara beras dari target sebanyak 3,2 juta ton. Minimnya stok beras yang ada di gudang Bulog memaksa pemerintah mengambil keputusan pahit yakni impor beras.

Suswono mensinyalir, melonjaknya harga gabah dan beras karena pedagang tengah menguji kekuatan stok beras pemerintah. “Dengan stok yang minim ada kemungkinan spekulan ikut bermain. Apalagi pemerintah belum mempunyai instrumen untuk menghitung stok beras yang ada di masyarakat,” katanya.

Bagaimana dengan Perum Bulog? Sebagai orang nomor satu di Bulog, Sutarto Alimoeso menegaskan, persoalan yang dihadapi pihaknya adalah harga. Selama tahun 2010 rata-rata harga gabah selalu berada di atas HPP, sehingga Bulog kesulitan mendapatkan gabah/beras.

Bahkan menurut mantan Dirjen Tanaman Pangan itu, harga beras di tingkat konsumen sejak Mei 2010 tidak pernah turun dan cenderung naik terus. “Baru kali ini pada Juni terjadi operasi pasar. Tapi operasi pasar belum mampu menekan harga. Padahal pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketika harga melonjak tinggi, dengan operasi pasar harga bisa diredam,” tuturnya.

Sutarto memprediksi situasi perberasan pada tahun ini tidak akan terlepas dari situasi tahun 2010. Artinya produksi padi masih tetap akan dibayangi situasi iklim dan cuaca yang terus berubah.

Akibat gangguan produksi diprediksi stok beras dunia turun dari 95,3 juta ton menjadi 94,3 juta ton. Ini karena konsumsi meningkat dari 437 juta ton menjadi 453 juta ton. Dengan situasi seperti itu Sutarto memprediksi harga beras akan terus meningkat karena penurunan stok dan gangguan produksi.

Posisi harga beras pada awal Januari mencapai 490 dolar AS/ton untuk beras Thailand 15 persen dan 480 dolar AS/ton beras Vietnam 15 persen. Posisi itu meningkat sekitar 40-60 dolar AS/ton dibandingkan Juli-Agustus 2010 lalu.

Menurut Sutarto, kemungkinan peningkatan harga beras di pasar dunia tersebut akan berpengaruh terhadap perkembangan harga di dalam negeri. “Produksi pangan dunia pada tahun ini masih ada ancaman gangguan akibat perubahan iklim,” katanya.

Pemerintah harus menanggapi serius lonjakan harga beras. Dalam politik ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok. Dalam pandangan Islam, kebutuhan pokok itu mencakup kebutuhan terhadap barang-barang tertentu berupa pangan, sandang dan papan serta kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan.[] **ijul'28**

Dicky Zulkarnain, ST, MM
Praktisi Bisnis Busana Muslimah
Koordinator GTP HTI Daerah Soloraya

Teladan Pedagang Memikat Pelanggan

Maraknya bisnis busana Muslim saat ini merupakan fenomena yang menggembirakan. Baik ditawarkan melalui toko baju, butik, mal hingga di media internet. Beberapa even seperti expo produk Islami, fashion show, dan liputan media menambah maraknya promo penjualan dan sosialisasi busana Muslim. Menurut data, bisnis busana Muslim berkembang cepat dan menjadi bisnis yang menguntungkan. Survei Nielsen di tahun 2010 juga menyebutkan bisnis ini sebagai salah satu bisnis yang tumbuh bagus. Bahkan, pangsa pasar busana Muslim dunia hingga kini diperkirakan bernilai lebih dari US$ 96 milyar atau setara Rp. 861,1 trilyun per tahun (http://girlycious.com).

Sayangnya, di tengah pertumbuhannya yang bagus itu, beberapa pelaku bisnis ini hanya mengikuti tren bisnisnya saja, bukan muncul dari pemahaman benar tentang busana Muslim itu sendiri. Bisa kita jumpai di toko-toko busana Muslim misalnya, dagangan yang ditawarkan adalah produk yang identik dengan pakaian Muslim seperti jilbab, kerudung, koko, peci atau pernak-pernik lainnya. Tetapi kenyataannya, banyak penjual di toko tersebut atau bahkan pemiliknya sendiri tidak mengenakan apa yang mereka perdagangkan. Dalam sebuah talkshow bisnis di daerah Solo misalnya, seorang ibu praktisi/pemilik produsen busana Muslim yang sudah cukup terkenal, ketika ditanya tentang batasan busana yang dianjurkan Islam untuk wanita, ia menjawab, bahwa busana dalam Islam tidak ada batasan, yang penting sopan dan rapi. *Masya Allah*.

Islam tentu saja mengatur tatacara berpakaian, bagaimana ketika di luar rumah, di dalam rumah, ketika menerima tamu dalam rumah, dsb. Saat ini banyak yang belum mengenakannya dengan benar, maka sebenarnya ada peluang bagi para pedagang busana Muslim sebagai media dakwah untuk mengajak para konsumennya menggunakan busana Muslim dengan benar.

Selain itu, dari sisi strategi bisnis, pengaruh keputusan konsumen dalam membeli sebuah produk lebih disebabkan pengaruh dari internal pedagang, dan menonjol saat terjadinya transaksi adalah pengaruh pemilik atau pemasar produk itu (Henry Assael, (1992) *Consumer Behavior and Marketing Action*). Perkembangan strategi *marketing* pun, kalau kita ambil contoh dari produk makanan, seperti kecap, mereka melibatkan para pedagang untuk menggunakan produk mereka sebagai media promosi kepada konsumen yang menjadi konsumen pedagang makanan tersebut.

Maka, dengan memberikan teladan dari segi penggunaan produk busana Muslim, bisa menjadi promosi secara tidak langsung. Pemahaman dari para pedagang dan penjual bisa mengarahkan calon pembeli untuk mengenakan busana Muslim. Bisa juga dibuat tim khusus yang memang mengkhususkan diri untuk meyakinkan calon pembeli agar mengenakan busana Muslim dan mengarahkan busana yang cocok untuk dikenakan. Strategi ini sudah umum dilakukan para tim pemasaran sebuah produk yang sedang mengadakan event promosi yang siap mengarahkan para konsumen untuk menggunakan produknya.

Dari sisi ibadah, maka keberhasilan kita untuk



memahamkan produk yang kita tawarkan sebagai bagian dari pelaksanaan ibadah merupakan investasi amal ibadah kita. Allah SWT berfirman dalam surah al Fushilat : 33 yang artinya “*Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?*”

Marilah kita menunjukkan teladan yang benar, sehingga kita berdagang tidak sekedar mencari keuntungan materi semata, tetapi juga ada peluang investasi amal saleh.[]



Islam Menjaga Keutuhan Negara

Oleh: Hafidz Abdurrahman, Lajnah Tsaqafiyah DPP HTI

Masalah Islam dan keutuhan negara ini menarik untuk dibahas, terutama ketika ada media, Harian *Kompas* (11/1/2011) yang menuduh, bahwa referendum yang berujung pada pisahnya Sudan Selatan adalah akibat negara tidak menerima pluralisme. Maka, penerapan syariat Islam pun dituding sebagai biang kerok disintegrasi. Tentu saja, tuduhan ini selain tidak berdasar, juga lahir dari sikap anti Islam.

Islam menjadikan masalah keutuhan negara, sebagai harga mati. Islam mewajibkan kaum Muslim di seluruh dunia, hanya boleh mempunyai satu negara, yaitu Khilafah. Nabi pun memerintahkan, jika ada kepala negara (khalifah) kedua dibaiat, setelah yang pertama, maka yang kedua harus dibunuh. Dalam sabdanya, baginda menyatakan, *"Jika telah dibai'at dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya."* (HR Muslim).

Islam juga menetapkan bentuk negaranya, dengan bentuk kesatuan, bukan federasi, *commonwealth* maupun yang lain. Dasarnya adalah hadits di atas. Selain itu, Islam pun menjadikan masalah keutuhan negara sebagai masalah vital (*mashlahat dharuriyah*). Karena itu, masalah keutuhan negara ini telah ditetapkan oleh Islam sebagai masalah hidup dan mati (*qadhiyyah mashiriyyah*) umat Islam. Ini di level negara.

Di level masyarakat, meski Islam mengakui perbedaan dan keberagaman, baik perbedaan agama, mazhab, suku maupun bangsa, Islam membangun perbedaan dan keberagaman tersebut dengan pondasi yang kokoh, yaitu akidah Islam sebagai dasar negara dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu, meski di dalamnya, mereka berbeda-beda agama, tetapi agama lain, selain Islam tetap diberi tempat untuk hidup. Praktik kebebasan *ubudiyah*, makan, minum dan nikah-talak para pemeluk non-Islam pun dijamin oleh Islam. Nabi menyatakan, *"Siapa saja yang tetap dengan keyahudian dan kenashraniannya, tidak boleh dihasut (untuk meninggalkan agama mereka)."* (Lihat, *Talhis al-Habir fi Ahadits ar-Rafi'i al-Kabir*, juz IV/122).

Perbedaan dan keberagaman mazhab di dalam Islam juga dijamin karena negara Khilafah bukan negara mazhab. Mereka bisa mempelajari, mengajarkan dan mempraktikkan mazhab mereka. Negara tidak akan menghalangi. Hanya saja, dalam hukum yang diadopsi oleh negara, mereka harus tunduk dan menjalankannya, meski tetap dibolehkan mempelajari dan mengajarkan mazhab mereka, yang nota bene berbeda dengan apa yang diadopsi oleh negara.

Perbedaan suku dan bangsa pun dijamin oleh Islam. Tidak ada diskriminasi ras dan suku. Masing-masing sama. Islam tidak mengenal kasta dan kelas sosial. Di dalam Islam, kemuliaan seseorang diukur dengan ketakwaannya. Nabi bersabda, *"Tidak ada keutamaan bangsa Arab atas non-Arab, non-Arab atas Arab, kulit hitam atas kulit merah, dan kulit merah atas kulit hitam, kecuali ketakwaannya."* (Lihat, *Majma' az-Zawa'id*, juz III/586). Kebanggaan jahiliyah, yaitu kebanggaan pada suku dan bangsa, telah dikubur oleh Islam. Bahkan Nabi menyebutnya sebagai, *"Muntinah (barang busuk dengan bau yang menyengat)."* Dan beliau memerintahkan hal itu untuk ditinggalkan (HR. al-Baihaqi)

Selain itu, Islam telah membangun jalinan persaudaraan (*ukhuwwah*) yang kokoh di antara sesama kaum Muslim, meski berbeda mazhab, suku dan bangsa, dengan ikatan yang kuat, yaitu akidah Islam. Selain itu, Islam juga mengharamkan kaum Muslim untuk memiliki kebanggaan sektarian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, *"Kullu hizb[in] bima ladaihim farihun (Masing-masing kelompok bangga dengan identitas kelompok mereka)."* (QS 30: 32).

Tidak hanya mewajibkan persatuan, Islam juga mengharamkan konflik dan perpecahan di tengah-tengah kaum Muslim. Alquran menyatakan, *"Berpegang teguhlah kalian semua pada ikatan tali agama Allah, dan janganlah sekali-kali kalian bercerai berai."* (TQS 3: 103). Selain itu, Islam juga mewajibkan negara berbuat adil kepada seluruh rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim. Allah berfirman, *"Jika kamu (Muhammad) menerapkan hukum di tengah-tengah masyarakat, maka hukumilah mereka dengan adil."* (TQS 4: 58).



Sebaliknya, Islam mengharamkan tindakan diskriminatif. Setiap rakyat, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapatkan jaminan yang sama dalam memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, kesehatan, keamanan dan pendidikan. Tak heran sejarah membuktikan, Muslim dan non-Muslim bisa hidup berdampingan dengan damai dalam satu negara, yaitu Negara Khilafah, lebih dari 800 tahun.

Dengan seluruh ketentuan di atas, persatuan dan kesatuan benar-benar dijaga, bahkan dinyatakan sebagai harga mati. Karena itu, jika ada upaya untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan, termasuk keutuhan negara, karena ini merupakan masalah vital, maka Islam tidak pernah menganggap remeh masalah ini.

Beberapa faktor yang bisa mengancam keutuhan wilayah negara bisa diklasifikasikan:

1. Faktor politis, karena provokasi dan sentimen suku, bangsa dan mazhab. Ini seperti yang terjadi di Balkan dan Hijaz pada zaman akhir kekhilafahan Utsmani. Provokasi dan sentimen ini sengaja dihembuskan oleh negara-negara kafir Barat di tengah-tengah kaum Muslim, dalam Negara Khilafah. Tujuannya untuk memecah belah keutuhan wilayahnya. Setelah itu, Negara Khilafah ini mereka hancurkan. Begitu Khilafah hancur, maka kaum Muslim dan wilayahnya tidak lagi mempunyai pelindung. Pada saat itulah, dengan mudah mereka dijajah.

2. Faktor ambisi, karena kepala daerah memegang kekuasaan penuh di bidang militer dan keuangan. Ini seperti yang pernah terjadi pada zaman Khilafah 'Abbasiyah. Masing-masing daerah, karena merasa mempunyai kekuasaan penuh, akhirnya berusaha melepaskan diri dari Negara Khilafah.

Terhadap faktor yang pertama, tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Khilafah adalah tindakan politik, dengan cara melakukan *counter* opini, dan menghentikan sumber fitnah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, juga makar dan konspirasi kaum kafir tersebut harus dibongkar dan dijelaskan kepada umat. Kaki tangan yang mereka gunakan, yaitu kaum Muslim yang hidup di tengah-tengah mereka, harus diamankan agar tidak menyebarkan virus yang mematikan ke dalam tubuh umat Islam.

Upaya negara ini akan bisa berjalan dengan baik, jika ada partai politik yang ikut memainkan peranan politiknya di tengah-tengah umat dengan memberikan edukasi kepada mereka.

Adapun terhadap faktor kedua, Khilafah akan melakukan sentralisasi di bidang keuangan dan militer. Selain itu, Khalifah akan melakukan rotasi kepala daerah sehingga masing-masing kepala daerah tidak akan menduduki jabatannya dalam jangka waktu lama. Kebijakan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada zaman baginda, tidak ada kepala daerah yang diangkat untuk jangka waktu yang sangat lama.

Jika langkah-langkah di atas tidak bisa menghalangi upaya disintegrasi, maka Khilafah akan memerangi mereka dalam rangka memberikan pelajaran (*qital ta'dib*). *Qital ta'dib* ini bukan hanya menjadi pelajaran bagi pelaku, tetapi juga bagi yang lain. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani melakukan upaya pemisahan diri. Ini terkait dengan rakyat Negara Khilafah.

Jika upaya tersebut dilakukan oleh negara-negara kafir penjajah, maka negara bisa memaklumkan jihad kepada mereka, hingga mereka tidak berani melakukan tindakan destruktif kepada Negara Khilafah.

Inilah gambaran, bagaimana ketentuan Islam menjaga keutuhan negara. Karena itu, jika Islam dituduh sebagai biang kerok perpecahan, dan disintegrasi, sesungguhnya tuduhan itu salah alamat dan tidak beralasan. Tuduhan seperti itu, selain menunjukkan kebodohan yang luar biasa terhadap ajaran Islam, sekaligus menunjukkan sikap anti Islam yang harus diwas-padai. *Wallahu a'lam*.[]

HIP Cianjur: Adakah Pemimpin Penegak Syariah?



HTI DPD II Cianjur mengadakan HIP yang ke-4 bertempat di gedng KONI Cianjur, 2 Januari 2011. Acara ini bertema "Adakah Pemimpin Penegak Syariah?" Tampil sebagai pembicara Dr Beny Benyamin, MPd (Akademisi) dan Ust. Lutfi Affandi, MH (Humas HTI Jabar). Sekitar 300 orang hadir dalam acara ini.[] **hti cianjur**

HIP Lamongan IV: Subsidi Dicabut, Rakyat Kalang Kabut



DPD II Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Lamongan mengadakan Halaqoh Islam Peradaban (HIP) IV dengan tema "Subsidi Dicabut, Rakyat Kalang Kabut", Ahad (9/1/11) di Gedung PKPRI Jl. Soewoko Lamongan. Acara yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang ini dipandu oleh host Ust Noman Krisna dengan pembicara Arif Firmansyah, SE,MM (Dosen FE UNAIR) dan Ust. H.Mudhofir Afandi, MEI (DPD2 HTI Lamongan).[] **hti lamongan**

Sekularisme dalam Sorotan Muslimah Banyumas



DPD II Muslimah HTI Banyumas menyelenggarakan seminar dengan tema *Sekularisme dalam Sorotan*, Ahad (9/1) di Aula Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.Seminar ini dihadiri oleh Mubalighah, para Nyai Pondok Pesantren, Guru dan Pengawas Agama, penggerak majlis taklim dan ustadzah. Hadir sebagai pemateri Ustadzah Ning Muhibbin (Mubalighah Banyumas), Ustadzah Hj Asih Sari Umiatun (Muslimah HTI Banyumas), dan Ustadzah Siti Muslikhati, M.Si (Muslimah HTI DPD I Yogyakarta).[] **muslimah hti banyumas**

Klinik Remaja Islam: Remaja Cerdas Remaja Bertakwa



Tim Remaja Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kota Semarang mengadakan Klinik Remaja Islam spesial liburan pada 23 - 26 Desember 2010 lalu. Puluhan pelajar dari berbagai SMP dan SMA mengikuti kegiatan yang diadakan di Taman Bermain Mahardhika Banyumanik dari pukul 08.00 - 13.00 ini.[] **mhti semarang**

Peresmian Masjid Raya Ar Rasul: Yogyakarta Bersyariat!



Yogyakarta bersyariat. Demikian harapan dan kesimpulan sebagian besar peserta dialog publik bertema Keistimewaan DIY dalam Perspektif Agama dan HAM yang diadakan oleh Majelis Mujahidin terkait peresmian Masjid Raya Ar Rasul, Ahad 9 Januari 2011. Dengan menegakkan syariat Islam maka Yogyakarta akan benar-benar Istimewa. GBPH Joyokusumo (mewakili Sultan Hamengku Buwono X), Prof. Dr. Ahmad Mursyidi M.Sc , dan Ustadz Muhammad Tholib (Amir Majelis Mujahidin) hadir sebagai pembicara[] **arrahmah.com**

Mahasiswa SEBI Kumpulkan Dana untuk Palestina



Sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan rakyat Palestina, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI menggelar konser amal nasyid menghimpun dana sebesar Rp 7.180.000 untuk membantu perjuangan rakyat Palestina, di Kampus SEBI Depok, Jawa Barat. Penyerahan dana dilaksanakan pada acara konser amal Milad HPA (Herba Penawar Al Wahida), Ahad (16/1). [] **hidayatullah.com**

Training Dahsyat : Generasi Sang Juara



Muslimah HTI Ciputat kelompok remajanya menyelenggarakan sebuah training untuk mengisi liburan anak-anak dengan tema 'Training Dahsyat : Generasi Sang Juara' (25/12). Kegiatan berlangsung di Pulau Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, diikuti oleh 56 anak usia sekitar 8-13 tahun dari Ciputat dan sekitarnya.[] **mhti ciputat**

Disintegrasi Sudan

Minyak Motif Utama

Referendum Sudan hanyalah legalitas untuk kemerdekaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pemungutan suara dalam referendum bersejarah di Sudan Selatan berakhir Sabtu (15/1) waktu setempat, setelah sepekan digelar. Partisipasi rakyat memberikan suara sangat tinggi. Kepala Komisi Referendum Sudan Selatan mengatakan 83 persen pemilih terdaftar datang ke tempat pemilihan suara.

Meskipun hasil lengkap dari referendum baru diketahui paling cepat awal Februari, sudah hampir dipastikan Sudan Selatan akan memisahkan diri dari Sudan. Referendum ini sebenarnya sebatas legalitas formal bagi berdirinya sebuah negara Sudan Selatan. Jauh sebelumnya, persiapan menuju Sudan Selatan merdeka sudah matang.

Ribuan teknisi Israel sudah berada di Sudan Selatan mempersiapkan berdirinya negara baru ini. LSM liberal yang dibiayai oleh Barat sudah sejak lama menciptakan pra kondisi bagi terpisahnya Sudan Selatan. Bahkan lagu kebangsaan Sudan Selatan pun sudah disiapkan.

Amerika Serikat sendiri mencalonkan tiga nama untuk menjabat duta besar di negara selatan yang akan berdiri. Presiden Obama menulis di koran New York Times (8/1): "Jika wilayah selatan memilih kemerdekaan, maka masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, memiliki kepentingan untuk menjamin agar dua negara yang bertetangga itu tetap stabil perekonomiannya, dikarenakan keterkaitan keduanya dalam hal nasib".

Pemerintah Omar Bashir, yang sejak awal memang sangat lemah menghadapi makar ini, bahkan menyatakan siap menerima hasil apapun. Seorang pejabat senior pemerintahan Partai Kongres Nasional pimpinan Presiden Omar al-Bashir menegaskan akan menerima hasil apapun meski itu berarti negara terluas di Afrika itu akan terbagi dua.

Tanpa rasa malu, Omar Bashir beberapa saat sebelum referendum malah menyatakan akan turut berpesta menyambut berdirinya negara Sudan Selatan. Saat berkunjung ke Juba, Bashir menyatakan: "Kita tidak akan mendirikan tenda berkabung, kita hanya akan berpesta bersama Anda".

Proyek Lanjutan

Berbeda dengan itu, Hizbut Tahrir Sudan yang sejak lama dengan keras menolak disintegrasi Sudan Selatan, menegaskan kesedihannya atas referendum ini. Dalam keterangan persnya Hizbut Tahrir Sudan menyatakan: "Sungguh pada hari ini kami mengumumkan kesedihan atas kesuksesan konspirasi ini. Kami menyeru warga Sudan khususnya dan umat Islam umumnya agar membebaskan diri berlindung kepada Allah SWT dari kejahatan ini dan agar mereka terus mengingat nama-nama dan karakter-karakter perencana dan pelaksana kejahatan mengerikan ini sampai ketika mereka dimintai pertanggungjawaban oleh Khilafah kaum Muslim yang akan kembali dalam waktu dekat atas izin Allah SWT."

Dalam penjelasannya HT Sudan menegaskan pemisahan selatan Sudan merupakan bagian dari rencana lama yang diperbarui untuk memecah belah negeri-negeri kaum Muslim. Negeri kaum Muslim kemudian menjadi entitas-entitas kecil yang tidak memiliki daya dan kekuatan sehingga mudah dikontrol dan dirampok kekayaannya. Sudan Selatan tidak akan menjadi yang terakhir jika masyarakat mengikuti rencana ini dan diam saja terhadap konspirasi tersebut.

Menurut HT Sudan, pihak yang menanggung dosa pemisahan Sudan dan yang memikul tanggung jawab berjalannya agenda Barat kafir ini adalah pemerintah yang menandatangani perjanjian Nivasha beracun dan mengimplementasikannya. Kekuatan-kekuatan politik yang menyambut perjanjian itu dan diam terhadapnya juga bertanggung jawab. Termasuk kekuatan militer dan polisi keamanan yang dengan kemampuannya bisa menghapus rencana tersebut tetapi mereka tidak melakukannya.

Bukan Persoalan Kemerdekaan

Senantiasa terdapat penyesatan politik di balik politik luar negeri negara-negara kolonial. Poros negara imperialis seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya, seringkali menutup maksud mereka sesungguhnya dengan mengedapankan tujuan-tujuan yang luhur seperti kemerdekaan, kebebasan dari penindasan, penegakan demokrasi dan HAM.

Kalau poros imperialis benar-benar bermaksud memberikan kemerdekaan, kenapa dukungan kemerdekaan terhadap penjajahan tidak diberikan kepada Palestina yang dijajah Israel, Khasmir yang diduduki India. Atau kenapa Amerika Serikat dan poros imperialisnya justru melakukan penjajahan di Irak dan Afghanistan?

Demikian juga kalau poros Imperialis benar-benar ingin menghilangkan penindasan dari rezim-rezim represif, kenapa Barat malah mendukung rezim otoriter, represif dan brutal seperti Husni Mubarak (Mesir), Karimov (Uzbekistan), rezim Zionis Yahudi, yang berbagai pihak termasuk lembaga-lembaga HAM telah dinyatakan banyak melakukan pelanggaran HAM ?

Jika memisahkan diri adalah begitu bersejarah bagi Sudan lalu mengapa Lincoln menentang perang saudara dengan mengorbankan begitu banyak nyawa dan harta untuk mempertahankan Amerika Serikat? Mengapa Inggris tidak akan mengizinkan Skotlandia, Wales atau Irlandia Utara untuk berpisah? Mengapa Spanyol tidak memberikan jalan bagi wilayah Basque, atau Kanada bagi Quebec untuk memisahkan diri, kenapa pula India tetap ngotot mempertahankan Kashmir?

Harian The Guardian mengungkap, persoalan minyaklah yang menyebabkan AS dan Inggris sangat keras terhadap Sudan. Negara-negara Barat mengetahui kekayaan minyak yang ada di bagian barat dan selatan Sudan. Di wilayah barat Sudan ditemukan uranium selain gas dan emas. Mantan Dubes AS untuk Afrika, Walter Kansteiner dengan tegas mengatakan minyak Afrika Barat telah menjadi kepentingan strategis nasional Amerika. (www.engdahl.oilgeopolitics.net).

Motif minyak ini pernah diungkap Muhammad Najib El-Khoir yang saat itu menjabat deputi Menteri Luar Negeri Sudan, "Memang, AS-lah yang menemukan sumber minyak itu dulunya. Namun, kami kemudian mengarahkan kerja sama di bidang perminyakan dan pertambangan kepada negara-negara Asia antara lain Cina dan Malaysia. Karena itu, wajar saja kalau AS kemudian berang kepada kami." (*Kompas*, 5/8/04).

Karena itu motif demokrasi dan HAM adalah omong kosong. Bagi poros imperialis seperti Amerika yang terpenting adalah sumber-sumber ekonomi. Seperti yang dinyatakan IM Rosenthal dalam *Herald Tribune* pada 27/8/1990: "Siapapun orang Amerika yang peduli terhadap tanda-tanda politik, mengetahui bahwa AS tidak berperang melawan Irak demi demokrasi, karena demokrasi tidak ada di dunia Arab. AS juga tidak berperang demi keluarga kerajaan di Kuwait. AS pergi berperang untuk menghentikan Irak atas kontrol terhadap satu sumber, yang merupakan darah bagi industri, dan yang menentukan hidup matinya perekonomian." Kebijakan ini bukan hanya khusus bagi Teluk, tetapi bagi seluruh negeri-negeri Muslim termasuk Sudan yang merupakan salah satu sumur minyak terbesar di Afrika.[] **abu al fatih**

Sudan Selatan Lepas, Papua Menyusul?

Modus operandi pemisahan Papua oleh Amerika sudah mulai tercium. HAM dan demokrasi menjadi alat utamanya.

Disintegrasi Sudan tidak bisa dilepaskan dari berbagai makar yang dilakukan oleh negara-negara imperialis sejak lama. Inggris sejak tahun 1924 menjalankan politik isolasi antara Sudan Selatan yang mayoritas Kristen dan animisme dengan Sudan Utara yang mayoritas Muslim. Penduduk wilayah utara dipersulit untuk pindah ke selatan, demikian juga sebaliknya. Meskipun alasannya untuk mencegah penyakit malaria, motif sebenarnya adalah untuk memisahkan dua kawasan itu.

Politik identitas berdasarkan ras dan komunitas agama pun dibangun oleh kolonial Inggris. Selatan adalah kawasan Kristen dan asli Afrika, sementara utara kawasan Muslim dan Arab. Negara kolonial itu memberikan jalan bagi berkembangnya gerakan misionaris Kristen di selatan dan menghalangi penyebaran Islam di kawasan itu. Akibatnya, integrasi antara Sudan Selatan dan Utara menjadi terhalang. Kebijakan kolonial Inggris ini kemudian terbukti menjadi salah sumber konflik di masa sekarang.

Sementara Amerika Serikat memang sudah sejak lama menjadikan pemisahan Sudan Utara dan Selatan sebagai target politiknya di kawasan itu. *The Sunday Times* (17/11/1996) mengungkap, pemerintah Clinton meluncurkan kampanye untuk membuat ketidakstabilan pemerintah Sudan. Lebih dari 20 milyar dolar peralatan militer dikirim ke Eritrea, Etiopia, Uganda, termasuk ke tentara pemberontak Sudan Selatan (SPLA).

Sebelumnya, pada tahun 1995, mantan Presiden AS Jimmy Carter, dengan alasan membuka bantuan kemanusiaan, menjadi penengah gencatan senjata antara SPLA dengan pemerintah Sudan. Pada pertengahan 2001, mantan senator John Danforth ditunjuk oleh George Bush Jr sebagai utusan presiden AS. Semua itu menjadi alat penekan untuk untuk mewujudkan tujuan politik Amerika.

Referendum 2011 ini merupakan implementasi dari *Comprehensive Peace Agreement* tahun 2005 di Nairobi. Kehadiran Menlu AS saat itu Collin Powel ketika penandatanganan menunjukkan peran penting Amerika. Setelah lewat perjuangan yang lama tujuan Amerika akhirnya terwujud di era Presiden Obama.

Solusi Berbahaya

Politik referendum atas nama hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) yang ditawarkan oleh Barat sangat berbahaya bagi kesatuan politik negara-negara lain karena mendorong disintegrasi. Setelah Sudan Selatan, wilayah Sudan lain Darfur dan Abyey diperkirakan akan menyusul. Indonesia merupakan salah satu korban dari politik referendum ini dalam kasus lepasnya Timor Timur. Irak diperkirakan akan mengalami nasib yang sama.

Pengertian menentukan nasib sendiri atau kemerdekaan pun perlu dipertanyakan. Hal itu tepat kalau sebuah negara dijajah atau diduduki oleh negara lain. Apa yang terjadi di Sudan, solusinya bukanlah kemerdekaan atau disintegrasi tapi bagaimana membangun pemerintahan dan sistem yang adil sehingga mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Termasuk menjamin pengaturan sumber-sumber kekayaan alam negara untuk kepentingan seluruh rakyat secara adil.

Terbentuknya negara Sudan Selatan yang merdeka tanpa pemerintah dan sistem yang baik, justru akan menciptakan rezim diktator baru yang represif. Apalagi kalau konsesi dari kemerdekaan yang didukung Barat itu adalah memberikan jalan bagi perusahaan-perusahaan Barat untuk mengeksploitasi kekayaan alam Sudan. Sementara hasilnya bukan untuk kepentingan rakyat banyak.

Karena itu solusi tepat bagi Sudan bukan disintegrasi tapi sistem yang mampu menjamin kesejahteraan. Itu tidak lain dengan menerapkan syariah Islam secara kaffah, bukan sekadar simbolis.

Seharusnya pemeliharaan urusan-urusan masyarakat itu sesuai dengan hukum-hukum Islam. Sebab keadilan tidak mungkin terealisasi kecuali dengan hukum-hukum Islam.

Mewaspadai Disintegrasi Papua

Agar tidak mengalami nasib yang sama dengan Sudan, Papua haruslah benar-benar diperhatikan Indonesia. Kegagalan pemerintah pusat menyejahtrakan rakyat Papua dan tindakan represif akan menjadi dasar kuat bagi tuntutan referendum. Apalagi secara politik pra kondisi yang sama sedang terjadi di Papua. Saat ini sedang dibangun klaim bahwa Papua adalah negeri Kristen yang berbeda rasnya dengan dengan Indonesia yang Muslim.

Berkaitan dengan itu Harist Abu Ulya mengecam sikap pemerintah Indonesia yang justru mendukung disintegrasi Sudan Selatan. Pemerintah Indonesia malah menjadi salah satu observer dengan menunjuk KBRI Khartoum. Di bawah arahan Dubes RI untuk Sudan dan Eritrea, Sujatmiko, para pengamat dari KBRI Khartoum bertugas sejak 7 Januari 2011 hingga diumumkannya hasil referendum pada awal Februari 2011.

Menurut Ketua Lajnah Sisiyah HTI ini, pemerintah Indonesia seharusnya menolak skenario Barat terhadap Sudan. Karena hal yang sama bisa dilakukan Amerika terhadap Indonesia terutama dalam masalah Papua. Indonesia seharusnya punya sikap polugri yang *genuine* dan brilian. Misalnya menolak seluruh upaya intervensi negara luar atas urusan dalam negeri orang lain. Sembari mengajukan gagasan, pentingnya perubahan pendekatan paradigmatik bagi pemangku kebijakan untuk mengelola wilayah selatan Sudan lebih baik.

Menurutnya, selama ini referendum bagi bumi Papua masih sayup-sayup, tapi bagaimana jika para pemain politiknya lebih lihai bermain opini di tataran internasional dan menarik perhatian dunia internasional? Apalagi Papua tidak beda jauh dengan Sudan Selatan, sebuah wilayah yang strategis bagi Kapitalis Barat khususnya Amerika. Papua adalah negeri yang dijuluki mutiara hitam dari timur, sebuah negeri yang kaya tambang (tembaga, emas dan uranium), minyak dan lainya.

Seperti halnya Sudan Selatan, senjata yang sama yakni isu-isu HAM dan demokrasi sedang digunakan oleh Amerika Serikat. Abu Ulya mencontohkan, saat ini begitu getolnya AS memantau dengan seksama persidangan tiga anggota TNI yang dituduh menyiksa dua warga Papua. Melalui jubir Deplu Philip Crowley AS menuntut reformasi TNI. "Kalaulah pemerintah tidak serius, partai politik diam, rakyat tidak sadar akan permainan ini, Papua akan menyusul Sudan Selatan," tegasnya.

Campur tangan asing di kawasan Papua seharusnya dicegah oleh pemerintah. Pemerintah jangan begitu saja percaya dengan klaim AS yang tetap mendukung kesatuan Indonesia. Sebagaimana yang terjadi Sudan, tidak ada yang menghalangi AS untuk membuat kebijakan yang sama terhadap Indonesia. Bagi negara imperialis ini yang penting adalah jaminan kepentingan politik dan ekonominya.[]

abu al fatih

Dubes Sudan:
Referendum, Konspirasi Barat


Rokhmat S Labib - Ismail Yusanto - Ibrahim Busyra

Referendum merupakan konspirasi negara-negara Barat. Hal ini disampaikan Duta Besar Sudan untuk Indonesia Ibrahim Busyra. Menurutnya, referendum yang terjadi di Sudan Selatan memang merupakan hasil konspirasi negara-negara Barat sejak lama.

Banyaknya tekanan, terutama yang datang dari AS (termasuk Presiden Obama) membuat pemerintah Sudan tidak berdaya. Tapi ia juga menyesalkan tidak adanya dukungan negeri-negeri Islam lainnya, termasuk Indonesia, untuk mencegah terjadinya referendum. Pemerintah Indonesia, katanya, bahkan tidak sedikitpun memberikan tanggapan atas referendum itu.

Hal ini disampaikan Ibrahim Busyra ketika menerima delegasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (12/1). Delegasi HTI yang terdiri dari Jubir HTI, Muhammad Ismail Yusanto, Ketua DPP HTI Rokhmat S. Labib dan Sekretaris Jubir HTI Muhammad Roni Ruslan, menemui Duta Besar Sudan untuk menyampaikan surat HTI kepada Presiden Sudan Omar Bashir.

Dalam surat yang dibacakan di hadapan Duta Besar, HTI menyatakan bahwa referendum yang dilaksanakan di Sudan Selatan tidak lain hanyalah konspirasi negara Barat (AS dan sekutunya) untuk memecah wilayah Sudan menjadi dua bagian, yakni Sudan Utara dan Sudan Selatan. Akibatnya, umat Islam yang sudah lemah menjadi semakin lemah tak berdaya. Cara ini akan lebih memudahkan bagi Barat menguasai dan merampok kekayaannya. Oleh karena itu, HTI mendorong Presiden Omar Bashir untuk menolak hasil referendum itu dan mencegah pemisahan wilayah Selatan dengan kekuatan apapun, termasuk kekuatan militer.

Delegasi HTI mengingatkan bahwa secara syar'i perpecahan wilayah negeri Islam hukumnya haram. Disampaikan sebuah hadits shahih riwayat Muslim yang intinya adalah perintah Rasulullah untuk memerangi siapa saja yang berusaha memecah belah persatuan dan jamaah kaum Muslimin. Oleh karena itu, ditegaskan bahwa bila Presiden Omar Bashir dan pemerintah Sudan membiarkan terjadinya pemisahan wilayah Sudan Selatan itu jelas merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Allah dan Rasulnya, dan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Delegasi HTI menegaskan, di sinilah pentingya umat Islam memiliki Khilafah. Inilah satu-satunya institusi politik Islam yang mampu menyatukan wilayah dunia Islam dan melindunginya dari terkaman para penjajah. Menanggapi hal ini, Duta Besar Ibrahim Busyra menyatakan,"*Anaa uwafiqu miah bil miah!* (saya setuju 100 persen)."[] **abu al fatih**

Media Umat | Edisi 51, 16 Shafar - 29 Rabiul Awwal 1432 H/ 21 Januari - 3 Februari 2011

Pelajaran Berharga dari *Fitnah Khalq Alquran*

Sejak Khalifah al-Ma'mun berkuasa, masalah Alquran makhluk atau bukan telah diadopsi negara. Akibatnya, Khalifah al-Ma'mun yang dalam masalah ini condong pada pendapat Mu'tazilah, meyakini bahwa Alquran adalah makhluk. Ketika pandangan ini diadopsi, tidak ayal banyak ulama yang hidup pada zamannya harus menghadapi fitnah ini.

Mereka dipanggil satu per satu untuk menjelaskan pandangan mereka di hadapan sang Khalifah, apakah mereka meyakini Alquran sebagai makhluk atau bukan? Jika pandangan mereka berbeda dengan Khalifah, maka mereka akan ditangkap, dipenjara dan tidak sedikit yang menghadapi penyiksaan karena dianggap memiliki akidah yang salah.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh saudaranya, Khalifah al-Mu'tashim hingga Khalifah al-Watsiq (227-232 H). Sejak kebijakan Khilafah mengadopsi masalah *furu'* (cabang) akidah ini, tidak terhitung ulama yang menjadi korban fitnah tersebut. Namun, sejak Khalifah al-Watsiq bertaubat dan menyadari kesalahan dari kebijakan ini, fitnah ini pun berakhir. Khalifah al-Watsiq dikenal sebagai al-Ma'mun yunior. Karena kedalaman dan keluasan ilmunya. Bedanya, al-Watsiq lebih banyak menguasai *tsaqafah* Islam dan Arab, dan tidak tertarik pada *tsaqafah* lain, sebagaimana al-Ma'mun senior.

Ulama yang berjasa menyadarkan Khalifah al-Watsiq adalah seorang ahli hadits, guru Imam Abu Dawud dan an-Nasa'i, bernama Abu Abdurrahman bin Muhammad al-Adzrami. Ketika itu, ia dipanggil oleh al-Watsiq untuk diuji soal *khalq Alquran*. Di hadapan al-Watsiq, dalam keadaan kedua tangan diborgol, ulama agung ini mengajukan pertanyaan kepada Khalifah, *"Beritahukanlah kepadaku tentang seruan kalian kepada rakyat –maksudnya tentang kemakhlukan Alquran—apakah Rasulullah mengetahuinya, namun baginda tidak menyerukannya kepada manusia, ataukah baginda sama sekali tidak mengetahuinya?"* Ahman bin Abu Duad, orang yang sangat berpengaruh dalam istana al-Watsiq, menjawab, *"Rasulullah pasti tahu."* Ulama agung itu menimpali, *"Kalau begitu, Rasulullah telah mampu tidak menyerukan kepada apa yang baginda ketahui, sedangkan kalian tidak mampu."* Semua yang hadir di forum itu pun terdiam.

Kalimat terakhir ulama ini rupanya menyadarkan Khalifah al-Watsiq. Setelah itu, ia pun menyadari kekeliruannya. Tidak lama, ulama agung ini pun dibebaskan dengan pesangon 300 Dinar, dan diantarkan pengawal Khalifah hingga ke negerinya. Sejak peristiwa itu, Khalifah al-Watsiq tidak lagi menerapkan kebijakan yang diadopsi oleh negara sejak era al-Ma'mun itu.

Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa Khilafah yang tidak lama lagi akan berdiri, tidak boleh mengadopsi mazhab akidah tertentu. Akidah yang menjadi pondasi Khilafah adalah akidah Islam, bukan akidah mazhab, baik Mu'tazilah, Jabariyah maupun yang lain. Meski demikian, Khilafah harus menetapkan bahwa satu-satunya dalil yang harus digunakan untuk membangun akidah adalah dalil *qath'i*, tidak boleh dalil *dzanni*. Kebijakan ini dilakukan justru untuk menjaga agar Khilafah tidak terjebak dalam perdebatan akidah yang justru melemahkan eksistensinya.[] **har**

Kristologi



Keputusan Konsili Vatikan II: Kristenisasi Dunia

Hj Irena Handono, Pakar Kristologi, Pendiri Irena Center

Setelah tujuh konsili, berikut adalah konsili-konsili hingga terakhir, Konsili Vatikan II yang secara jelas mencanangkan Kristenisasi dunia.

8. Konsili Konstantinopel yang Keempat (869 M)

Digelar untuk mengecam Patriark Photius karena ia menentang penuhanan Roh Kudus dan kesamaannya dengan Allah dan al-Masih. Konsili ini juga mengecam buku Photius yang berjudul: Rahasia Mitos Roh Kudus. Dan di konsili inilah diputuskan bahwa orang-orang Kristen di seluruh dunia harus tunduk kepada keputusan pemimpin gereja Roma.

9. Konsili Lateran I (1123 M)

Mengakui perjanjian kota Warmsh yang secara khusus memberikan otoritas lebih kepada Paus. Dalam konsili ini Paus Calistus II menentukan uskup-uskup sebagai ganti dari Imperator Jerman. Dan menghapus ikut campur para pangeran dalam penentuan masalah-masalah gereja. Konsili juga membahas pengembalian Tanah Suci (Palestina) dari kaum Kafir (yang mereka maksud 'kafir' adalah umat Islam).

10. Konsili Lateran II (1139 M)

Konsili ini tak lebih dari perebutan kekuasaan antara Kerajaan dan gereja. Dengan menghadirkan Kaisar Conrad, konsili ini menghakimi Arnold dari Brescia.

11. Konsili Lateran III (1179 M)

Konsili ini menetapkan aturan proses pemilihan Paus. Konsili ini memutuskan perselisihan antara Paus dan Frederick Barbarious. Aliran Albigensian dan Waldansian yang berani menentang keradikalan para pendeta Katolik dinyatakan sebagai aliran bidah/sesat dan harus dibunuh.

12. Konsili Lateran IV (1215 M)

Konsili ini digelar untuk melanjutkan pembasmian terhadap aliran-aliran yang dikategorikan sesat oleh gereja. Di konsili ini juga ditetapkan makna 'kurban', makna roti beragi dan *wine* (khamr)nya menjadi daging dan darah Yesus. Di konsili ini juga diberlakukan konsep 'pengakuan dosa' yang harus dilakukan secara berkala dan 'Perjamuan Suci' yang keduanya merupakan bentuk pengawasan, kontrol terhadap pemeluk Kristen agar tetap tunduk kepada doktrin gereja yang diperbaharui.

13. Konsili Lyons I (1245 M)

Konsili ini dikepalai oleh Paus Inosensius IV (Innocent IV); Patriark dari Konstantinopel, Antioka dan Aquileia (Venice), 140 Uskup, Kaisar dari Timur Baldwin, dan Raja Prancis Louis (yang juga santo, St Louis) hadir. Konsili menghimpun para uskup dan raja-raja untuk mengucilkan dan menurunkan tahta Kaisar Frederick II dan membentuk Perang Salib baru di bawah kepemimpinan St. Louis (Raja Prancis) melawan Muslim yang mereka sebut Sarekan.

14. Konsili Lyons II (1274 M)

Konsili ini diadakan oleh Paus Gregory X, Patriark Antioka dan Konstantinopel, 15 Kardinal, 500 Uskup dan lebih dari 1000 pejabat. Konsili ini sempat menyatukan Gereja Yunani dan Roma namun tidak berumur lama. Konsili menuntut agar Perang Salib terus dilanjutkan melawan Muslim di Palestina dengan mencari taktik baru untuk mendapatkan kembali Palestina dari Turki.

15. Konsili Vienne (1311-1313 M)

Konsili Vienne diadakan di Prancis oleh Perintah Clement V, Paus pertama dari Avignon. Patriark Antioka dan Alexandria, 300 Uskup (114 menurut otoritas lain), dan raja Philip IV dari Prancis, Edward II dari Inggris, dan James II dari Aragorn. Konsili membahas kriminalitas dan kesalahan Satria Templars, Fracetelli, Beghard dan Beguines, dengan proyeksi untuk Perang Salib baru.

16. Konsili Constance (1414-1418 M)

Konsili ini diadakan pada saat terjadinya Skisma Barat, dengan tujuan untuk mengakhiri perpecahan di gereja. Paus Roma diberhentikan karena keterlibatan mereka dalam skandal 'cek pengampunan dosa'. John Hus dan Wyclif mengkritik ini dan akhirnya dihukum bakar hidup-hidup.

17. Konsili Basle/Ferrara/Florence (1431-1439 M)

Tujuannya adalah untuk menenangkan religiousme di Bohemia. Karena perdebatan dengan Paus, Konsili dipindah dari Basle ke Ferrara (1438) dan kemudian ke Florence (1439). Konsili membahas tentang reformasi Gereja.

18. Konsili Lateran V (1512-1517)

Di bawah Paus Yulius II (Julius II) dan Paus Leo X, kaisar waktu itu adalah Maximilian I. Perang salib yang baru terhadap Turki direncanakan, tapi tidak berhasil karena gejolak di Jerman yang ditimbulkan oleh Martin Luther.

19. Konsili Trent (1545-1563 M)

Konsili berlangsung mulai Paulus III (Paulus III), Yulius III (Julius III), Marcellus II dan Pius IV, dan Kaisar Charles V dan Ferdinand. Konsili membahas masalah perbedaan dogma yang menggiring pada perpecahan paling parah di tubuh gereja-gereja. Di konsili ini dimunculkan penambahan definisi baru untuk konsep Pengorbanan dan Penebusan bagi kematian Yesus, dll.

20. Konsili Vatikan I (1869-1870 M)

Konsili digelar untuk mnghadapi era modern dan ilmu-ilmu pengetahuan yang menyingkap penyimpangan Bibel dan kebenarannya. Konsili memutuskan infallibilitas Paus (kemustahilan Paus berbuat salah) saat berbicara secara excathedra, yaitu ketika sebagai gembala dan guru dari semua umat kristus, Paus kembali mendefinisikan doktrin mengenai iman dan moral untuk dipegang oleh seluruh gereja. Ini menimbulkan perpecahan baru gereja.

21. Konsili Vatikan II (1962-1965 M)

Ini konsili pertama yang mengambil sikap menyerang kesalahan seluruh level dan mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Poinnya antara lain:

- Memaksa akidah Katolik ke seluruh dunia.
- Membasmi sistem pemerintahan komunis karena dianggap atheis.
- Membasmi Islam dan kaum Muslim di bawah slogan 'berdialog dengan agama-agama selain Kristen'.
- Meminta bantuan orang-orang sekuler sebagai alat spionase bagi tokoh-tokoh pendeta dan sekaligus sebagai penginjil.
- Aktivitas penginjilan untuk orang-orang non-Kristen.

Ide yang paling penting dalam konsili ini adalah Kristenisasi dunia.[]



Prof. Dr. Ing. Fahmi Amhar

Bunga dari Negeri Khilafah



Bunga tulip selalu diasosiasikan dengan Negeri Belanda. Pada musim semi, sekitar April sampai Mei, di taman Keukenhof Belanda yang seluas 32 hektar, mekar 4 juta kuntum dari 300 jenis tulip. Luar biasa. Mungkin inilah secuil taman surga yang digelar Allah di dunia.

Namun tahukah Anda bahwa bunga tulip bukanlah asli Belanda?

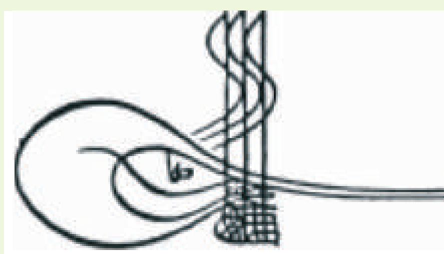
Suatu riwayat mengatakan bahwa tulip dibawa ke Eropa oleh Oghier Ghislain de Busbecq, duta besar Raja Ferdinand I dari Jerman untuk Sultan Sulayman al Qanuni (1520-1566) dari Daulah Utsmani. Sang duta besar ini amat mengagumi berbagai bunga di Istanbul yang bahkan mekar di tengah musim dingin.

Versi lain mengatakan bahwa bunga ini diperkenalkan ahli botani Universitas Leiden, Carolus Clusius, pada tahun 1573. Dia mendapat bibit bunga itu dari Austria. Di Austria, bunga ini diperkenalkan etnis Hungaria. Dan orang-orang Hungaria ternyata mengenal tulip dari orang-orang Khilafah Utsmaniyah, yang datang membebaskan Hungaria pada awal abad 16!



Sulayman al Qanuni

Ternyata, bunga tulip sebagai tumbuhan liar telah dikenal di Turki pada tahun 1000-an. Namun, baru Sultan Ahmed III (1718-1730) yang memerintahkan membudidayakan tulip secara massif. Para pejabat bertugas menilai bagus jeleknya berbagai jenis tulip. Masa pemerintahan Sultan Ahmed III ini disebut juga Era Bunga Tulip.



Stempel Sultan Sulayman al Qanuni



Ilustrasi tulip oleh Abdulcelil Levni (1720)

Era Tulip *(dalam bahasa Turki: Lale Devri)* adalah periode dalam sejarah Utsmani yang relatif damai. Saat itu Daulah Utsmani sudah mulai melakukan politik yang lebih berorientasi pada industri dan perdagangan, dan mengurangi tensi terhadap Barat. Sejak kegagalan ekspedisi jihad ke Wina Austria pada tahun 1683 Daulah Utsmani sejenak melakukan "reses" dari jihad.

Selama periode tulip ini, masyarakat kelas elite telah membentuk minat yang besar untuk tulip. Tulip identik dengan gaya hidup bangsawan. Namun tulip juga merupakan romantisme yang mewakili kalangan elite dan kaya, yang pada saat yang sama menunjukkan kerapuhan dari pemerintahan despotik (yakni pemerintahan yang terkonsentrasi di tangan segelintir elite).[]

Media Umat | Edisi 51, 16 Shafar - ... H / 21 Januari - 3 Februari 2011

Entis Sutisna
DPP Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia



Pejuang Khilafah dalam Gelapnya Dunia

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sulitnya seorang tunanetra mencari buku yang dapat dibaca? Tentu saja buku yang dimaksud adalah buku dengan huruf Braille, sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh orang buta. Maka pernah tercetus dalam benakku untuk mencoba mengonversi kitab-kitab Hizbut Tahrir dalam versi Braille namun urung kulakukan lantaran terkendala kepraktisan dan biaya.

Bayangkan, Alquran saja yang mushaf-nya bisa Anda masukkan dalam saku atau bahkan dalam program di HP, maka 30 juz Alquran Braille terdiri dari 30 jilid. Bila ditumpuk besar dan tebalnya setara dengan satu dus televisi 21 inci. Harganya pun tidak murah. Perjilidnya sekitar 1,25 juta rupiah. Jadi kalau ingin mendapatkan 30 jilid, sekitar 37,5 juta uang yang harus dikeluarkan.

Terbatasnya referensi tertulis dalam bentuk salinan huruf Braille, apalagi dengan harga yang *wah* itu membuatku harus mengoptimalkan indera pendengaran untuk memahami suatu referensi.

Lugas dan Logis

Oh iya, hampir saja aku lupa mengenalkan diri. Namaku Entis Sutisna. Aku seorang buta yang mengajari orang buta. Karena memang profesiku sebagai PNS guru Sekolah Luar Biasa (SLB). Teman sejawat dan murid-murid biasa memanggilku dengan sebutan Pak Entis. Saat ini aku diamanahi jadi pengurus DPP Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI).

Aku lahir di Ciamis, 10 Juli 1964. Menurut orang tuaku, sejak lahir aku sudah tidak bisa melihat. Ini tampak dari selalu terpejamnya kedua mataku sejak di usia anak normal *melek*. Sejak SD-SMP aku sekolah di SLB.

Namun ketika SMA dengan kemampuan beradaptasi yang lebih baik di tengah-tengah orang bermata normal, aku masuk ke SMA Negeri 1 Ciamis. Setelah itu, kuberanikan diri masuk kuliah di Universitas Negeri Surakarta, FKIP Jurusan Pendidikan Khusus dan mendapat gelar doktorandus (Drs) pada tahun 1991.

Agamaku Islam. Dari jalur keturunan ibu, kakekku termasuk ketua tokoh agama di masyarakat, mungkin sekarang MUI namanya. Selain itu, kultur di kampung yang cukup kuat nuansa keislamannya turut memberikan warna pada pemahaman keagamaanku.

Awal aku mengenal ide-ide HT pada tahun 1997-an. Saat itu aku sering mengikuti majelis Jamaah Tabligh. Aku berkenalan dan akrab dengan Yoyo, seorang ustadz. Dia sering menyampaikan hasil diskusinya dengan seorang aktivis HT dari Bogor, dia memanggilnya Ustadz Irsyad.

Melalui dialah, aku mengenal pemikiran-pemikiran HT. Akhirnya diskusi demi diskusi pun mulai banyak menyentuh pemikiran terdalam dan mendasar dalam benakku. Hingga ide tentang kemenangan Islam dan kaum Muslimin pun menjadi wacana pemikiran baruku.

Kami pun melakukan beberapa komparasi terutama pandangan tentang kemenangan tersebut, apakah itu berupa hadiah yang akan datang sendiri tanpa diusahakan sebagaimana pandangan yang kuanut sejak kecil ataukah pandangan yang kami pandang baru seperti halnya dari HT yang memandang itu merupakan perkara yang telah menjadi janji Allah namun harus diupayakan dengan langkah penyadaran umat melalui aktivitas dakwah? Akhirnya saya berkomitmen untuk mengkaji lebih dalam tentang ide-ide Islam yang diemban HT dan bergerak memperjuangkan tegaknya ide-ide tersebut.

Sebelum mengenal ide HT, ya yang ku pahami bahwa Islam adalah agama ritual, tidak lebih. Namun setelah mengkaji ide Islam yang diemban HT, terbukalah wawasanku tentang keluasan dan keluwesan Islam yang kaffah. Termasuk gagasan khilafah-nya, yang sangat relevan dengan kebutuhan umat dalam menghadapi problematika yang dihadapinya.

Ada satu kalimat yang terus terngiang dan kalimat itu pula yang membuatku tertarik bergabung bersama HT. "Tegaknya syariah di dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyyah, semua itu pasti akan terwujud namun harus kita ikhtiyarkan dan bukan sebatas menunggu kedatangannya," kata Ustadz Irsyad.

Apalagi ketika ia membacakan kutipan Alquran Surat Ar Ra'd ayat 11. Itu menyegarkan ingatanku tentang apa yang pernah disampaikan Pak Maryadi, dosenku ketika kuliah, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka." Itu disampaikan Pak Maryadi saat memotivasi mahasiswa yang semuanya tuna netra itu.

Meskipun Islam kaffah ini merupakan pandangan yang baru di lingkungan kami di Ciamis, tapi *alhamdulillah*, keluarga baik istri dan anak-anakku sangat mendukung. Begitupun keluarga besar istri dan keluarga besarku, ketika aku menyampaikan pandangan ini mereka tidak mempermasalahkan, meski memang ada *sih* beberapa silang pendapat kecil.

Namun semuanya dapat diatasi. Termasuk juga dengan ayahku yang sempat takut berlebihan manakala isu terorisme digulirkan pemerintah. *Alhamdulillah*, ayah menjadi tenang ketika kuajak seorang aktivis HT untuk bersilaturahmi dan berbincang bersamanya di rumah. Kesalahan persepsi ayahku dapat diluruskan dengan penjelasan lugas dan logisnya.

Pejuang Khilafah

Keterbatasanku dalam penglihatan tentu akan menjadi pembeda paling mudah dengan orang normal. Bila aktivis dakwah lain bisa dengan lincah ke sana ke mari, aku terkendala. Mobilitas terbatas karena untuk bepergian, bila tidak mengandalkan yang *melek* untuk menjadi *guide* maka mengandalkan tongkat dengan segala keterbatasannya.

Selain itu, dalam mengakses ide, sebagaimana halnya orang tunanetra lain maka aku mengandalkan sumber audio. Terbatasnya referensi tertulis dalam bentuk salinan huruf Braille membuatku harus mengoptimalkan indera pendengaran untuk memahami suatu referensi.

Aku memperkaya pengetahuan dari rekaman audio, juga meminta tolong anak dan istri untuk membacakan terjemahan kitab serta majalah, nasyrah, kutaib dan lain-lain sehingga aku bisa menyimaknya. Selain itu, dalam rangka mengejar ketertinggalan, aku membeli komputer dan HP yang telah diisi *software* yang bisa membacakan *file* naskah yang ada.

Begitu juga ketika *halaqah* (pengkajian rutin kitab yang dikeluarkan HT), aku mendapat pengecualian dalam membaca paragraf demi paragraf karena memang tidak ada kitab edisi Braille. Aku cukup menyimak setiap pembahasan yang dilakukan. Dan ternyata inipun terjadi pada rekan-rekanku di luar Kota Ciamis, yang juga telah aktif di HT.

Lho kok Anda kaget? Anda yang matanya melek saja kaget, apalagi aku jelas lebih kaget lagi karena tidak melihat ada orang yang senasib denganku turut gabung berdakwah bersama HT. Padahal mereka tepat di depanku. Barulah aku sadar ketika mereka berbicara.

Itu terjadi beberapa waktu yang lalu saat Muktamar ITMI. Saat itu aku bertemu dengan beberapa pengurus dari beberapa daerah. Ide-ide mereka khas mewarnai curah pendapat yang terjadi selama acara. Dan ketika ditanya kepada yang bersangkutan, ternyata betul bahwa mereka telah aktif di HT.

Dan saat ini? Syukur Alhamdulillah organisasi kami menerima ide-ide HT termasuk banyak yang tertarik dan akhirnya memilih bergabung dengan HT. Karena menurutku kekurangan kami yang tunanetra ini tidak boleh menjadi penghalang untuk meretas jalan menuju berlangsungnya kembali kehidupan Islam dengan tegaknya Khilafah. Meskipun buta, *toh* kami masih punya senjata yang utama untuk berdakwah, yakni bicara![]

seperti yang dikisahkan pa entis kepada **dian jatnika**

Pondok Pesantren Hamfara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Mencetak Ekonom Muslim Pejuang Khilafah



Ponpes Hamfara berkiprah membina ratusan santrinya. Ponpes yang menjadi bagian dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta ini bertekad dan berupaya mencetak ekonom Muslim sekaligus pejuang syariah dan khilafah.

Menghirup udara sore di bebukitan hijau tempat Ponpes Hamfara berada sangat menyegarkan. Di tanah seluas empat hektar itu aktivitas santri berlangsung. Di lapangan santri berlari dan berteriak mengejar dan menendang bola.

Di masjid dan di beberapa tempat lainnya yang lebih hening tampak santri dibagi ke dalam beberapa kelompok mengikuti mentoring kajian Islam. Sebagiannya lagi masih asyik mengikuti perkuliahan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) yang juga berada di komplek yang sama.

Ada juga santri yang dengan lahapnya menyantap siomay dan bakso tuna goreng. Uniknya, yang berjualannya pun ternyata santri juga. Tujuannya untuk melatih mental dan kemandirian santri. Para ekonom besar awalnya pun dari berdagang dan bisnis kecil-kecilan. Tentu tidak cukup hanya itu, untuk menjadi ekonom yang memahami ekonomi makro dan siap menjadi pejuang khilafah mereka pun mengikuti mentoring dan perkuliahan di STEI.

Sejarah Hamfara

Ponpes ini resminya bernama Mahad Hamfara. Alamatnya di Dukuh Kenalan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Jarak dari pusat kota (Kantor Pos Besar Yogya) sekitar 15 km. Meski kondisi jalan untuk menuju Hamfara sudah bagus, belum ada kendaraan umum seperti bus atau pun angkot ke arah ponpes. Tapi jangan khawatir, bagi yang tidak membawa kendaraan sendiri bisa naik ojek.

Kata "Hamfara" adalah singkatan dari *hadza min fadhl Rabbi* berarti (ini adalah karunia Tuhanku). "Sebuah penggalan ayat Alquran yang menegaskan keinsyafan batin yang mendalam, bahwa segala sesuatu yang kita nikmati hakikatnya adalah atas karunia Allah SWT, bukan atas usaha atau ilmu kita semata," ujar pimpinan Ponpes Hamfara KH Muhammad Shiddiq Al Jawi kepada *Media Umat.*

Ponpes Hamfara merupakan bagian tak terpisahkan dari STEI Hamfara. Para santrinya *ya* sekaligus mahasiswa STEI Hamfara, karena STEI Hamfara itu ciri khasnya dua, bebas bea pendidikan dan berpesantren. "Jadi kalau mahasiswa kuliah di STEI Hamfara, wajib sekaligus jadi santri di asrama yang kita siapkan," ujar lulusan magister Studi Islam UII Yogyakarta tersebut.

Santri tidak boleh kos di luar asrama kampus karena terkait dengan tiga tujuan besar STEI Hamfara. *Pertama,* memberikan ilmu kehidupan kepada mahasiswa, khususnya ekonomi Islam. *Kedua*, membentuk mahasiswa yang berkepribadian Islam (*syakhshiyah Islamiyah*). *Tiga,* membekali mereka dengan tsaqafah Islam atau ilmu-ilmu keislaman.

Tujuan pertama diupayakan oleh bidang akademik lewat perkuliahan formal. Tujuan kedua menjadi tanggung jawab kegiatan KKAI (Kelompok Kajian Agama Islam). Ini semacam mentoring atau asistensi dengan materi terstruktur selama 6 semester. Sedang tujuan ketiga, menjadi tanggung jawab Mahad Hamfara.

Cikal bakal ponpes ini bermula tahun 2006, ketika STEI Hamfara mencanangkan program asrama bagi mahasiswa. Tapi waktu itu Hamfara belum punya gedung sendiri, masih kontrak. Para mahasiswa diasramakan. Nah di asrama itulah Hamfara mengadakan kajian rutin bada Maghrib dan bada Shubuh, dengan berbagai macam kajian.

Ada kajian bahasa Arab, Ulumul Qur`an, Pemikiran Islam Kontemporer, dan sebagainya. Sejak itu dari tahun ke tahun jumlah penghuni asrama makin bertambah. Mulai tahun 2008 Hamfara mengadakan workshop internal yang kemudian memformalkan kajian di asrama itu dalam sebuah sistem pesantren.

Ustadz Ismail Yusanto, sebagai penggagas utama pendirian STEI dan Mahad. "Lalu gagasan besar beliau itu direalisasikan dan diterjemahkan di lapangan oleh kami para stafnya, antara lain saya sendiri, dan juga Ust Dhuha Ghufron, yang kini sebagai wakil saya sebagai Mudir Tanfidz Mahad atau pimpinan pelaksana sehari-hari," ujar alumnus PP Al Azhar Bogor itu.

Sedangkan STEI Hamfara sendiri merupakan transformasi lanjutan dari Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta – SEM Institute yang berkiprah di Yogyakarta sejak tahun 2000. Barulah sejak September 2010 (Syawal 1431 H), dengan gedung milik sendiri di Bantul, Ponpes Hamfara mulai berjalan dengan penataan yang lebih baik serta tersentralisasi.

Kurikulum Hamfara

Inti kurikulum Ponpes Hamfara adalah tsaqafah Islamiyah dengan tiga fokus. Fokus pertama, penguatan bahasa Arab mulai dari nahwu sharaf, muhadatsah (percakapan), *qira`atul kutub* (membaca kitab kuning), dan terjemahan.

Untuk nahwu sharaf Hamfara memakai kitab *Nahwul Wadhih, Amtsilatu Tashrifiyah*, dan *Amtsilaty*. Sedangkan rujukan untuk praktek *qira`atul kutub* adalah kitab *Syakhshiyah Islamiyah* Juz 2 karya Syekh Taqiyuddin Nabhani.

Fokus kedua adalah pembekalan tsaqafah Islam dasar seperti aqidah dan fiqih ibadah. Untuk pembinaan aqidah menggunakan kitab *Dirasat fi Al-Fikr Al-Islami* karya Syekh Muhammad Husein Abdullah dan kajian fiqih ibadahnya menggunakan kitab *Ahkamush Shalah* karya Syekh Ali Raghib.

Fokus ketiga adalah tsaqafah khusus yaitu ekonomi Islam. Untuk itu Hamfara mengadakan kajian rutin untuk seluruh santri, namanya Halqah Kubra, dengan kitab *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam* karya Syekh Taqiyuddin Nabhani.

Sedangkan jadwal dirasah (ngaji) di pesantren ada dua, pagi dan malam. Pagi mulai jam 05.30 – 07.00. WIB. Sedang malam mulai bada Maghrib sampai sekitar jam 20.00 WIB. Jumlah santri sekarang tercatat sekitar 586 santri, dengan rincian 314 santri putra dan 272 santri putri. Sedang jumlah tenaga pengasuh ada 15 orang.

Hubungan Hamfara dengan masyarakat sekitar pun cukup baik. Itu setidaknya ditunjukkan dengan aktifnya santri dan pengasuh dalam kegiatan Yasinan berkeliling di rumah-rumah di sekeliling ponpes. Ada pula yang ikut ronda atau kerja bakti di kampung sekitar, khususnya di Desa Bangunjiwo.

Ketika ditanya mengapa Hamfara menggunakan kitab-kitab ekonomi karya Syekh Taqiyyuddin An Nabhani, yang terkenal sebagai ekonom makro Islam ideologis itu, ia menyatakan karena Hamfara bertekad dan berupaya mencetak ekonom Muslim sekaligus pejuang syariah dan khilafah.[] **joko prasetyo**



KH Muhammad Shiddiq Al Jawi,
Pimpinan Ponpes Hamfara, Bantul, DIY

Syariah tanpa Khilafah, Hanyalah Khayalan

KH Muhammad Shiddiq Al Jawi, Pimpinan Ponpes Hamfara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini lahir di Grobogan, Jawa Tengah, 31 Mei 1969. Ia menjelaskan kepada santri untuk sadar akan kewajiban menerapkan syariah dan khilafah melalui dua jalur.

Pertama, ketika ia mengajar mahasiswa dalam perkuliahan formal. Karena di STEI ia diamanahi mengasuh beberapa mata kuliah keislaman, seperti fiqih muamalah, ushul fiqih, juga beberapa mata kuliah umum seperti perekonomian Indonesia dan ilmu budaya dasar. "Ide-ide tentang syariah dan khilafah sering saya sisipkan dalam kuliah-kuliah itu," ujar anggota DPP Hizbut Tahrir Indonesia ini.

Kedua, ketika alumnus PP Nurul Imdad Bogor ini mengajar santri di pesantren, lewat kitab-kitab yang ia ajarkan, misalkan kitab *Syakhshiyah Islamiyah* Juz 2 dan *An-Nizham al-Iqtishadi fil Islam* karya Syekh Taqiyuddin Nabhani.

"Alhamdulillah, santri menerimanya, bahkan sebagian antusias memperjuangkannya," akunya. Perlu diketahui, dukungan kepada syariah dan khilafah juga dijadikan Hamfara sebagai semacam budaya atau nilai (*value)* yang ditanamkan di pesantren.

Santri Hamfara, tegasnya, harus berideologi Islam. "Kalau ada yang coba-coba menyebarkan atau mengadopsi ideologi kufur, seperti sekulerisme-liberalisme, sosialisme-komunisme, maka mahasiswa itu akan kami keluarkan," tegas penulis enam buku, 12 karya terjemahan, dan delapan karya suntingan itu.

Sarjana lulusan Fakultas MIPA, IPB ini menyatakan ia mempunyai rumusan singkat, mengapa harus syariah dan Khilafah. Ia katakan, *al insan bilaa syariah hayawan, wasy syariah bilaa khilafah takunu khayalan*.

"Jadi manusia kalau tak mengamalkan syariah, hidupnya akan sesat seperti hewan. Sedang menerapkan syariah secara kaffah tanpa institusi Khilafah, jelas hanya khayalan saja," pungkasnya. [] **joy**

Selingkuh Mengancam Keluarga Muslim

Setiap dua jam tiga pasang suami istri bercerai gara-gara selingkuh.



Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusman Arifin, tertangkap basah bersama pasangan selingkuhannya di sebuah wisma di Jalan Mardani, Jakarta Pusat. Sang istri, Naila Ibrahim sendiri yang memergokinya sembari membawa rombongan wartawan.

Sementara itu, Polres Tulungagung menetapkan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Agus Sukarno Putro (29) dari Fraksi PKNU dan pasangan selingkuhnya, Apriliana (30) yang juga bendahara sekwan sebagai tersangka. Mereka dijerat pasal 284 KUHP tentang perzinaan.

Berita seperti itu banyak menghiasi media massa, bukan satu-dua kasus. Bukan hanya menyangkut kalangan artis, tapi juga kaum elitis. Itupun yang ketahuan saja, yang tak terendus jauh lebih banyak.

Tak heran bila di Indonesia, detektif swasta banyak yang disewa untuk menyelidiki perselingkuhan, khususnya yang dilakukan pejabat. "Memang, klien kami kebanyakan mengadukan soal perselingkuhan," kata CJ Ryon, pimpinan dan pendiri *Pancaindera.com,* sebuah lembaga penyelidik swasta spesialis perselingkuhan.

Picu Perceraian

Ya, praktik selingkuh telah begitu meluas. Bahkan, kini menjadi ancaman serius bagi institusi keluarga bahagia. Sejumlah hasil penelitian dalam dan luar negeri membuktikan bahwa dari sekian banyak penyebab perceraian, selingkuh menjadi penyebab utama.

Menurut data Ditjen Pembinaan Peradilan Agama (PPA) Mahkamah Agung, persentase perselingkuhan perempuan lebih kecil dari pria. Sedangkan Amir Sjarifoedin Tjunti Agus, dalam bukunya "Wanita-Wanita Selingkuh; Rumput Tetangga Terlihat lebih Hijau", melakukan penelitian terhadap 100 "wanita peselingkuh" usia 24-50 tahun, berdasarkan strata ekonomi, sosial, dan sebagainya, -dengan latar belakang pendidikan (SLTA sampai S-2).

Terungkap, banyak wanita lebih memilih selingkuh daripada memperbaiki hubungan dengan suami. Bahkan, mereka berselingkuh tidak saja dengan PIL (pria idaman lain), tapi juga dengan adik ipar, anak kos, siswa, mahasiswa, "brondong", lesbian, bahkan gigolo. Menjijikkan!

Hasil perselingkuhan ini, mendorong pergerakan stastistik perceraian dari tahun ke tahun. Direktorat Jendral Pembinaan Peradilan Agama mencatat, kini selingkuh menjadi virus keluarga nomor empat. Tahun 2005 lalu, misalnya, ada 13.779 kasus perceraian yang bisa dikategorikan akibat selingkuh; 9.071 karena gangguan orang ketiga, dan 4.708 akibat cemburu. Persentasenya mencapai 9,16 persen dari 150.395 kasus perceraian tahun 2005 atau 13.779 kasus.

Alhasil, dari 10 keluarga bercerai, 1 di antaranya karena selingkuh. Atau, rata-rata, setiap 2 jam ada tiga pasang suami istri bercerai gara-gara selingkuh. Perceraian karena selingkuh itu jauh melampaui perceraian akibat poligami tidak sehat yang hanya 879 kasus atau 0,58 persen dari total perceraian tahun 2005. Perceraian gara-gara selingkuh juga 10 kali lipat dibanding perceraian karena penganiayaan yang hanya 916 kasus atau 0,6 persen.

Dan, data perselingkuhan itu diprediksi akan terus meroket. "Karena banyak tokoh yang melakukannya," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), Ratna Batara Munti.

"Selingkuh adalah fenomena tidak sehat bagi bangsa ini. Selingkuh itu zina," tandas Nasaruddin Umar, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag. Sayang, istilah selingkuh sendiri kerap diakronimkan 'selingan indah keluarga utuh', hingga banyak yang penasaran mencobanya. Padahal mereka Muslim dan Muslimah. Ironi!

Selingkuh Haram

Lafal selingkuh berasal dari bahasa Jawa yang artinya perbuatan tidak jujur, sembunyi-sembunyi, atau menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya. Dalam makna itu ada pula kandungan makna perbuatan serong.

Namun, lafal selingkuh di Indonesia muncul secara nasional dalam bahasa Indonesia dengan makna khusus "hubungan gelap" atau tingkah serong orang yang sudah bersuami atau beristri dengan pasangan lain.

Sehingga begitu bahasa Jawa selingkuh ini mencuat jadi bahasa Indonesia tahun 1995-an, langsung punya makna lain (tersendiri) yaitu hubungan gelap ataupun perzinaan orang yang sudah bersuami atau beristri. Ini satu perpindahan makna bahasa serta budaya bahkan ajaran.

Sebab menurut budaya Barat (bahkan hukum Barat), yang namanya zina itu hanya kalau sudah bersuami atau beristri, sedangkan jika masih bujangan atau suka sama suka, dianggap tidak. Itu sama sekali berlainan dengan Islam, karena ada zina muhshan (yang sudah pernah berhubungan badan karena nikah yang sah, hukumannya menurut Islam, dirajam/dilempari batu sampai mati) dan zina *ghairu muhshan* (belum pernah nikah, hukumannya dicambuk 100 kali dan dibuang setahun bagi lelaki, dan didera 100 kali bagi perempuan).

Sampai sekarang, lafal selingkuh lebih dekat kepada makna hubungan gelap antara orang yang sudah bersuami atau beristeri dengan pasangan lain. Kalau pacaran dianggap bukan selingkuh, tetapi kalau diam-diam ada pacar lain lagi, baru dianggap selingkuh. Ini semua makna-makna yang berkembang, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan syariat Islam karena Islam tidak memperbolehkan pacaran.

Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), selingkuh adalah: (1). Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong. (2) Suka menggelapkan uang; korup. (3) Suka menyeleweng.

Dilihat dari definisi itu, lafal selingkuh sekarang sudah mengalami perubahan makna, menjadi makna khusus, hubungan gelap bagi orang bersuami atau beristeri. Dan perbuatan itu dianggapnya lumrah. Padahal diharamkan menurut Islam

Pernikahan Ditinggalkan

Rusaknya moral kaum elite (*al-mutrafin)* adalah menyangkut selingkuh secara utuh, yaitu makna secara keseluruhan. Baik selingkuh yang maknanya korupsi, tidak jujur, serong maupun zina. Diadili saja tidak, apalagi dirajam, yaitu dibunuh dengan cara dilempari batu.

Kalau yang cerai gara-gara selingkuh saja tiap dua jam ada, lantas kalau mereka diadili, berarti tiap dua jam ada sepasang selingkuh yang bisa divonis mati dengan dirajam. Karena yang diseret ke pangadilan hanya yang korupsi, bukan yang berzina, maka suatu ketika lembaga ulama mengeluarkan semacam fatwa atau imbauan hanya menyangkut pemberantasan korupsi, bukan untuk mengadili yang berzina.

Kenapa separah ini? Karena, ada kekuatan-kekuatan jahat yang bersekongkol atau berkomplot yang merusak umat Islam Indonesia ini secara sistematis.

Antara lain melalui majalah porno (Playboy misalnya), film porno, situs porno, dll. Sedangkan aturan yang 'berbau' Islam terus diobrak-abrik. Seperti UU Perkawinan, tentang kebolehan poligami, diikuti dengan syarat yang ketat. Sebaliknya, bagi yang ingin zina, sarananya telah tersedia, sedang sistemnya tidak mempersoalkannya. Lebih dari itu justru perzinaan menjadi salah satu lahan pemasukan bagi pemerintah daerah atau orang-orang yang berbisnis maksiat.

Bahkan ketika kerusakan akibat perzinaan ini terjadi, seperti menjalarnya penyakit AIDS, pemerintah dan media menolong mereka dengan berbagai program indahnya. Seperti kondomisasi, kesehatan reproduksi, antidiskriminasi ODHA (orang dengan HIV/Aids), dll. Dianjurkanlah kondom, disebar gratis di lokasi maksiat. Merebaklan seks bebas.

Dan ketika seks bebas sudah menjadi budaya, ikatan suci pernikahan pun ditinggalkan. Ya, saat angka perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, pernikahan justru terus mengalami penurunan. Lembaga pernikahan tidak lagi menarik.

Jumlah pernikahan tahun 2005 lalu, bahkan hanya sedikit meningkat dibanding 1950-an, di saat jumlah penduduk baru 50 juta orang. "Jumlah pernikahan tahun 1950-an lalu sudah mencapai 1,4 juta, lho," kata peneliti ahli Litbang Departemen Agama, Moh Zahid (*Republika*, 7/1/07).

Kalau sudah begitu, malapetaka kehancuran keluarga, runtuhnya institusi pernikahan tinggal menunggu waktu. Semai generasi mujahid dalam keluarga pun terancam gagal. Ini jelas harus dihentikan!

Ingat, akronim selingkuh sebagai `selingan indah keluarga utuh', tidak pernah berlaku, karena sejatinya selingkuh adalah `selingan indah keluarga runtuh'. Untuk menghentikan itu, tegakkan hukum zina! Tegakkan Syariat Islam melalui Khilafah Islamiyah![] **kholda naajiyah**

Menumbuhkan Empati pada Anak

Anda pernah dibuat kesal karena egoisme yang tinggi pada anak? Ya, bagi seorang anak, konsep 'keakuan' atau 'egoistis' sangat menonjol. Dia sangat sulit diajak berbagi atau peduli dengan sekitarnya. Semisal meminjamkan mainan pada adik atau teman sebayanya. Bagaimana agar anak punya empati? Tidak mudah memang, melainkan butuh proses, keseriusan dan kedisiplinan dari orang tua untuk menumbuhkannya. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Berawal dari mendengar

Empati adalah merasakan perasaan orang lain. Latihan untuk menumbuhkan empati anak dimulai dengan mendengarkan perasaannya, mau mendengarkan anak. Anak akan merasa berharga sehingga ia pun akan belajar menghargai orang lain. Namun pada praktiknya, mendengarkan perasaan orang lain bukanlah hal yang mudah. Perlu latihan keras dari orang tua sebelum mampu melatih anak agar mampu mendengarkan perasaan orang lain.

Untuk mendengarkan anak maka bagi orang tua ada salah satu cara yaitu dengan menggunakan bahasa respek, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam setiap berkomunikasi dengan anak-anak. Beliau selalu mendengarkan perasaan mereka (bukan sekadar kata-kata) sambil membaca bahasa tubuh yang diajak bicara. Dalam setiap berdiskusi dengan anak, orang tua hendaknya menjaga kontak mata.

2. Kelola emosi anak

Orang tua hendaknya selalu membuatkan saluran emosi bagi anak. Jangan biarkan emosi tertumpuk menjadi lapisan-lapisan yang kian hari semakin tebal. Marah, sedih, kecewa, bukanlah sesuatu yang haram. Yang penting bagaimana anak diajarkan untuk menyalurkan kemarahan dengan cara benar.

Saat anak emosi, orang tua harus mampu mengalihkan perhatian anak pada hal-hal dan kegiatan yang disukai anak dengan tetap mendengarkan dan menghargai perasaannya. Setelah itu ajaklah anak untuk bisa memahami perasaan dan kondisi lain di luar dirinya.

3. Orang tua sebagai teladan

Tak mungkin orang tua menuntut anak memahami perasaan orang lain sebelum mereka bisa lebih dulu memahami perasaan anak. Tanpa keteladanan suatu nasihat tidak akan mampu mengubah anak, bagaimana bisa merasakan penderitaan orang lain, bila orang tuanya sendiri tidak berusaha untuk memahami perasaan anak.

4. Penghargaan bukan sogokan

Dalam proses menuju pembentukan perilaku, anak memang membutuhkan rangsangan, begitu pula dalam mengasah empatinya. Anak-anak butuh rangsangan agar mampu terpacu untuk berbuat baik. Rangsangan pada anak umumnya diberikan dalam bentuk hadiah, namun hati-hati, jangan sampai hadiah terkesan sebagai 'sogokan'.

Sogokan adalah iming-iming pemberian agar anak mau berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Penekanannya didasari pada mau tidaknya anak berbuat. Sementara hadiah adalah pemberian karena prestasi kebaikan tertentu yang diwujudkan atas dasar cinta dan sayang. Hadiah dianjurkan Rasulullah yang pernah mengingatkan pada sahabat-sahabatnya untuk selalu ber-*tahaddu tahabbu*, artinya saling memberi hadiah supaya saling mencintai. Jadi tujuan memberikan hadiah kepada anak adalah untuk membuatnya gembira dan merasa disayang. Idealnya orang tua sudah sejak jauh hari menyiapkan hadiah untuk anak. Hadiah ini diperlukan terutama pada tahap pertama di saat anak masih kecil. Setelah anak semakin besar atau tumbuh dewasa, hendaknya hadiah dikurangi bertahap dengan cara bijak.[] **kholda**

Konsultasi

Mengasuh Anak Tanpa Stres



Diasuh oleh:
Dra (Psi) Zulia Ilmawati

Assalamu'alaikum Wr Wb

Ibu Pengasuh Rubrik Konsultasi Keluarga, saya sering mendengar, banyak orang tua yang mengeluhkan betapa sulit mengasuh anak di masa sekarang ini. Apalagi jika tidak sekadar ingin mendapatkan anak yang pintar, tetapi juga shalih. Bukan saja sikap anak-anak sekarang yang memang lebih berani dan agak "sulit" diatur, tetapi juga tantangan globalisasi budaya, informasi dan teknologi yang turut andil dalam mewarnai sikap dan perilaku anak. Repot, capek, dua hal ini yang sering terucap oleh para ibu ketika sudah merasa jenuh dengan anak-anak. Apalagi bila anak sudah mulai bertindak semaunya. Apakah keadaan yang demikian ini dapat menimbulkan stres untuk para orang tua khususnya ibu? Bagaimana mencegah-nya? Jazakillah untuk penjelasannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mila
Bandung

Wa'alaikumsalam Wr Wb

Mila yang baik,

Stres merupakan reaksi tubuh pada seseorang akibat berbagai persoalan yang dihadapi. Masalah anak-anak merupakan salah satu persoalan yang sangat memungkinkan dapat menimbulkan stres. Gejala-gejala stres antara lain bisa berupa kelelahan, kemurungan, kelesuan, kehilangan atau meningkatnya nafsu makan, sakit kepala, sering menangis, sulit tidur atau malah tidur berlebihan. Stres akan mengubah cara kerja sistem kekebalan tubuh, menurunkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Banyak penelitian yang menemukan adanya kaitan sebab-akibat antara stres dengan penyakit, seperti jantung, gangguan pencernaan, darah tinggi, maag, alergi, dan beberapa penyakit lainnya.

Mila yang baik,

Masalah anak-anak sangat mungkin bisa menjadi sumber stres. Maka dari itu, orang tua khususnya ibu harus punya cara bagaimana agar terhindar dari stres ini. Karena kalau sampai terjadi stres, proses pengasuhan dan pendidikan pada anak tentu tidak akan berjalan dengan baik. Untuk menghindari itu semua, hal pertama yang mesti dipahami betul oleh para orang tua adalah tentang kedudukan anak dalam Islam. Anak adalah amanah sekaligus ujian dari Allah SWT. Sebagaimana amanah maka harus dididik dan diasuh dengan baik. Ujian yang diberikan lewat anak sangat beragam. Ketika ajaran Islam tentang anak dapat dipahami dengan baik, maka *Insya Allah*, para orang tua akan dapat mendidik dan mengasuh anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.

"Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, sedang kalian mengetahui. Ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar". (QS. Al-Anfal: 27-28)

Mila yang baik,

Setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Banyak orang tua yang kurang memahami hal ini. Ketidaktahuaan tentang tumbuh kembang anak sesuai usia, bisa menimbulkan tekanan. Apalagi jika orang tua terlalu ambisius dalam menuntut hasil bukan proses. Mengasuh dan mendidik anak memang tugas utama ibu, tapi diperlukan juga kerja sama untuk meringankan tugasnya. Sekali waktu ayah membantu atau mengambil alih pekerjaan rumah dan anak-anak dengan mengajak orang-orang terdekat yang bisa diminta bantuannya. Jika mempunyai anak yang relatif lebih besar, dapat ditanamkan pengertian pada mereka untuk ikut membantu mengelola tugas rumah tangga sehari-hari. Ajarkan prinsip kerja sama dan tanggung jawab sejak dini pada anak, agar ia terbiasa bersikap mandiri, berinisiatif dan dapat diandalkan.

Mila yang baik,

Mengunjungi atau berbagi pengalaman dengan para ibu yang sukses dalam melakukan pengasuhan terhadap anak-anak akan sangat membantu. Dengan bertukar pengalaman *Insya Allah* bisa saling menguatkan dan akan ditemukan banyak cara yang bisa dikembangkan dalam menangani masalah anak. Sikap sabar juga merupakan cara mengatasi stres yang jitu. Jika tidak dengan kesabaran, bagaimana mungkin akan sanggup menghadapi setiap masalah anak-anak dengan baik dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Sabar disertai dengan niatan ikhlas hanya semata-mata untuk mencari ridlo Allah SWT akan menjadi energi yang luar biasa. Maka, seberat apapun beban dan ujian yang diberikan lewat anak-anak, Insya Allah akan dapat dihadapi dengan ringan. Selain sabar, bertawakallah pada Allah SWT. Tak ada masalah yang tidak ada penyeselesaian. Begitu pula dengan persoalan anak-anak. Dan jangan lupa, berdoalah selalu minta bantuan Allah SWT dalam menyelesaikan masalah anak-anak. Kadang kita sudah berusaha optimal untuk memperlakukan dan memberikan yang terbaik. Tetapi sejatinya hanya Allah jualah yang membukakan mata, hati dan pikiran anak-anak kita untuk mau mengerti seperti yang kita inginkan.[]



Diasuh Oleh:
Ust M Shiddiq Al Jawi

Denda Karena Terlambat Bayar Utang, Bolehkah?

Tanya :

Ustadz, apa hukumnya denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang?

Jawab :

Dalam fiqih kontemporer denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang disebut *al-gharamat at-ta`khiriyah* atau *al-gharamat al-maliyah*. (Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *Maa Laa Yasa'u at-Tajir Jahlahu*, hal. 279 & 335; Ali as-Salus, *Mausu'ah Al-Qadhaya al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, hal. 458).

Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan. Yang membolehkan antara lain berdalil dengan sabda Nabi SAW, *"Tindakan menunda pembayaran utang oleh orang kaya adalah suatu kedzaliman."* (HR Bukhari). Juga sabda Nabi SAW, *"Tindakan orang mampu [menunda pembayaran utangnya] telah menghalalkan kehormatannya dan sanksi kepadanya."* (HR Ahmad, Abu Dawud, Nasa`i, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Menurut pihak yang membolehkan, hadits ini menjadi dalil jika orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapatkan hukuman, termasuk hukuman denda. Namun mereka menetapkan dua syarat. *Pertama*, denda ini tidak boleh disyaratkan di awal akad, untuk membedakannya dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*). *Kedua*, denda ini hanya dikenakan bagi yang mampu, tak berlaku bagi yang miskin atau dalam kesulitan. (QS Al-Baqarah: 280). (Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *ibid.*, hal. 337).

Sedang pihak yang mengharamkan berdalil denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah (*riba nasi`ah*), yaitu tambahan dari utang yang muncul karena faktor waktu/penundaan. Padahal justru riba inilah yang diharamkan saat Alquran turun (QS Al-Baqarah: 275). Maka apapun namanya, ia tetap riba, baik diambil dari orang yang mampu atau tidak, baik disyaratkan di awal akad atau tidak. (Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *ibid.*, hal. 338).

Pendapat yang rajih adalah yang mengharamkan. Alasannya: *Pertama*, meski orang mampu yang menunda pembayaran utang layak dihukum tapi tak pernah ada sepanjang sejarah Islam seorang pun *qadhi* (hakim) atau *fuqaha* yang menjatuhkan hukuman denda. Padahal kasus semacam ini banyak sekali terjadi di berbagi kota di negeri-negeri Islam. Jumhur *fuqaha* berpendapat hukumannya adalah *ta'zir*, yaitu ditahan (*al-habs*) meski sebenarnya boleh saja bentuk *ta'zir* lainnya. (Abdullah Mushlih & Shalah Shawi, *ibid.*, hal. 338; Ali As-Salus, *ibid.*, hal. 449).

Hal itu karena sudah maklum bahwa pemberi utang hanya berhak atas sejumlah uang yang dipinjamkannya, tidak lebih. Baik ia mendapatkannya tepat pada waktunya atau setelah terjadi penundaan. Tambahan berapa pun



yang diambilnya sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran tiada lain adalah riba yang diharamkan. (Ali As-Salus, *ibid.*, hal. 449).

Kedua, denda karena terlambat membayar utang mirip dengan riba, maka denda ini dihukumi sama dengan riba sehingga haram diambil. Kaidah fiqih menyebutkan: *Maa qaaraba al-syai'a u'thiya hukmuhu* (Apa saja yang mendekati/mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu). (M. Shidqi Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, 9/252). Kesimpulannya, menjatuhkan denda karena terlambat membayar utang atau angsuran utang hukumnya haram karena termasuk riba. *Wallahu a'lam*.[]



Andai Penyidikan Terorisme Diterapkan Pada Gayus

Oleh: **Mahendradatta,** Ketua Dewan Pembina TPM



Gayus memang fenomenal. Bagai-mana tidak, ia mampu keluar masuk rumah tahanan sebanyak 68 kali. Dan itu bukan sembarang rumah tahanan, tapi rumah tahanan Markas Komando Brigade Mobil Polri.

Selama ini kita tahu bahwa rumah tahanan Mako Brimob itu sangat ketat. Jangankan bisa keluar masuk, hanya untuk menerima penjenguk saja sama sekali tidak mudah. Contoh kasus, sekadar bertemu dengan perempuan lemah yang tertembak kakinya, Putri Munawarroh, harus melalui sekian banyak izin sampai ke tingkatan jenderal.

Maka sungguh aneh, Gayus bisa keluar masuk dengan mudah, bahkan dikawal aparat kepolisian. Karenanya, tidak mungkin Gayus melalukan itu hanya sekadar *dibekingi* seorang mayor polisi alias komisaris polisi (Kom-pol)—pangkat seorang perwira menengah pertama. Seorang yang setara mayor, hirarkinya tergolong rendah. Masih banyak orang berpangkat tinggi di atasnya.

Kalau seorang tahanan karena sakit dan harus pergi ke rumah sakit, ini wajar. Tapi jika sampai pergi ke luar negeri dengan melenggang, pasti ada apa-apanya. Ini benar-benar memalukan dan memuakkan. Dan yang lebih dari itu adalah ketika para kepolisian berusaha mencari alasan-alasan pembenar seolah-olah ingin mengurangi tingkatan yang terlibat. Maka muncullah calo paspor sebagai tersangka dalam kaburnya Gayus ini.

Secara logika saja, calo paspor tidak mungkin berani banyak bermain. Toh, bukankah mereka tahu siapa yang dibuatkan paspornya itu? Tetapi fakta seperti ini sengaja dibelokkan sedemikian rupa dengan berbagai berita yang simpang siur. Dikatakan bahwa paspor itu asli tapi palsu. Kalau palsu kok bisa masuk ke negara lain? Kok demikian meremehkan Singapura, Kuala Lumpur, dan Makau? Padahal ketiga kota besar di tiga negara tersebut memiliki teknologi yang jauh lebih canggih dari Indonesia.

Kalau paspor palsu pasti ketahuan. Paspor itu pencetakannya khusus. Mengapa ini bisa dibuat tanda-tangan palsu atas nama Soni Laksono yang berkaca mata dan rambut hampir menutupi kening? Bukankah mereka juga punya data lengkap secara online, baik nasional maupun internasional?

Singapura, Malaysia, dan Cina tidak peduli kepada Gayusnya, tetapi hanya peduli dari data yang disetor oleh pemerintah Indonesia. Jadi tidak sekadar melihat paspor. Setiap kantor imigrasi di seluruh dunia memiliki data orang Indonesia yang punya paspor. Itulah sebabnya paspor itu tinggal digesek. Apalagi sekarang ada sistem baru dengan sistem *key paspor*, biometrik. Jadi kalau ada paspor dengan dua identitas yang berbeda tetapi bersidik jari sama bakal langsung terdeteksi dan orang yang memegang paspor itu bisa langsung ditahan. Lantaran dalam paspor, selain merekam foto merekam sidik jari juga.

Seharusnya media massa di Indonesia berani mengirim surat ke kantor imigrasi negara tujuan Gayus. Perlu dipertanyakan, apakah Soni Laksono dengan Gayus Tambuhan, nomor sekian ini paspornya sama? Jawabannya pasti berbeda. Karena dalam paspor Soni Laksono itu sidik jari orang. Gayus tidak pernah datang ke Kantor Imigrasi. Jadi jelas Gayus tidak mungkin masuk negara orang memakai nama Soni Laksono.

Ada yang lebih praktis lagi untuk menembus ketiga negara tersebut yakni dengan menggunakan paspor diplomatik. Dengan paspor diplomatik, orang tidak akan diperiksa. Itu hanya berdasarkan kepercayaan dari pemerintah dengan pemerintah (G to G). Dan yang mengeluarkan paspor diplomatik ini adalah Kementerian Luar Negeri. Maka Kementerian Luar Negeri pun harus dicek. Jadi pencarian orang yang terlibat dengan pelesirannya Gayus ini tidak boleh berhenti kepada calonya saja.

Inilah bedanya dengan kasus terorisme. Dalam terorisme yang berbuat satu orang, tapi dikait-kaitkan sampai entah ke mana. Kasus perampokan CIMB Niaga sebagai contoh. Itu dikait-kaitkan sampai tidak terkait. Sampai akhirnya dengan tidak malu-malu mengatakan, "Pernah mendengarkan ceramah Abu Bakar Baasyir."

Maka bila pola penyidikan terorisme diterapkan dalam kasus Gayus, efektif. Karena modelnya mengait-kaitkan semua jaringan, kalau perlu sampai ke luar negeri. Terorisme bisa dihubungkan sampai jauh-jauh ke Al Qaida (Afghanistan). Sedangkan Gayus cuma sampai Makau, Cina. Ini jelas sangat diskriminatif.

Akan sangat mantap bila penanganan terorisme diterapkan dalam penanganan korupsi. Dengan pola penyidikan terorisme maka kasus Gayus ini sudah terungkap. Apalagi yang menyidik Densus 88, Bakrie pasti bisa kena karena memang sudah sangat jelas dan terang benderang, bahwa salah satu penyumbang Gayus adalah group Bakrie. *Wong,* yang gelap dan tidak terkait saja bisa ditangkap dan ditembak di tempat *kok*.

Tetapi mengapa untuk kasus yang jauh lebih berbahaya dari terorisme dan perkaranya terang benerang kok tidak tuntas? Padahal tingkat kebahayaannya lebih besar ketimbang terorisme. Korupsi adalah 'bom' bagi sistem ini. Sistem bisa bolong, dan bocor. Tindakan itu yang menyebabkan rakyat itu menjadi *anak ayam yang mati di lumbung (yang penuh) padi*.

Aparatur yang tidak dapat dipercaya itu masih lebih baik daripada sistem yang korup. Dalam sistem yang korup itu berlaku, "kalau mau melakukan korupsi siapkanlah bawahan untuk menerima akibatnya." Jadinya, yang kena hukuman ya hanya bawahan dan dibatasi hanya sampai tingkatan tertentu. Sehingga para atasan ini tidak akan pernah jera untuk korupsi.

Brasil dan Argentina pernah hancur gara-gara sistemnya korup. Uang Brasil dan Argentina tidak berlaku di dunia itu gara-gara sistemnya korup. Kalau uang itu tidak berlaku di negara lain itu artinya negara tersebut tidak dipandang sama sekali oleh negara lain. Karena dalam masyarakat kapitalistik seperti ini penghargaan kepada suatu negera itu dilihat dari nilai tukar mata uang. Tampaknya Indonesia sedang menapaki jalan kehancuran kedua negara tersebut.[]

Redaksi menerima opini dari Anda sebanyak 3500 karakter. Sertakan foto dan identitas Anda.
Kirim ke: **pembaca.tabloidmu@gmail.com**

Krisis Tunisia: Gelombang Revolusi Mangancam?

Dengan kepergian Ben Ali, apa yang terjadi kemudian dengan Tunisia?

Mantan Presiden Tunisia, Zine al-Abidine Ben Ali, telah tiba di Saudi Arabia setelah dipaksa mundur karena gelombang unjuk rasa anti pemerintah. Kantor berita *Reuters* melaporkan bahwa Ben Ali dan keluarganya sudah tiba di kota pelabuhan Jeddah.

Kantor berita resmi Saudi Arabia (SPA) melaporkan bahwa pemerintah Kerajaan Saudi Arabia menyambut kedatangan Ben Ali dan keluarganya dan menyatakan dukungan mereka terhadap rakyat Tunisia. Gelombang unjuk rasa anti pemerintah dan kekerasan polisi menyapu Tunisia pekan lalu ini dan mengakibatkan Ben Ali mengundurkan diri dari jabatannya

Demonstrasi yang dimulai pada pertengahan Desember 2010 ini mempermasalahkan korupsi, inflasi dan pengangguran. Kekerasan terjadi setelah bunuh diri yang dilakukan oleh seorang lulusan universitas yang membakar dirinya karena polisi menyita sayur-mayur yang menurut pihak berwajib dijualnya tanpa izin. Ratusan orang diduga tewas oleh pasukan keamanan.

Sebelum meninggalkan Tunis, Ben Ali membubarkan pemerintahannya dan menyatakan keadaan darurat. Pertemuan umum dilarang dan pasukan keamanan diizinkan menembak perusuh. Militer telah menutup bandar udara dan menutup wilayah angkasa Tunisia tidak lama sebelumnya.

Pemerintahan Ben Ali, yang awalnya bereaksi dengan menentang demonstrasi semacam itu, terkejut melihat tingginya penentangan publik terhadapnya. Ben Ali, selama ini merupakan seorang diktator tulen, tidak mengizinkan adanya oposisi di dalam negeri.

Dunia internasional pun terkaget-kaget dengan perkembangan di Tunisia, termasuk Amerika Serikat dan Prancis yang selama ini mendukung Ben Ali. Termasuk mendukung tindakan represifnya, pelarangan jilbab, dan serangan terhadap Islam.

Media-media Barat, yang biasanya melaporkan pemberontakan-pemberontakan populer – seperti yang terjadi di Iran dan Burma – dengan gegap gempita, anehnya pada saat ini menjadi kurang bergairah. Mereka tampaknya tidak yakin apakah pemberontakan ini baik atau buruk. Mereka masih ragu apa yang terjadi jika sekutu Barat yang sekuler itu jatuh!

Jatuhnya Ben Ali menjadi bahan pembicaraan di dunia Arab yang sebagian besar pemerintahnya represif. Sebagaimana yang ditulis oleh seorang komentator di surat kabar *the Washington Post*, yakni ancaman terbesar Amerika di Timur Tengah bukanlah peperangan, melainkan adalah revolusi. Kemarahan publik atas korupsi, pengangguran dan kediktatoran terjadi di Mesir, Aljazair, dan banyak negara di wilayah itu.

Salah seorang duta besar di Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, yang tidak bersedia disebut namanya, mengatakan banyak anggota Dewan berharap semua negara Afrika dapat menjadikan peristiwa di Tunisia sebagai pelajaran karena apa yang terjadi di Tunisia mungkin akan dialami para diktator di negara-negara lain.

Dalam pernyataannya, Dewan itu mendesak para pemimpin sementara Tunisia agar segera menyelenggarakan pemilu untuk memilih pengganti Presiden Ben Ali. Kekuasaan pemimpin otoriter itu mendadak berakhir hari Jumat ketika ia melarikan diri ke Arab Saudi karena menghadapi demonstrasi sebulan penuh terkait masalah pengangguran dan naiknya harga-harga pangan.

Ben Ali berkuasa selama 23 tahun sejak tahun 1987. Sebelum Ben Ali, Presiden Habib Bourgiba, presiden yang juga tidak populer yang telah memerintah selama lebih dari 30 tahun dipaksa untuk meninggalkan jabatannya. Dia digantikan oleh salah satu lingkaran orang dalam - Zine al-Abidine Ben Ali. Demikian pula hari ini, Perdana Menteri Ghannouchi, berasal dari lingkaran orang dalam Ben Ali, yang menggantikan Ben Ali. Rakyat Tunisia tidak puas dengan penunjukan orang dekat Ben Ali.

Tumbangnya diktator Tunisia menunjukkan, rezim represif yang menindas rakyat tidak akan bertahan. Namun dunia Muslim membutuhkan perubahan dari demokrasi kediktatoran yang saat ini berjalan, kepada sistem Khilafah Islam. Alternatif yang nyata atas status quo di seluruh dunia Islam ada-lah sistem Khilafah Islam - yang akan memenuhi kebutuhan rak-yat, bertanggung jawab, tidak bergantung pada Barat. Khilafah Islam juga akan memulihkan stabilitas dan kemakmuran di wilayah tersebut.[] **farid wadjdi** *dari berbagai sumber*

Seruan Khilafah di Krisis Tunisia

Seruan khilafah menggema saat krisis Tunisia. Meskipun nyaris tidak diekspos oleh media asing, sebuah video menunjukkan di antara para demonstran saat krisis Tunisia terdapat sekelompok umat Islam yang menyerukan Khilafah (www.hizb.org.uk). Sebelum pawai dimulai, pembicara utama mengingatkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Muslim untuk tidak merusak pohon bahkan dalam kondisi perang, Islam juga melarang merusak barang-barang milik orang lain. Terdapat seruan yang tegas menyerukan perjuangan non kekerasan yang berdasarkan Islam.

Beberapa slogan disuarakan dengan tegas oleh para demonstran: "Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain! Khilafah adalah satu-satunya solusi ", “Dengan jiwa kita, dengan darah kita, kita siap berkorban untuk Islam ". Hal ini menunjukkan para demonstran siap menghadapi petugas keamanan dengan keyakinan mereka.

Saat berdiri di depan tentara Tunisia mereka pun berpidato: “Wahai tentara Muslim, di mana Anda di Palestina? Di mana Anda di Irak? Lepaskanlah rantai penguasa yang membelengu leher Anda! Hai pasukan Muslim, kami siap bersama Anda, dengan darah, jiwa, dan anak-anak kami! Hapuskan rezim yang menindas dan dukunglah pemimpin yang satu untuk semua kaum Muslimin!

Khilafah bukanlah hal asing bagi masyarakat Tunisia yang mayoritas Islam. Kejayaan wilayah Tunisia justru terjadi di masa Khilafah. Tentara Muslim di bawah komando Uqba bin Nafi untuk pertama kalinya melakukan ekspedisi futuhat ke wilayah Maghrib (Maroko) pada 670 M. Lima tahun kemudian, pasukan tentara Islam membangun basis pertahanan dan sebuah masjid pertama di kota Kairouan. Pasukan tentara Muslim yang dipimpin Hasan bin Al-Nu'man mampu menguasai kota Tunis dan seluruh wilayah Maghrib pada 705 M.

Puncak kejayaan kota Tunis berlangsung di era kekuasaan Dinasti Hafsiah. Pada masa itu, di Tunis berdiri sebuah perguruan tinggi pertama di Afrika Utara. Di awal abad ke-13 M, Tunis sebuah kota yang berada di wilayah Maghrib mencapai puncak kejayaannya. Ibu kota kekhalifahan Muslim di bagian Utara 'benua hitam' itu, sempat menjelma sebagai metropolis kaya raya. Kemajuan yang dicapai Tunis dalam bidang ekonomi, kebudayaan, intelektual, serta sosial tak ada yang mampu menandinginya pada era itu.

Tunis merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah peradaban Islam di Afrika. Betapa tidak, dari kota inilah ajaran Islam bisa menyebar hingga ke Sicilia sebuah provinsi otonom di Italia. Pamornya semakin berkilau seiring berdirinya madrasah Al-Zaituna di kota itu, perguruan tinggi pertama di Afrika Utara. Tunis telah melahirkan seorang ilmuwan Muslim terkemuka sepanjang masa, Ibnu Khaldun.

Pada era kejayaan Almohad, ilmu pengetahuan berkembang pesat di wilayah Maghrib. Salah seorang sarjana terkemuka pada era itu, Abu Yusuf Yakub, membangun sejumlah perpustakaan di Tunis dan wilayah Maghrib lainnya. Dinasti ini juga mendukung aktivitas para sarjana Muslim, seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu arsitektur peninggalan dinasti ini adalah bangunan Giralda of Seville.

Tunis pun menjadi kota yang berpengaruh. Kota itu berkembang menjadi kota perdagangan dan ilmu pengetahuan. Para pedagang dari Venesia dan berbagai belahan dunia lainnya datang ke Tunis untuk berniaga. Kemakmuran yang dicapai kota Tunis masih dapat disaksikan pada abad akhir awal abad ke-16 M. Seorang pelaut dari Turki, Pipi Reis, dalam catatan perjalanannya melukiskan kemegahan dan keindahan kota itu. Menurut Reis, di kota itu berdiri sekitar 5.000 rumah yang gaya arsitekturnya meniru istana kerajaan. Sepanjang kota itu dihiasi dengan kebun dan taman nan indah.[] **fw dari berbagai sumber**

Masjid Montreal

Mencari Masjid di Lingkar Kutub

Pasti Anda pernah mendengar pertanyaan, "Bagaimana shalat di daerah kutub yang panjang siangnya atau malamnya berbulan-bulan?" Mungkin ustadz yang ditanya akan menjawab, "Ah di sana tidak ada manusia, atau minimal tidak ada Muslimnya".

Salah fatal. Saat ini di kutub utara ada Muslim, dan ada masjid! Masjid yang diresmikan 21 September 2010 ini berada di kota Inuvik, Kanada, yang posisinya 68°20' Lintang Utara, 133°25 Bujur Barat. Seperti kita ketahui, kutub utara dimulai dari lintang 66° 33′ 44″.

Masjid paling utara di bumi akan menjadi rumah ibadah bagi sekitar 100 lebih kaum Muslim di antara 3.200 penduduk. The Zubaidah Tallab Foundation, sebuah lembaga amal Islam di Manitoba, mengumpulkan dana hampir $ 300 ribu untuk membangunnya di Winipeg dan mengapalkan masjid itu ke Inuvic sejauh hampir 4000 Km.

Kanada sendiri adalah sebuah negeri yang amat



Bangunan masjid di atas trailer, sebelum naik kapal.

luas (luas daratannya lima kali Indonesia, tetapi sebagian besar adalah padang tundra di wilayah kutub!), dan hanya berpenduduk 32,8 juta, sedang Muslimnya hanya sekitar 784.000 jiwa atau sekitar 2,5



Perpustakaan Islamic Studies McGill University

persen. Tentu saja tidak semua mempraktikkan Islam, sebagian adalah "Muslim kultural".

Komunitas Muslim di Kanada adalah setua bangsa Kanada itu sendiri. Empat tahun setelah berdirinya tahun 1867, sensus menemukan 13 Muslim di Kanada. Masjid pertama berdiri di Edmonton 1938, di mana ada 700 Muslim. Sekarang masjid ini bagian dari museum Fort Edmonton Park. Setelah 1960-an, jumlah Muslim meningkat pesat, setelah ada imigrasi besar-besaran dari Timur Tengah.

Dibandingkan Muslim di Eropa, Muslim di



Kota Inuvic

Kanada tidak mendapatkan masalah seberat Muslim di Eropa – yang pernah mengalami trauma Perang Salib, meski akhir-akhir ini menguat pula masalah integrasi sebagian Muslim yang memakai cadar dengan *mainstream*. Secara umum Muslim Kanada hanyalah salah satu kelompok etnis, ras atau agama yang bersama-sama membentuk Kanada.

Kota dengan populasi Muslim terbesar adalah Montreal. Ada 12 masjid di Montreal, dan secara berkala mereka melakukan "Montreal Open Door Mosques". Selain itu terdapat juga "masjid kagetan" di kampus, seperti di McGill University. Di universitas ini terdapat pusat studi Islam yang banyak dijadikan tempat S2 dan S3 dosen-dosen UIN dari Indonesia. Perpustakaan di sini memiliki koleksi buku yang sangat lengkap. Tidak cuma buku-buku Islam berbahasa Arab dan Inggris, tetapi yang berbahasa

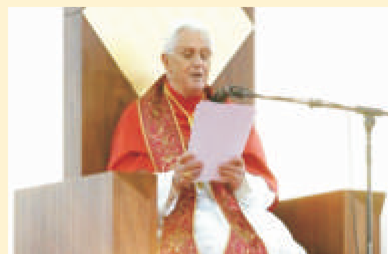


Sholat Jum'at di "masjid kagetan" kampus McGill

Urdu, Persi, Turki atau Indonesia juga banyak. Hanya sayang, mainstream pemikiran yang berkembang di McGill adalah Islam liberal.[] **fahmi amhar**

Kronik Mancanegara

Paus Intervensi Urusan Negeri Islam



Pemimpin Gereja Katolik, Benediktus XVI dalam pidato tahunannya untuk para diplomat yang ditugaskan di Vatikan, pada 9/1/2011, menekankan masalah kebebasan beragama di negeri-negeri Islam. Ia berkata: "Pemerintah di Timur Tengah wajib melindungi minoritas Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut. Hal ini penting menyusul serangan terhadap gereja-gereja di Mesir dan Irak."

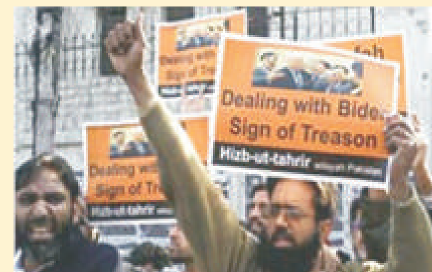
Pernyataan yang dibuat oleh Benediktus XVI, Pemimpin Gereja Katolik ini merupakan intervensi secara langsung terhadap urusan negeri-negeri Islam. Padahal ia tahu apa yang terjadi di negeri-negeri Islam, serta penderitaan yang sedang dialami oleh kaum Kristen tidak lain adalah akibat dari ulah negara-negara penjajah yang diakui sebagai negara-negara Kristen. Dan negara-negara inilah yang telah menjajah negeri-negeri kaum Muslim, serta yang menciptakan situasi buruk di negeri ini.[]

Kaum Kristen di Irak Tuntut Provinsi Sendiri

Dewan Kristen Kasdim Syria Assyria di Irak pada 10/10/2011 menyelenggarakan pertemuan di Baghdad. Pertemuan ini menyerukan pembentukan provinsi baru, khusus kaum Kristen di dataran Nineveh, Iraq Utara. Yondam Yousef, Ketua Gerakan Demokratik Assyria, yang melakukan pertemuan itu mengatakan: "Kami menginginkan provinsi yang perbatasannya berada di daerah dengan mayoritas umat Kristen, yaitu provinsi di dataran Nineveh, dan menjadi bagian dari pemerintah pusat di Baghdad." Ia juga menuntut pemerintahan otonomi bagi umat Kristen di wilayah Kurdistan.

Umat Kristen di Irak berusaha membentuk provinsi atau wilayah Kristen yang menjadi bagian dari negara Irak. Sehingga jika ada kesempatan di masa yang akan datang, maka mereka akan mendeklarasikan sebuah negara merdeka, atau bisa jadi digabungkan dengan wilayah lainnya. Tentu saja dengan bantuan negara-negara kolonialis. Semua tidak lain adalah sebuah langkah untuk merobek Irak, dan membuat sarang-sarang kolonialis melalui Imarah (wilayah kekuasaan) Salibis.[]

Hizbut Tahrir Pakistan Tolak Kunjungan Biden



Surat kabar Pakistan "The News", Rabu 12/1/2011 mempublikasikan aksi demontrasi Hizbut Tahrir secara serentak di semua kota besar di Pakistan. HT Pakistan menolak kunjungan Wakil Presiden Amerika, Joe Biden ke negara itu. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan yang berisi penolakan atas penambahan pasukan Amerika di Pakistan.

Mereka juga memperingatkan tujuan kunjungan Biden adalah untuk menekan para penguasa Pakistan agar meningkatkan pembantaian kaum Muslim lewat tentara Pakistan yang juga Muslim. Surat kabar tersebut mengutip dari anggota Hizbut Tahrir dalam demonstrasi itu yang memperingatkan tidak mungkin mencapai perdamaian di Pakistan selama Pasukan Khusus Amerika dan unsur-unsur Perusahaan "Black Water" masih bercokol di wilayah Pakistan.[]

Blackwater Akan 'Amankan' Tepi Barat



Pemerintah AS telah menyerahkan kontrak baru untuk sebuah perusahaan erat yang terkait dengan perusahaan keamanan bekas Blackwater, yang terkenal karena membunuh warga sipil Irak dengan sewenang-wenang. Kontrak keamanan selama lima tahun diberikan oleh Departemen Luar Negeri AS ke *International Solutions* (IS) yang bernilai lebih dari 84 juta dolar.

Larry Birns, anggota Dewan, mengatakan mereka (*Xe Services*) memiliki sejarah berdarah karena banyak warga sipil tewas di tangan mereka, serta segala macam kejadian buruk yang terjadi akibat ulah mereka. Blackwater menjadi identik dengan semua kejahatan dan prosedur kebijakan yang tidak tepat dalam melakukan operasi. "Skandal mereka terlalu banyak." Ujar Birn. Walaupun banyak bermasalah dalam hukum, setidaknya 90% dari pendapatan yang dilaporkan oleh perusahaan Blackwater berasal dari kontrak dengan pemerintah AS.[] **fw dari berbagai sumber**

Menyiapkan Bekal Untuk 'Hari Esok'

Di dalam Alquran Allah SWT berfirman (yang artinya): *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok; bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengawasi apa saja yang kalian lakukan* (TQS al-Hasyr [59]: 18).

Imam Ali ash-Shabuni, di dalam kitab tafsirnya, *Shafwah at-Tafasir*, saat menafsirkan ayat tersebut menjelaskan antara lain tiga hal penting. *Pertama*: *Bertakwalah kepada Allah*, maknanya adalah takut kepada Allah dan merasa khawatir dengan azab-Nya, dengan cara menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Berdasarkan penjelasan Imam ash-Shabuni ini, berarti tak ada gunanya klaim bahwa kita takut kepada Allah dan azab-Nya jika kita tidak melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sebab, iman sendiri, sebagaimana sabda Baginda Nabi SAW bukan sekadar pengakuan di mulut dan pembenaran di kalbu tapi butuh pembuktian dalam amal perbuatan.

Kedua: *Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari esok*, maknanya adalah: hendaklah setiap orang memperhatikan *amal shalih* apa yang telah dia perbuat untuk bekal menghadapi Hari Kiamat.

Apa yang disebut dengan amal shalih? Amal shalih adalah seluruh amal kebajikan yang menurut para ulama harus memenuhi tiga syarat: (1) Dilandasai oleh iman kepada Allah SWT. Dengan demikian, amal apapun yang dalam pandangan manusia dianggap baik (misal: gemar menolong sesama, dermawan, dll) tidak disebut sebagai amal shalih di mata Allah SWT selama pelakunya adalah kafir. Allah SWT menyamakan amal-amal orang kafir ini seperti fatamorgana alias tak berbekas sama sekali. (2) Didasari niat semata-mata ikhlas karena Allah SWT. Cirinya antara lain: tidak riya dan *sum'ah* (berharap pujian dari manusia) serta beramal dengan amal yang terbaik kualitasnya. Ikhlasnya shalat seseorang, misalnya, selain tidak disisipi sikap riya dan *sum'ah*, tampak dari kualitas shalatnya: khusyu' dan *khudhu'* (tunduk/merendahkan diri) saat shalat, tuma'ninah, tidak tergesa-gesa, bacaannya tartil, dll. Dakwah yang ikhlas, misalnya, adalah dakwah yang selalu disiapkan dengan optimal dan direncanakan dengan matang; tegas dan lurus dalam penyampaian (*qawl[an] sadid[an]/*tidak samar dalam menyatakan halal-haram); didasarkan pada *hujjah* yang haq, dengan tutur kata yang baik, didasarkan rasa cinta (bukan kebencian) kepada yang didakwahi, dll. (3) Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yakni tatacara (*kayfiyah*)-nya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh beliau, kecuali dalam hal yang terkait dengan *uslub* dan *wasilah*. Semua amal kebajikan—seperti shalat, shaum, zakat, haji, mencari nafkah, bersedekah, menuntut ilmu, berdakwah, melakukan amar makruf nahi munkar, berjual beli, berpolitik, mengurus rumah tangga dan keluarga, mengurus rakyat, dll—bisa dikategorikan sebagai amal shalih jika memenuhi kriteria di atas. Semua amal shalih itu adalah bekal seseorang untuk menghadap Allah SWT pada Hari Akhir nanti.

Ketiga: Hari Kiamat disebut dengan *'hari esok'* karena begitu dekat saat kedatangannya. Berdasarkan penjelasan Imam Ali ash-Shabuni ini, jelas bahwa terjadinya Hari Kiamat sangatlah cepat. Hal ini bisa dipahami karena usia kehidupan manusia di dunia ini sesungguhnya amatlah singkat dibandingkan kehidupannya nanti di akhirat yang abadi. Usia manusia di dunia saat ini rata-rata berkisar 60-70 tahun. Bahkan Rasulullah SAW dan generasi para Sahabat yang hidup lima belas abad yang lalu pun usianya berkisar di angka tersebut. Betapa singkatnya. Bayangkan, mereka yang telah wafat lima belas abad yang lalu itu, rata-rata hidup di dunia ini tidak lebih dari 70 tahun. Artinya, jika dihitung sampai hari ini, masa hidupnya di dunia yang rata-rata 70 tahun itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan masa penantiannya yang 'panjang' di alam kuburnya.

Bandingkan pula rata-rata umur manusia di dunia ini dengan umur benda-benda langit yang konon menurut para ahli diciptakan oleh Allah SWT milyaran tahun yang lalu. Para astronom memperkirakan bahwa di alam raya ini terdapat milyaran galaksi dengan sekitar 1.000 trilyun planet dan bintang. Di antara bintang-bintang itu ada yang berukuran ribuan kali besar matahari, yang jaraknya dari bumi adalah jutaan tahun cahaya. Satu tahun cahaya kira-kira 9.416 milyar km atau sekitar 10.000 tahun! Mustahil jarak tersebut bisa dilampaui manusia yang usianya super pendek itu.

Lalu bagimana jika usia manusia di dunia yang super singkat itu dibandingkan dengan keabadian kehidupannya di akhirat nanti? Tentu tak ada apa-apanya. Namun demikian, justru kehidupan yang sangat singkat di dunia inilah yang menentukan apakah manusia bahagia (masuk surga) atau sengsara (masuk neraka) di kehidupan akhirat nanti. Akhirat itulah yang Allah SWT sebut dengan 'hari esok'. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menyongsong 'hari esok' yang amat dekat waktunya itu?! *Wa ma tawfiqi illa billah.* **[] abi**

Seminar | Outbond | SuperCamp | Contest | Training | Big Assembly

10 tahun bersama insantama



Insantama

SEKOLAH ISLAM TERPADU

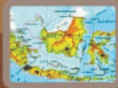
www.insantama.sch.id

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU ifs

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU ibs

SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU ibs


GEDUNG MANDIRI


7 JARINGAN KAMPUS


MULTI LAYANAN


SISTEM BOARDING

bergabunglah....
bersama para juara & calon pemimpin

















PENERIMAAN SISWA BARU 2011

kesempatan terbatas

Masa Pendaftaran	Seminar Pendidikan Anak	Pengumuman & Daftar Ulang	Open House & Outbond	Program Parenting
24 Januari s/d 5 Februari 2011	3 Februari 2011	7 s/d 12 Februari 2011	17 April 2011	23 Juli 2011

Hubungi Panitia Penerimaan Siswa Baru

0251.2160047 (SDIT),0251.2160048 (SMPIT), 0251.2160049 (SMAIT)

atau di kampus cabang setempat



KAMPUS PUSAT BOGOR, JAWA BARAT : Jl. Hegarmanah IV Gunung Batu Kota Bogor Telp. 0251.7167088; 8363973, Fax. 02518343406, email. insantama@telkom.net.

KAMPUS CABANG : SERANG, BANTEN, Jl. Rancapalupuh Drangong Taktakan Serang Telp. (0254) 7038851. BANJAR, JAWA BARAT, Jl. Kantor Pos, Gg. Rusa no. 237 Hegarsari Pataruman Kota Banjar. Telp. (0265) 743582 BEKASI, JAWA BARAT, Jl. Rawa Gede Wetan No. 6 RT: 07/02, Pondok Melati, Bekasi. Telp. (021) 84598195. BANJARBARU, KALSEL, Jln Karang Anyar 2, Loktabat Utara Banjarbaru . Telp. (0511) 7333203. MAKASSAR, Jl. Telkomas Raya, No. 2 Tamalanrea, Makassar. Telp. (0411) 5085285. CILEGON, BANTEN, Jl. Ki Wasyid Kampus Ki Wasyid Kec. Jombang Kota Cilegon. Telp. (0254) 9224442